

SEJARAH KOTA DENPASAR
1945 — 1979

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1986

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SEJARAH KOTA DENPASAR

1945 — 1979

Team Penyusun:

**A.A. Gde Putra Agung
I Gde Parimartha
Ida Bagus Gde Budharta
Ida Bagus Rama**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL**

JAKARTA

1986

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan untuk memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan

untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Juli 1986

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130119123.

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain menggarap penulisan kesejarahan perihal "Sejarah Kota" di seluruh Indonesia.

Pengertian "Sejarah Kota" dalam hal ini ialah sejarah pertumbuhan dan perkembangan kota-kota besar di Indonesia ditinjau dari segi politik, ekonomi dan sosial-budaya pada periode tertentu (1950 – 1979).

Dengan tersusunnya "Sejarah Kota" tiap-tiap daerah di wilayah Indonesia, diharapkan masyarakat luas akan memperoleh bahan-bahan informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan suatu kota. Adanya informasi yang disajikan kepada masyarakat dalam bentuk tulisan sejarah akan membuka kemungkinan tercapainya suasana dinamis serta dapat memancing partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha pembangunan.

Dalam kerangka yang lebih luas, penulisan "Sejarah Kota-kota Besar" akan memberikan kesadaran terbinanya jiwa ke-

**bangsaan terutama bagi generasi muda demi kesinambungan
sejarah dan pembinaan bangsa.**

**Jakarta, Juli 1986
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional,**

DAFTAR ISI

Halaman

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DATAR ISI	vii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Metode Penulisan	4
1.4 Telaah Sumber	5
BAB II Kota Denpasar dan Lingkungan	8
2.1 Geografi Kota Denpasar	8
2.1.1 Demografi Kota Denpasar	11
2.1.2 Kelompok Etnis	13
2.1.3 Mata Pencarian	16
2.1.4 Mobilitas Sosial	20
2.2 Komunikasi	21

2.2.1	Transportasi	21
2.2.2	Telepon, Radio dan Televisi	24
BAB III Struktur Kota		
3.1	Perkembangan Kota (Pola Kota)	28
3.1.1	Denpasar Sebagai Kota Kerajaan	28
3.1.2	Denpasar Sebagai Kota Kolonial	32
3.1.3	Denpasar Sebagai Pusat Pemerintahan	35
3.1.4	Denpasar Sebagai Sebuah Kota Republik	38
3.2.	Pembangunan Denpasar Sebagai Pusat Pemerintahan	42
3.2.1	Perkembangan Jaringan Jalan di Kota Denpasar	43
3.2.2	Perkembangan Perekonomian di Kota Denpasar	46
3.2.3	Perkembangan Pendidikan di Kota Denpasar	48
BAB IV Kehidupan Kota Denpasar		
4.1.	Kota Denpasar Sebagai Pusat Pemerintahan dan Kehidupan Sosial Politik	55
4.2	Kehidupan Perekonomian	70
4.3	Kehidupan Kebudayaan	82
BAB V Kota Denpasar Sebagai Pusat Pariwisata		
5.1	Kegiatan Pariwisata	96
5.1.1	Pusat Perhotelan	99
5.1.2	Pelabuhan Udara Internasional Ngurah Rai	105
5.1.3	Perkembangan Obyek-obyek Wisata	105
5.2	Dampak Pariwisata	110
5.2.1	Aspek Sosial Budaya	110
5.2.2	Aspek Sosial Ekonomi	114
5.3	Perubahan Sosial	118
BAB VI Kesimpulan		
DAFTAR PUSTAKA		124
LAMPIRAN		126
LAMPIRAN		131

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Kota Denpasar ibukota Daerah Tingkat I Provinsi Bali adalah salah satu kota besar di Indonesia. Sebagai pusat pariwisata yang terletak dekat pelabuhan atau Bandar Udara Internasional Ngurah Rai. Kota Denpasar mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari dua segi yaitu non-fisik dan dari fisik. Dari segi non-fisik tampak jelas betapa pesat terjadinya pertumbuhan proses urbanisasi. Proses urbanisasi dan perubahan struktur sosial kota adalah perhatian utama dari mereka yang tertarik pada studi sosiologi perkotaan.¹ Sedangkan dari segi fisik tampak betapa pesatnya pembangunan gedung-gedung, baik itu gedung perkantoran, sekolah, kampus universitas, pertokoan, pasar, terminal, perumahan penduduk maupun jalan raya tumbuh dengan cepat. Semua penunjang bagi semakin ramainya kota serta semakin banyaknya sarana angkutan.

Dilihat dari segi kehidupan kotanya, Kota Denpasar memiliki tiga kegiatan utama yaitu (1) sebagai pusat pemerin-

tahan (2) sebagai pusat pariwisata dan perekonomian dan (3) sebagai kota kesenian.

Dengan melihat Denpasar sebagai pusat pemerintahan, maka kita akan terbawa pada asal mula kota ini, yaitu pada masa kerajaan-kerajaan di Bali. Nama Denpasar berasal dari kata (den dan *pasar* yang berarti sebelah utara pasar (den = utara, pasar = pasar), mengingatkan kita pada suatu pola letak istana (*puri*) yaitu bahwa letak sebuah *puri* selalu berada di sebelah utara pasar. Jadi rupanya nama Denpasar ini diambil berdasarkan letak *puri* yang selalu berada di sebelah utara pasar. Pada masa kerajaan, *puri* merupakan pusat pemerintahan, bahkan tidak jarang juga sebagai pusat kebudayaan.²

Di masa kolonial perkembangan Kota Denpasar dipengaruhi oleh unsur-unsur "barat", seperti pengaturan gedung-gedung administrasi pemerintahan dan mulai munculnya bangunan sekolah-sekolah. Dengan demikian maka nilai tradisional mulai mengalami perubahan. Pasar yang dulunya ada di depan istana kemudian dipindahkan ke tempat yang baru, sedangkan lokasi pasar itu dijadikan lapangan, yang dulu dikenal sebagai *alun-alun*. Ini salah satu ciri dari pola kota kolonial di mana gedung-gedung pemerintahan dan rumah pejabat pemerintah ada di sekitar *alun-alun* tersebut. Beberapa bangunan dengan corak dan bentuk mengikuti model "barat" ini terus berkembang sampai masa pembangunan dewasa ini.

Kedudukan Kota Denpasar sebagai ibu-kota Daerah Tingkat I Provinsi Bali tidak dapat dilepaskan dari beberapa unsur yang menunjang terutama masyarakatnya yang sebagian besar memeluk agama Hindu. Oleh karena itu di samping mempunyai kedudukan sebagai ibu kota, ia lebih banyak berperan pula sebagai pusat segala aktivitas baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang kebudayaan. Dari segi kebudayaan ini rupanya akan lebih menonjol pada masa-masa sekarang ini terutama pada masa pembangunan yaitu sejak Pelita I sampai akhir Pelita II. Hal ini sudah tentu kita tidak dapat melepaskan

pandangan terhadap kedudukan Pulau Bali di mata dunia internasional yang sejak zaman penjajahan Belanda sudah dikenal dengan kebudayaannya termasuk berbagai macam dan bentuk kesenian, upacara keagamaan serta adat-istiadatnya yang menarik bagi para wisatawan asing dan wisatawan dalam negeri. Demikian pesatnya arus wisatawan ke Bali menyebabkan Kota Denpasar sebagai jantungnya Pulau Bali, ini berarti semua kegiatan berpusat di Kota Denpasar.

Dampak ini sangat berpengaruh pada perkembangan dan perluasan kota, munculnya hotel-hotel bertaraf internasional maupun nasional, rumah makan, toko-toko, tempat-tempat rekreasi ataupun taman hiburan sehingga pembangunan dalam bidang pariwisata berkembang dengan pesat.

Salah satu yang menonjol mengenai kekhasan Kota Denpasar adalah sebagai pusat kebudayaan. Hal ini tercermin dalam kegiatan pendidikan yaitu munculnya sekolah-sekolah dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Banyaknya sekolah ini menyebabkan penduduk Kota Denpasar semakin padat, keramaian kota semakin meningkat dan secara tidak langsung berpengaruh juga pada masalah inovasi terutama menyadarkan masyarakat Kota Denpasar pada tingkat pengetahuan. Akibat dari dampak ini muncul stratifikasi sosial dalam masyarakat kota yang terdiri atas golongan *elite* dan *non-elite* atau dapat dilihat dari golongan bawah sampai golongan atas.

Kota Denpasar sebagai kota besar, sangat menarik bila kita lihat kelompok-kelompok etnis yang ada di kota Denpasar seperti golongan Tionghoa, Arab sebagai golongan minoritas yang lebih banyak hidup dari perdagangan. Di samping itu masih tampak lagi beberapa kelompok suku bangsa seperti Jawa, Madura, dan Minang yang jumlahnya semakin meningkat di Kota Denpasar di mana sebagian dari mereka hidup dengan mendirikan rumah-rumah makan sebagai salah satu sarana yang ikut menunjang kehidupan pariwisata di Kota Denpasar. Daya

tarik Kota Denpasar dari berbagai aspek itu menyebabkan timbulnya urbanisasi yang membawa dampak yang sangat kompleks dalam kehidupan masyarakat kota.

Dari uraian tersebut dapat ditarik beberapa permasalahan, antara lain bagaimana perkembangan struktur Kota Denpasar dari masa kerajaan sampai pada masa republik? Sebagai ibu kota dan sebagai pusat pariwisata serta pusat kebudayaan, sejauh mana dapat memberikan dampak terhadap terjadinya perubahan sosial?

1.2. Ruang Lingkup

Tulisan ini mengambil ruang lingkup waktu dari masa kemerdekaan sampai akhir Pelita II yaitu dari tahun 1945 – 1979. Walaupun beranjak dari tahun 1945, namun dalam melihat sejarah perkembangan Kota Denpasar dipandang perlu untuk melihat perkembangan masa-masa sebelumnya yaitu pada masa kerajaan dan masa kolonial dengan maksud agar mendapatkan gambaran latar belakang sejarahnya sehingga tampak lebih jelas perkembangan struktur kota. Perubahan struktur itu dapat dilihat dari pola kota pada masa kerajaan. *Puri* sebagai pusat aktivitas dan dari sana meluas ke beberapa bagian, kemudian pada masa kolonial lebih jelas lagi setelah mengikuti pola kota kolonial di mana *alun-alun* serta gedung-gedung ala barat mulai tampak di sekitar alun-alun itu sebagai tempat aktivitas pemerintahan. Ini mengalami perkembangan yang pesat setelah memasuki era pembangunan sampai pada akhir Pelita II, tahun 1979, baik sebagai ibu kota maupun pusat pariwisata.

1.3. Metode Penulisan

Dalam melihat perkembangan Kota Denpasar dari dimensi sejarah, teori dan konsep dari ilmu-ilmu sosial sangat membantu dalam melakukan identifikasi pelbagai unsur dari situasi sejarah pada umumnya dan keadaan kota dari masa ke masa.³ Sebagai salah satu ciri dalam perkembangan kota adalah munculnya berbagai masalah yang menyangkut urbanisasi dengan segala

pengaruhnya dalam masyarakat kota. Demikian pula dampak modernisasi akibat kemajuan teknologi, banyak mempengaruhi lajunya perkembangan ekonomi kota, timbul berbagai kelompok etnis dalam masyarakat kota yang bersifat pluralistik.⁴

Untuk mendapatkan berbagai informasi tentang sejarah Kota Denpasar, telah dilakukan pengumpulan data baik melalui penelitian perpustakaan dan arsip, wawancara dan penelaahan sumber di beberapa kantor instansi pemerintah.

Mengikuti perkembangan ilmu sejarah dewasa ini, penulisan sejarah Kota Denpasar diarahkan pada penulisan sejarah sosial, sehingga pendekatannya pada aspek-aspek sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan.

1.4. Telaah Sumber

Dalam membahas masalah sumber yang merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan sejarah, dapat diinformasikan bahwa sumber-sumber berupa arsip boleh dikatakan sangat minim. Hal ini dapat dimaklumi bahwa periode 1945-1949 merupakan periode Revolusi Pisik, sehingga beberapa arsip mengenai pertumbuhan Kota Denpasar termasuk data mengenai pemerintahan, demografi dan pemetaan kota hampir tidak ada karena masalah pengarsipan pada masa-masa itu belum banyak mendapat perhatian.

Beberapa sumber yang dapat menunjang permasalahan antara lain *Memori Penyerahan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara*, pada masa jabatan Sarimin Rekso-dihardjo. Di samping itu dari Unit Perencanaan Daerah Bali mengeluarkan buku *Perencanaan Induk Kota Denpasar, 1972* dan beberapa peraturan tentang pembentukan Kota Administratif Denpasar dan beberapa peraturan lainnya, cukup membantu untuk melihat perkembangan Kota Denpasar. Salah satu sumber yang cukup penting adalah informasi yang diberikan oleh Proyek Pembinaan Unit Perencanaan Daerah Tingkat I Provinsi Bali, Dit Tata Kota dan Tata Daerah DitJen Cipta

Karya Departemen PU, *Kota Administratif Denpasar, Fakta dan Penjelasannya*, Denpasar, 1981. Beberapa sumber lainnya yang cukup penting juga adalah sumber yang kami dapatkan dari beberapa kantor instansi pemerintah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten ikut melengkapi penulisan ini, ditambah beberapa literatur penunjang yang ada relevansinya dengan permasalahan.

CATATAN BAB I

1. Hans – Dieter Evers, *Sosiologi Perkotaan*. (Jakarta: LP3 ES, 1982), *passim*.
2. Lihat Anak Agung Gde Putra Agung, "Kebudayaan Istana Amlapura", dalam Soedarsono dkk. (ed), *Peranan Kebudayaan Daerah Dalam Proses Pembentukan Kebudayaan Nasional*. (Jogyakarta: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi), Dirjen Kebudayaan, Depdikbud, 1985), hal. 3-22; Cf. A.L. Baskam, "Sejarah Timbulnya Kota-Kota di India", dalam Sartono Kartodirdjo, (ed), *Masyarakat Kuno & Kelompok-Kelompok Sosial*. (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977), hal. 71-88.
3. Sartono Kartodirdjo (ed), *Masyarakat Kuno & Kelompok-Kelompok Sosial*. *Ibid.* hal. 2.
4. Beberapa contoh dalam mempelajari sejarah kota dapat dibaca dalam Oscar Hadlin and John Burchard, *The Historian and the City*. (Massachusetts : The M.I.T. Press, 1963), *passim*.

BAB II KOTA DENPASAR DAN LINGKUNGANNYA

2.1 Geografi Kota Denpasar

Kota Denpasar terletak di Dataran Rendah Bali Selatan, yang jaraknya rata-rata antara 7 sampai dengan 10 km dari pantai. Jarak yang dekat ini membawa suatu konsekuensi bahwa Denpasar hampir sepanjang tahun mempunyai temperatur yang cukup tinggi yakni antara 22°C sampai dengan 24°C. Temperatur setinggi ini menyebabkan Kota Denpasar memiliki hawa panas, bahkan pada saat-saat musim penghujan yakni antara bulan-bulan Oktober – April.

Sementara itu Kota Denpasar pada saat ini mempunyai wilayah yang cukup luas terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Selatan dan Denpasar Barat. Batas dari seluruh kecamatan itu di sebelah utara adalah wilayah kecamatan yang lain dari Kabupaten Badung yang sementara ini tidak dimasukkan dalam wilayah Kota Denpasar yakni Kecamatan Mengwi dan Abian Semal. Di sebelah timur dari Kecamatan Denpasar Timur adalah wilayah Kabupaten Gianyar. Di sebelah barat dari Kecamatan Denpasar Barat adalah Samudra Hindia. Batas Samudra Hindia ini juga merupakan batas selatan seluruh wilayah Kota Denpasar.

Selanjutnya tentang keadaan alam Kota Denpasar dapat diketengahkan sebagai berikut. Kota Denpasar dibelah oleh sebuah sungai yakni Sungai Badung yang bermuara di Samudra Hindia. Demikian pula di wilayah Denpasar Timur terdapat sebuah sungai yang lazim pada saat ini disebut dengan Sungai Balitak. Sungai ini juga bermuara di Samudra Hindia yakni di pantai Sanur.

Dengan keadaan seperti ini dapat dimengerti apabila sebagian wilayah Kota Denpasar pada saat ini masih terdiri atas tanah persawahan, baik yang terletak di wilayah Denpasar Barat, Denpasar Selatan maupun Denpasar Timur. Pada bagian lain khususnya di wilayah pantai terdapat daerah-daerah kering yang terdiri dari tanah pasir dan tanah kapur, sehingga daerah ini dapat dikatakan wilayah non produsen. Namun di lain pihak wilayah pantai ini kemudian menjadi penting baik sebagai wilayah hiburan maupun sebagai pelabuhan seperti Benoa dan wilayah Tuban yang dikembangkan sebagai pelabuhan laut dan pelabuhan udara modern sejak tahun 1933.¹

Kedua wilayah ini terletak di bagian selatan Kota Denpasar yakni di wilayah *tafelhoek* yang pada saat ini lebih dikenal dengan istilah bukit kapur². Pelabuhan Udara Tuban sendiri terletak di sebelah barat sebuah tanah genting yang menghubungkan bukit kapur tersebut dengan Pulau Bali sedangkan Pelabuhan Benoa terletak di pantai wilayah Bukit Kapur tersebut, yang disebut dengan nama Tanjong Benoa.

Keadaan sebagai tersebut di atas boleh dikatakan tidak banyak mengalami perubahan sampai tahun 1960,³ kecuali pengambil alihan beberapa gedung perkantoran dari pemerintah Kolonial Belanda yang tampaknya masih sempat mempertahankan dirinya sampai menjelang pemulihan kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1950. Pembangunan dalam rangka pemekaran Kota Denpasar boleh dikatakan baru dirgulai setelah tahun 1958 yakni ketika Denpasar dijadikan ibu kota Provinsi Bali ketika Bali dipisahkan dari Provinsi Nusa Tenggara.⁴

Dengan sendirinya pembangunan kota ini telah mengubah situasi lingkungan seperti berkurangnya tanah pertanian sebagai akibat pembangunan gedung-gedung perkantoran dan timbulnya tempat-tempat pemukiman baru serta pembangunan fasilitas perkotaan seperti jalan-jalan, pusat kegiatan olah raga dan sekolah-sekolah.

Dengan keadaan ini situasi perkotaan di Kota Denpasar mengalami sedikit perubahan, karena adanya pemusatan-pemusatan dari pembangunan tersebut di atas. Wilayah Denpasar Barat tampaknya tetap menjadi pusat kegiatan perekonomian dengan pusat-pusat perbelanjaannya yang boleh dikatakan telah berkembang sejak pemerintah kolonial mulai berkuasa di Denpasar. Pada perkembangan dewasa ini pusat kegiatan perekonomian ini semakin berkembang bahkan pembangunan pusat-pusat perbelanjaan seperti pasar dan pertokoan lebih diperbaharui.

Di lain pihak wilayah Denpasar Timur tampaknya condong dikembangkan sebagai wilayah pendidikan yang pembangunannya telah dimulai setelah pemulihan kedaulatan RI. Sekolah-sekolah dari tingkatan taman kanak-kanak sampai dengan SLTA sampai tahun 1970-an masih dipusatkan di wilayah ini. Baru menjelang akhir tahun 1970-an pemerintah daerah memulai dengan kebijaksanaannya yang baru yakni menyebar pendirian sekolah-sekolah ke seluruh wilayah Kota Denpasar.

Sementara itu wilayah Denpasar Selatan yang meliputi bekas Kecamatan Kuta dan bekas Kecamatan Kesiman bagian Selatan berkembang menjadi tempat-tempat hiburan dan rekreasi serta menjadi pusat pengembangan wilayah pariwisata. Wilayah ini perkembangannya ditandai dengan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata seperti hotel-hotel, restoran, dan tempat-tempat rekreasi.

Memang di pusat Kota Denpasar banyak pula dibangun sarana pariwisata. Hanya saja pembangunan sarana ini terbatas karena sesuai dengan rencana induk pengembangan Kota Den-

pasar, pengembangan pusat pariwisata diarahkan ke arah selatan yang meliputi wilayah yang membentang dari Sanur, Nusa Dua dan Pantai Kuta.⁵

2.1.1 Demografi Kota Denpasar

Secara luas pengertian demografi bagi Kota Denpasar meliputi hal-hal yang secara erat berhubungan dengan masalah kependudukan seperti jumlah penduduk,, mata pencaharian, kelompok-kelompok etnis dan mobilitas sosial yang ada serta mewarnai perkembangan Kota Denpasar. Secara mengkhusus dari jumlah penduduk, perkembangan Kota Denpasar tampak sangat pesat. Tentu saja perkembangan ini bukan hanya disebabkan oleh faktor kelahiran, tetapi yang lebih berpengaruh adalah faktor urbanisasi atau juga migrasi yakni perpindahan penduduk dari daerah lain ke Denpasar. Perpindahan ini sebagian besar sebagai akibat perkembangan Kota Denpasar sendiri yang tumbuh sebagai pusat kepariwisataan di samping juga sebagai akibat pertumbuhan Kota Denpasar sebagai salah satu kota besar di Indonesia.

Pertumbuhan ini dapat dikatakan dimulai sejak tahun 1960-an yakni sesaat setelah Kota Denpasar dijadikan ibu kota Provinsi Bali, sebagai kelanjutan dari pembagian wilayah Provinsi Nusa Tenggara. Sejak saat itulah Kota Denpasar semakin merasakan perkembangan kependudukannya sebagai tampak dalam pertumbuhan pemukiman-pemukiman baru hampir di seluruh wilayah Kota Denpasar.

Secara singkat dapat diketengahkan perkembangan penduduk di tiga kecamatan yang kemudian menjadi wilayah Kota Denpasar sebagai berikut.⁶

Kecamatan*)	1932**)	1952	1954	1959	1970	1975	1978
Kota	21.803	26.283	27.271	27.851	68.430	87.212	148.260
Kesiman	31.989	38.709	39.381	42.741	64.115	96.725	145.112
Kota	39.183	48.143	50.383	60.120	90.180	108.216	162.324

Catatan:

*Ketiga Kecamatan ini setelah tahun 1979 yakni setelah Kota Denpasar dijadikan kota madya diubah namanya menjadi Kecamatan Kota yang hampir seluruh wilayahnya menjadi Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Kesiman menjadi Denpasar Timur dan Kuta menjadi Denpasar Selatan.

**Data ini didapatkan di dalam laporan Controleur H J Hooks-tra *Nota van Toelichtingen Betrefende het in te stellen Zelfbestuurend Landschap Badong*. Sedangkan data kepadatan penduduk setelah tahun 1952 diambil dari arsip pada Kantor Statistik Kabupaten Badung.

Dari data di atas diketahui kenaikan kepadatan penduduk di Kota Denpasar. Sampai dengan tahun 1959 penduduk Kota Denpasar masih relatif kecil. Tidak mengherankan apabila sampai pada tahun ini ekologi Denpasar masih tampak keasliannya. Walaupun kepadatan penduduk setiap tahun mengalami penambahan namun penambahan itu tidaklah menyolok dan tampaknya belumah mengakibatkan terjadinya keresahan-keresahan khususnya dalam masalah pemukiman. Namun setelah Denpasar ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Bali masalah pertumbuhan penduduk mulai dirasakan dari tahun ke tahun. Dalam data di atas ditunjukkan bahwa penduduk Kota Denpasar pada tahun 1970 rata-rata bertambah sampai menjadi 2½ kali banyak penduduk pada tahun 1959 dan pada tahun 1978 naik menjadi 2½ kali penduduk kota pada tahun 1970. Jadi apabila dijabarkan dalam angka maka penduduk Kota Denpasar (yang terdiri atas 3 kecamatan) yakni pada tahun 1959 berjumlah 130.712 jiwa naik pada tahun 1970 menjadi 222.725 jiwa dan pada tahun 1978 menjadi 455696 jiwa. Jumlah ini merupakan jumlah seluruh Warga Negara Indonesia tanpa adanya perbedaan agama atau suku bangsa, sebab di samping jumlah ini masih terdapat beberapa orang bukan WNI yang menetap dan menjadi penduduk Kota Denpasar secara turun-menurun.

Dengan keadaan seperti tersebut di atas ini jelas telah menimbulkan beban yang tidak sedikit bagi pemerintah seperti masalah pemukiman, pendidikan dan pembukaan lapangan kerja, karena pertambahan penduduk seringkali akan menimbulkan banyak problem-problem sosial yang seringkali menjurus pada hal-hal yang bersifat negatif seperti timbulnya gelandangan-gelandangan, pencurian dan gangguan keamanan lainnya. Sebab itu untuk menjaga agar jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu, pemerintah telah berusaha untuk melakukan pemecahannya seperti mengatur pemukiman memperbanyak sekolah-sekolah maupun memperluas lapangan kerja, baik oleh pemerintah sendiri maupun bekerja sama dengan pihak swasta.

2.1.2. *Kelompok Etnis*

Sejak zaman Kerajaan Badung, Denpasar telah didiami oleh penduduk dari berbagai suku bangsa. Bahkan sejak awal abad XVIII, yakni ketika Kuta muncul dan mengambil peranan sebagai pelabuhan paling ramai di Bali, kelompok-kelompok etnis telah mulai menetap di wilayah Denpasar. Kelompok tersebut pada masa itu lebih dikenal dengan istilah "Wong Sunantara".? Dalam perkembangan selanjutnya beberapa kelompok etnis seperti orang Jawa, Bugis tampaknya dilokalisasi dengan tujuan untuk menjaga agar agama Hindu yang merupakan agama kerajaan tidak terpengaruh oleh agama lain khususnya agama Islam yang dibawa oleh orang Jawa, Madura maupun orang-orang Bugis. Untuk itulah orang-orang Jawa Madura Sasak dan Bugis yang beragama Islam ditempatkan di tempat-tempat yang terpencil seperti di daerah Tanjong untuk orang-orang Bugis di Desa Kepaon untuk orang-orang Jawa, Sasak dan Madura. Penempatan ini dilakukan sebaik mungkin karena raja Badung sesungguhnya mengfiarapkan bantuan orang-orang ini untuk melebarkan kekuasaannya seperti ketika Badung merampas Mengwi pada tahun 1894.⁸ Dalam perang ini raja Badung khusus meminta bantuan orang-orang Ma-

dura untuk menjadi laskar Badung dan ketika Badung berhasil merampas Mengwi, raja kemudian menempatkan bekas laskarnya yang beragama Islam di Desa Kepaon.⁹

Dalam perkembangannya kemudian, yakni ketika Badung kalah dalam suatu puputan yang terkenal dengan Puputan Badung pada tanggal 20 September 1906, Pemerintah Kolonial Belanda mulai mengadakan kebijaksanaan baru dalam hal penempatan orang-orang asing (bukan Bali) di Kota Denpasar. Sebelah barat bekas Puri Denpasar,¹⁰ diberikan kepada orang-orang Cina yang kemudian membangun pusat-pusat perbelanjaan. Di sekitar Pasar Badung ditempatkan orang-orang Arab sebagai pedagang-pedagang untuk mengimbangi aktivitas Cina. Sementara itu orang-orang Jawa, Madura, Sasak dan orang Islam lainnya yang ingin hidup di kota oleh Pemerintah kolonial disediakan pemukiman baru yang disebut Kampung Jawa yang tahun 1960-an kemudian diubah menjadi Kampung Wanasari.¹¹

Dengan keadaan seperti ini jelaslah bahwa Kota Denpasar bukan hanya didiami oleh orang-orang Bali saja walaupun sebagian besar tampaknya demikian. Namun di samping orang-orang Bali masih ada orang-orang Jawa, Madura, Sasak, Bugis Cina dan Arab yang sebagian besar di antaranya kemudian menetap secara turun-temurun di Denpasar, sedangkan sebagian lagi datang setelah pemulihan kedaulatan bila dihitung secara riil, banyak penduduk pendatang ini jumlahnya mencapai 12½% dari seluruh penduduk Kota Denpasar atau sekitar 60.795 jiwa¹² terdiri atas orang Jawa, Madura, Bugis, Sasak Cina dan Arab di antara mereka itu, orang Jawa, Madura dan Bugis adalah yang terbanyak.¹³

Selanjutnya apabila kita melihat kehidupan Kota Denpasar dalam bidang agama dan kepercayaan, tampaknya penganut agama Hindu merupakan jumlah yang paling banyak dan orang Bali merupakan pemeluk yang terbanyak penganut agama Hindu menerima ajarannya secara turun-temurun Ke-

percayaan terhadap agama dan penerimaan terhadap kebiasaan yang bersumber pada adat-istiadat Bali diterima secara turun-temurun oleh penganut agama Hindu. Sebab itulah dalam sistem sosial masyarakat Hindu yang dikenal dengan sistem kasta diterima pula oleh masyarakat Hindu di Kota Denpasar. Sebab itu di antara 400.000 jiwa pemeluk agama Hindu masih dibedakan dalam suatu stratifikasi sosial seperti yang berlaku pada masyarakat Bali.

Setelah pemeluk agama Hindu, muncullah pemeluk agama Islam yang diperkirakan mencapai jumlah 50.000 jiwa tersebar di seluruh Kota Denpasar. Jumlah ini termasuk juga di antaranya anggota ABRI yang bertugas di Kota Denpasar, sedangkan 10.795 jiwa lainnya terdiri atas pemeluk agama Budha, Katholik maupun Protestan. Adapun agama Budha sebagian besar dipeluk oleh orang-orang Cina.

Mengenai pemeluk agama ini seringkali kita menjumpai ketidakkonsekwenan dari beberapa orang pemeluk agama khususnya para pedagang Cina di mana di satu pihak mereka menghormati bahkan menjalankan aturan-aturan dan adat-istiadat agama Hindu seperti membuat sesajen pada hari-hari tertentu, tetapi di lain pihak mereka ikut sembahyang di gereja. Keganjilan seperti ini menempatkan kita sebagai peneliti untuk tidak memasukkannya ke dalam suatu kriteria yang jelas bagi orang-orang tersebut. Dan hal ini dapat kita saksikan setiap waktu di Kota Denpasar.

Namun demikian jumlah pemeluk agama Katholik dan Protestan walaupun tanpa Cina dapat dikatakan cukup besar. Pemeluk agama ini sebagian besar terdiri atas anggota serta keluarga ABRI yang bertugas di Denpasar serta beberapa pendatang yang bekerja baik di perusahaan swasta maupun sebagai pegawai negeri. Memang di antara pemeluk agama Protestan ada pula yang terdiri atas orang-orang Bali sebagaimana nama gereja mereka yakni Gereja Kristen Bali yang terletak di tengah-tengah Kota Denpasar.

Khusus mengenai pemeluk agama Protestan ini kita dapat mengetahui kelompok etnis yang ada di Kota Denpasar seperti Batak dengan gerejanya yang bernama HKBP (Hurio Kristen Batak Protestan), di samping kelompok-kelompok etnis yang telah disebutkan di atas.

2.1.3. Mata Pencaharian

Sesuai dengan lingkungan Kota Denpasar, terutama sebelum tahun 1958, mata pencaharian utama masyarakat adalah bertani. Sebagian besar Kota Denpasar terletak di dataran rendah sehingga lapangan pertanian memegang posisi yang utama, lebih-lebih bila dihubungkan dengan sistem pengairan yang tampaknya tidak banyak menemukan kesulitan karena wilayah Kota Denpasar merupakan wilayah muara sungai-sungai yang cukup besar, sehingga pengairan sawah-sawah tidaklah terlalu sulit. Kehidupan pertanian ini dapat dilihat dari persawahan yang luas di ketiga kecamatan yang menjadi wilayah Kota Denpasar. Dengan sendirinya hasil utama adalah beras sebagaimana juga hasil Denpasar ketika masih menjadi bagian dari Kerajaan Badung.¹⁴

Masyarakat mempunyai pekerjaan utama sebagai petani yang menggarap tanahnya sendiri. Dari sistem pertanian ini timbul efek sampingan yakni semacam kelompok kerja yang disebut dengan "sekehe" yang mempunyai kaitan erat dengan mata pencaharian penduduk seperti "sekehe numbeg" (mencangkul) "sekehe mederep" (mengetam) dan "sekehe memula" (menanam benih).¹⁵

Sementara sang bapak dalam satu keluarga mengikuti kegiatan pengelolaan tanah sawahnya baik secara perorangan maupun secara sekehe, keluarga mereka di rumah banyak di antaranya yang mencari pekerjaan tambahan seperti membuat anyam-anyaman ataupun memelihara ternak. Pemeliharaan sapi biasanya dikaitkan dengan pengelolaan tanah sehingga pemeliharaan ini boleh dikatakan merupakan hal yang

wajib. Tidak mengherankan apabila hasil utama penduduk Denpasar pada masa lalu adalah beras, babi, dan sapi, bahkan babi dan sapi memasuki jalur ekspor antara lain ke Hongkong dan Singapura.¹⁶ Dalam masa kerajaan, ketiga hasil ini pula yang memperkenalkan Bali ke arena perdagangan internasional pada saat itu.¹⁷

Bagi masyarakat pantai di mana Denpasar mempunyai pula wilayah pantai seperti Sanur, Tanjong, Kedonganan, Kuta sampai dengan Pantai Seseh kehidupan penduduk sesuai pula dengan tempatnya yakni sebagai nelayan, dan sebagian kecil di antara mereka menjadi pedagang dalam hal ini dapat diketengahkan walaupun di masa lampau yakni pada permulaan abad XIX Pantai Kuta berperanan sebagai kota pelabuhan dan kota niaga¹⁸, namun pada pertengahan abad XX ini Kuta hanyalah merupakan suatu wilayah yang untuk kedua kalinya dicoba diperkenalkan dalam bentuk yang lain yakni sebagai tempat rekreasi terutama bagi tamu-tamu yang datang ke Bali melalui Pelabuhan Udara Tuban yang dibangun oleh pemerintah kolonial pada tahun 1933.¹⁹ Dengan sendirinya maksud baik pemerintah kolonial ini nantinya akan membuka lapangan kerja baru khususnya yang berhubungan dengan lapangan kepariwisataan.

Tampaknya apa yang disebutkan terakhir di atas merupakan kenyataan bagi seluruh Kota Denpasar jadi bukan hanya bagi Kuta karena setelah tahun 1958 yakni saat ditetapkannya Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali, perkembangan kearah pariwisata memperlihatkan hal-hal yang dominan. Sebagai bukti adalah bahwa pada sekitar tahun itu pula Pemerintah pusat memberikan dua buah hadiah yang sangat berarti bagi pengembangan Bali khususnya Kota Denpasar ke arah pembangunan kepariwisataan yakni perluasan dan modernisasi Pelabuhan Udara Tuban dan pendirian Hotel Bali Beach di Sanur.

Dengan kenyataan ini jelas ada keinginan pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat Bali khususnya penduduk

Kota Denpasar dari petani tradisional ke arah modernisasi seperti usaha sampingan yang menunjang kepariwisataan seperti usaha peternakan unggas petelur, buah-buahan angkutan wisata dan usaha penunjang lainnya. Hal ini tampaknya mulai berkembang ketika Hotel Bali Beach mulai dibuka pada tahun 1966 dan ketika Pelabuhan Udara Tuban diresmikan pada tahun 1969 perubahan mata pencaharian masyarakat Kota Denpasar semakin kelihatan. Kawasan Sanur dan Kuta semakin terkenal sehingga Pemerintah kemudian menjadikan kedua tempat itu sebagai pusat-pusat pembangunan sarana kepariwisataan. Dengan pembangunan sarana pariwisata itu Pemerintah mengharapkan akan terbuka lapangan kerja baru di bidang perhotelan, pramuwisata atau sebagai pedagang yang bergerak sebagai leveransir (penyediaan) keperluan Hotel maupun restoran di samping sebagai usahawan dalam bidang jasa pariwisata seperti *art shop* maupun usaha angkutan wisata.

Perkembangan yang cepat sebagai akibat perkembangan dunia kepariwisataan ini secara tidak langsung telah menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk baik dari desa-desa ke Kota Denpasar (urbanisasi) maupun perpindahan dari daerah di luar Bali ke Denpasar khusus untuk perbaikan nasib (migrasi) memang urbanisasi di Kota Denpasar prosesnya telah dimulai jauh sebelum kemajuan lapangan pariwisata itu, bahkan dalam permulaan abad ke XIX telah terjadi perpindahan dari daerah lain di Bali ke Denpasar perpindahan ini didorong oleh keinginan untuk menyelamatkan diri atau untuk mencari pekerjaan di Pelabuhan Kuta.²⁰ Dalam masa kolonial kemudian proses urbanisasi ini tampak kembali sebagai akibat kemajuan lapangan pendidikan. Denpasar adalah salah satu di antara dua kota di Bali yang dianggap kota besar, karena di samping sebagai ibu kota lansekap juga sebagai kota dari *Afdeeling Zuid Bali*.²¹ Dari status Kota Denpasar ini pula pemerintah kolonial berusaha untuk mengadakan perbaikan-perbaikan atas Kota Denpasar.²²

Dalam periode 1966 sampai dengan 1979 ini jelas bahwa urbanisasi disebabkan oleh terbukanya lapangan kerja baru khususnya dalam lapangan kepariwisataan sehingga urbanisasi ini telah menimbulkan banyak masalah bagi pemerintah daerah. Di antara masalah ini terdapat masalah pemukiman yang dengan sendirinya akan memberikan dampak negatif terutama apabila dihubungkan dengan ekologi hal ini dapat dilihat dari semakin sempitnya daerah-daerah pertanian yang merupakan jalur-jalur hijau di masa yang lampau. Dengan sendirinya penyempitan jalur pertanian ini telah menggeser pula sistem mata pencaharian masyarakat tradisional seperti halnya petani-petani tradisional. Dengan demikian perubahan ini berakibat pula bergesernya nilai-nilai lama yang sangat didasari oleh kehidupan yang komunal dengan sistem gotong-royong seperti tampak dalam sistem kelompok kerja (gotong-royong) tersebut.

Selanjutnya masyarakat petani sedikit demi sedikit mulai merasakan pergeseran itu. Sementara itu bagi para petani yang masih ingin mempertahankan kehidupan yang tradisional itu pada umumnya akan pindah melalui program pemerintah dalam bentuk transmigrasi. Sedangkan seluruh kekayaannya yang berupa tanah akan dijual sehingga lahirlah pemilik-pemilik baru dengan sistem mata pencaharian yang baru pula sesuai dengan apa yang pada saat ini berkembang. Dengan demikian tumbuhlah satu kelompok masyarakat baru yang merupakan masyarakat pendatang yang pada umumnya tidak mau terikat pada kebiasaan yang hidup pada masyarakat sekelilingnya yang terdiri atas masyarakat (penduduk) asli. Tentu saja hal seperti ini seringkali melahirkan semacam konflik yang mengarah kepada hal-hal yang destruktif. Biasanya konflik ini akan berakhir apabila antara penduduk asli (yang diistilahkan "Desa Mawed") dengan pendatang besarnya sama (dalam jumlah jiwa). Pada saat inilah nilai lama akan bergeser ke arah penerimaan nilai yang baru.²³

2.1.4. Mobilitas Sosial

Mobilitas sosial terjadi sebagai akibat terjadinya gejala sosial maupun terjadinya urbanisasi²⁴. Hal semacam ini tampaknya terjadi pula di Kota Denpasar. Di satu pihak gerak masyarakat ini mengarah kepada pertambahan penduduk (mobilitas horisontal). Dalam hal ini penduduk Denpasar menjadi semakin padat²⁵, sehingga telah menumbuhkan pemukiman-pemukiman baru. Pertumbuhan ini telah menyebabkan terjadinya semacam "kota satelit" seperti Sanur Kuta ataupun Kreneng dan Lumintang. Di lain pihak mobilitas horisontal ini ikut pula mempersempit lingkungan hidup dari penduduk kota. Pembukaan lapangan kerja baru seperti yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam dunia wisata tidak cukup untuk menampung para pencari kerja yang datang dari hampir seluruh pelosok Indonesia, sehingga hal ini pula telah berakibat terjadinya mobilitas vertikal baik yang positif maupun negatif gerak masyarakat yang vertikal dan positif dapat kita lihat dengan adanya kenyataan dalam masyarakat di mana lahir kelompok-kelompok pengusaha baik dalam dunia wisata seperti perhotelan, restoran *art shop*, *travel* maupun dalam dunia usaha lainnya. Dengan sendirinya masalah gerak vertikal ini menyangkut pula masalah status sosial dari segolongan masyarakat yang tampak mengalami kenaikan.

Memang masalah status ini bukan hanya dapat dicapai melalui dunia usaha namun dapat pula dicapai melalui pendidikan berdirinya Universitas Udayana sejak tahun 1962 merupakan salah satu tempat yang dapat memberikan harga diri bagi masyarakat Bali umumnya dan masyarakat Denpasar khususnya namun demikian sesuai dengan ciri Kota Denpasar sebagai pusat kegiatan pariwisata di wilayah Indonesia bagian tengah, maka keberhasilan seseorang dalam profesinya merupakan status tersendiri bagi masyarakat Denpasar. Sebaliknya semakin padatnya penduduk Kota Denpasar telah membawa suatu problema tersendiri bagi masyarakat kota seperti turun-

nya status bagi golongan masyarakat yang gagal dalam menjawab tantangan di Kota Denpasar seperti terjadinya pengangguran, gangguan keamanan, gelandangan dan pengemis, seperti yang setiap saat dapat kita temukan di Kota Denpasar.

Memang pemerintah daerah telah berusaha untuk mengatasi dampak negatif dari pemekaran Kota Denpasar misalnya melalui pemilikan KTP, pemulangan orang-orang yang tidak berkartu penduduk dan pemulangan serta penggrebegan WTS Program transmigrasi sampai menjelang akhir tahun 1977 tampaknya mengalami sedikit hambatan.²⁶ Pemerintah berusaha untuk mentransmigrasikan masyarakat Bali, namun di balik itu semua datanglah pendatang-pendatang baru sehingga penduduk Kota Denpasar tidak berkurang bahkan bertambah. Bagi masyarakat Bali hal ini menimbulkan sedikit problema sehubungan dengan pelestarian budaya Bali sebagai sarana pariwisata; artinya tidaklah mungkin pendatang baru yang bukan orang Bali akan dapat melestarikan dan mengembangkan budaya Bali apalagi dengan mentransmigrasikan penduduk Bali, memang secara integrasi nasional hal ini penting untuk menghindari rasa kesukuan yang fanatik. Namun dalam hal ini harus dilihat kembali maksud pemerintah dalam program transmigrasi itu.

2.2. Komunikasi

Pembangunan sistem komunikasi secara langsung akan mengubah interaksi antara sesama manusia menjadi lebih praktis hal ini dapat kita lihat dalam perkembangan peralatan komunikasi seperti telepon, radio, televisi, jaringan jalan bahkan lebih jauh dari itu adalah transportasi untuk mendapatkan gambaran lebih jauh tentang perkembangan jaringan komunikasi, marilah kita lihat perkembangan masing-masing unsur dari sistem komunikasi itu.

2.2.1. Transportasi

Pembangunan sistem transportasi ini secara modern telah dimulai sejak masa pemerintahan kolonial. Pembangunan

jalan serta pengaspalan jalan untuk menghubungkan kota-kota di Bali merupakan prioritas utama.²⁷ Dalam waktu lebih-kurang 30 tahun sejak Bali jatuh ke tangan Belanda, jaringan jalan yang dibangun telah mencapai panjang 490,09 km.²⁸

Di Denpasar, dari seluruh jumlah itu terdapat kurang-lebih 90 km jalan yang telah diaspal.²⁹ Pembangunan jalan ini dipandang perlu sehubungan dengan dimasukkannya sistem transportasi modern seperti angkutan mobil. Jumlah sarana angkutan di Denpasar dalam masa kolonial adalah sepeda sebanyak 3000 buah, dokar sebanyak 261 buah, gerobak sebanyak 435 buah, mobil pribadi (sedan dan Jeep) sebanyak 71 buah, truck sebanyak 44 buah, bis sebanyak 46 buah, dan kendaraan gandeng sebanyak 4 buah.³⁰

Dengan kenyataan ini kemungkinan untuk perkembangan jalan-jalan baru di masa-masa kemudian akan bertambah panjang sesuai dengan pemekaran Kota Denpasar bukan saja sebagai ibu kota pemerintahan tetapi juga sebagai kota ekonomi. Hal ini tampaknya bukanlah suatu khayalan apabila kita melihat potensi Kota Denpasar dari masa kolonial yakni antara lain berupa pembangunan pelabuhan laut modern di Benoa dan Lapangan Udara Tuban.

Dalam masa setelah kemerdekaan angka-angka di atas mengalami pembengkakan terutama sekali setelah pemulihan kedaulatan RI. Jalan-jalan yang dibangun semakin panjang, bahkan dengan timbulnya pemukiman baru jalan-jalan berkembang sesuai dengan kebutuhan penduduk Kota Denpasar. Sektor perhubungan di Kota Denpasar menjadi semakin ramai karena bukan saja jalan yang dibangun hanya menghubungkan tempat-tempat tertentu seperti Denpasar Sanur, Denpasar Kuta atau Denpasar ke luar kota ke arah Gianyar atau Tabanan serta Singaraja, tetapi jauh dari itu jalan-jalan telah menghubungkan pusat kota dengan pemukiman-pemukiman baru.

Sejalan dengan perkembangan pemukiman ini dan perkembangan jalan-jalan ini, alat angkutan pun bertambah. Hal ini dapat kita lihat dari data tentang kendaraan bermotor sampai dengan akhir tahun 1971 jumlah kendaraan bermotor di Kota Denpasar telah mencapai 20.000 buah yang sepertiganya terdiri atas kendaraan roda empat dan sisanya adalah sepeda motor. Jumlah ini setiap tahun bertambah kira-kira sejumlah 2000 buah sehingga pada akhir tahun 1979 telah mencapai jumlah sekitar 40.000 (empat puluh ribu buah).

Dalam hal penerbangan, melalui Pelabuhan Udara Tuban yang kemudian bernama Pelabuhan Udara Ngurah Rai, angka-angka penerbangan baik pesawat yang pergi (*check out*) maupun yang datang (*check in*), menunjukkan kenaikan. Laporan Pemerintah Kolonial Belanda dalam masa kolonial menunjukkan angka-angka sebagai berikut.³¹

Tahun	Landing	Take off	Jumlah penumpang	Jumlah barang
1935	36 buah	36 buah	288 orang	51 kg
1936	52 buah	52 buah	468 orang	79 kg
1937	85 buah	85 buah	744 orang	172 kg

Jumlah ini dalam masa kemerdekaan yakni setelah tahun 1950 kemudian naik rata-rata dua kali setiap tahunnya³², sedangkan setelah modernisasi yakni sejak tahun 1969, banyak pesawat udara yang datang maupun yang pergi hampir mencapai jumlah 20 buah setiap hari dengan jumlah angkutan rata-rata mencapai 2000 orang.³²

Sementara itu Pelabuhan Laut Benoa pun mengalami banyak kemajuan sehingga transportasi menuju Denpasar maupun sebaliknya semakin padat. Dengan kenyataan ini dapatlah dimengerti betapa majunya transportasi di Kota Denpasar sehingga telah ikut pula memberikan andil dalam perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam rangka pemekaran kota Denpasar.

2.2.2. *Telepon, Radio dan Televisi*

Sebagai sarana komunikasi yang turut memberikan andil dalam pemekaran Kota Denpasar, telepon, radio dan televisi memegang peranan yang cukup penting. Telepon sesungguhnya telah dibangun dalam masa kolonial, hanya saja jaringan telepon pada saat itu terbatas pada kantor-kantor pemerintah dan beberapa orang yang termasuk *ambtenaar* Belanda.³³ Dalam masa setelah pemulihan kedaulatan keadaannya hampir tidak banyak berubah baru setelah tahun 1955-an jaringan telepon mulai mendapatkan tempat di dalam masyarakat sebagai sarana perhubungan yang cukup praktis. Bahkan setelah jaringan telepon diubah ke dalam jaringan otomatis, maka telepon berkembang dan menjadi salah satu kepentingan utama bagi masyarakat kota. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya pemilik pesawat telepon di Kota Denpasar, bahkan dapat dikatakan satu di antara lima rumah pribadi memiliki pesawat telepon.³⁴

Dalam pemilikan pesawat radio hal seperti pemilikan pesawat telepon ternyata lebih luas. Hampir setiap keluarga memiliki pesawat radio ini. Perkembangan sistem komunikasi dengan radio ini dimulai sejak tahun 1950-an, yakni dengan berdirinya RRI Studio Denpasar. Kemudian dalam tahun 1966 berkembanglah di Bali studio-studio radio amatir milik swasta. Perkembangan ini telah merangsang sistem komunikasi radio menjadi alat pemberi informasi yang merakyat.

Dalam perkembangan kemudian televisi sejak tahun 1976 mulai masuk sebagai alat komunikasi modern. Peresmian TVRI saluran Denpasar memberikan tambahan bagi penerimaan informasi yang lebih lengkap bagi masyarakat sehingga televisi dengan cepat berkembang dan memasyarakat. Dengan kenyataan ini modernisasi telah berproses pula pada masyarakat Kota Denpasar dalam menuju pemekaran serta perkembangan Denpasar sebagai sebuah kota besar yang sejajar dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia.

CATATAN BAB II

1. H J Hookstra, *Nota van Toelichtingen Betreffende het in te stellen Zelfbesturend Landschap Badoeng* (tanpa tahun) halaman 40-60.
2. *Ibid.* hal. 60.
3. Data yang lengkap tentang hal ini di dapatkan di Kantor PU Kabupaten Badung.
4. Lihat *Monografi Pulau Bali* (Denpasar 1969) hal 5-7
5. *Ibid;* hal. 40-45.
6. Untuk data tahun 1932 lihat Hookstra *op.cit;* hal. 90-94. Sedangkan untuk data dari tahun 1952 dan seterusnya dapat dilihat dalam kumpulan arsip pada Kantor Statistik Kabupaten Badung.
7. Wong Sunantara adalah orang asing bukan orang Bali. Lihat C Lekker-kerker, *Het Voorspel der Verstiging van de Nederlandsche macht op Bali en Lombok* dalam *BKI* 79 tahun 1923 hal 212.
8. Lihat *Babad Bandana Raja* (manuskrip, koleksi A.A. Ngurah Putra, Denpasar) lb. 12b-14b.
9. *Ibid;* Lihat pula *Babad Badung Buahari*; (manuskrip, koleksi I Gst. Ngurah Alit Konta, Denpasar), lb. 15a-15b.

10. Lihat Van Geuns, Door Badong en Tabanan en ander over Bali en zijn bewoners dalam *Soerabaijas Handelblads* (Batavia, 1906), hal. 7-11.
11. Hasil wawancara dengan bekas Bupati Badung pada tanggal 6 September 1985.
12. Sama dengan catatan nomor 6.
13. *Ibid.*
14. Lihat F A Liffinck, *De Landsverordeningen der Balische vorsten van Lombok*, ('S Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1915), hal. 113-117.
15. Lihat artikel "Orang Bali dengan Perkoempoelannya" dalam majalah *Djatajoe* No. 11 (Singaradja, September 1938), hal. 176-178.
16. Kementrian Penerangan RI, *Sunda Ketjil* (Djakarta 1954) hal. 22-27.
17. Lihat FA Liffinck, *loc. cit.*; lihat pula AK Nielsen, *Leven en avonturen van een oostinijevaarder op Bali*; (Amsterdam 1928) hal. 17-25.
18. *Ibid.*
19. Lihat HJ Hookstra, *loc. cit.*
20. Henk Schulte Nordolt, *The Lange Conection, A Danish Trader of Bali in the Middle of the XIX Century, Brooker and Buffer*, (Amsterdam 1980) hal 5-12.
21. Lihat C Utrecht, *Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok*, (Bandung: Sumur Bandung, 1962), hal 169-181.
22. Lihat HJ Hookstra, *passim*.
23. Perubahan nilai adalah merupakan dampak dari perubahan sosial, lihat Selo Soemardjan (ed), *Setangkai Bunga Sosiologi*, (Djakarta: 1954) halaman 495-506.
24. Lihat Astrid S Soesanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Binacipta, 1977) hal. 98-99.
25. Data kepadatan penduduk didapat di Kantor Statistik Kab. Badung.

26. Maksud penulis "hambatan" dalam rangka mengurangi kepadatan penduduk Denpasar karena adanya masalah di atas.
27. Hal ini ditegaskan dalam laporan LU van Stenis (Residen Bali dan Lombok): *Memorie van Overgave van Gewest Resident op Bali en Lombok*, 1919 hal. 20-29).
28. Lihat HJE Moll, *Memorie van Overgave van den Resident Bali en Lombok* (Mei 1941) hal 35-40.
29. *Ibid.*
30. HJ Hookstra, *op. cit.* hal, 59.
31. *Ibid.* hal. 60-62.
32. Data ada pada Kantor DIPARDA Propinsi Bali.
33. HJ Hoekstra, *op. cit.* hal. 75-80.
34. Data ada pada Kantor Telekomunikasi Denpasar.

BAB III STRUKTUR KOTA

3.1 *Perkembangan Kota (Pola Kota)*

3.1.1 *Denpasar Sebagai Kota Kerajaan*

Denpasar sebagai ibu kota belum dikenal dalam masa kerajaan. Nama untuk wilayah yang pada saat ini disebut "Denpasar" adalah Badung. Nama Denpasar pada mulanya hanyalah sebagai nama istana raja yang memerintah Kerajaan Badung setelah tahun 1861 yakni ketika wali raja Badung yang bernama I Gusti Ngurah Kesiman meninggal. Istana ini dibangun oleh I Gusti Gde Pemecutan dan berada di sebelah utara Pasar Badung. Dalam Bahasa Bali "utara" sama dengan "den" sehingga istana raja disebut Puri Denpasar.¹

Kerajaan Badung dibangun oleh I Gusti Ngurah Jambe Pule yakni seorang bangsawan keturunan raja Tabanan yang lebih dikenal dengan Kiayi Damar sebagai cikal-bakal kerajaan itu.² Kerajaan ini dibangun pada akhir abad XVII, yakni pada tahun 1680.³ Namun pada tahun 1721, Kerajaan Badung yang masih sangat lemah, telah dirampas oleh Mengwi. Dengan demikian Badung kemudian menjadi jajahan Mengwi dan untuk memperkuat legalitas Mengwi di Badung, raja Mengwi kemudian meng-

angkat seorang bangsawan Mengwi untuk menjadi wali daerah di Badung. Wali daerah tersebut adalah I Gusti Ngurah Bola.⁴

Masa penjajahan Mengwi atas Badung berjalan terus hingga tampil seorang keturunan Jambe Pule yang bergelar I Gusti Ngurah Pemecutan Sakti yang tampil memimpin rakyat yang masih setia kepada raja Badung yang asli yakni keturunan I Gusti Ngurah Jambe Pule serta membebaskan Badung dari Mengwi pada tahun 1800.⁵ Dengan keberhasilan ini Kerajaan Badung tampil dan ikut pula dalam peraturan politik kerajaan-kerajaan di Bali khususnya dalam abad XIX.⁶

Selanjutnya I Gusti Ngurah Pemecutan Sakti mulai membangun Kerajaan Badung baik dalam segi pemerintahan maupun dalam mengkonsolidasikan kekuasaannya atas Kerajaan Badung. Namun sebelum sempat menikmati pembangunan wilayah kerajaan, ia wafat, sehingga wilayah kekuasaannya dibagi-bagi kepada ketiga orang putranya. Putranya yang tertua bernama I Gusti Ngurah Gde Pemecutan yang setelah diangkat menjadi raja bergelar I Gusti Ngurah Made Pemecutan tetap beristana di Puri Pemecutan dan tetap pula dihargai sebagai raja tertinggi. Adiknya dari lain ibu yang bergelar I Gusti Ngurah Kesiman menjabat sebagai "angluran agung" dan berkedudukan di Kesiman. Sedangkan adik I Gusti Ngurah Made Pemecutan yang kemudian diberikan gelar sesuai dengan tempat kedudukannya yang baru yakni I Gusti Ngurah Gde Satria bertindak sebagai raja muda dan beristana di Puri Satria.⁷

Dengan demikian sesungguhnya Badung sejak tahun 1800 dibagi menjadi tiga wilayah yakni Pemecutan, Satria dan Kesiman. Batas-batasnya antara lain Sungai Badung (yang pada saat ini mengalir membelah Kota Denpasar menjadi dua) memisahkan antara Pemecutan dan Satria. Sedangkan yang menjadi batas wilayah Kesiman dengan Satria adalah Desa Sumerta, Lebah dan Penatih. Desa-desa tersebut telah termasuk wilayah Kesiman.⁸

Dalam pelaksanaan pemerintahan, wilayah Satria berlaku sebagai wilayah semacam kecamatan yang dipimpin oleh Raja Muda I Gusti Ngurah Gde Satria. Sedangkan Kesiman berlaku sebagai wilayah kepatihan yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Kesiman yang lebih dikenal dengan gelar Anglurah Kesiman. Pemecutan dianggap sebagai pusat kerajaan dan berada langsung di bawah raja.⁹

Pembagian wilayah ini berlangsung hingga akhir kekuasaan I Gusti Ngurah Made Pemecutan. Wilayah Satria kemudian disatukan kembali ke dalam wilayah Pemecutan karena I Gusti Ngurah Gde Satria tidak berputra, sedangkan Anglurah Kesiman lebih banyak berlaku sebagai "mahapatih". Ketika I Gusti Ngurah Made Pemecutan wafat seharusnya digantikan oleh putra-putranya, namun karena kedua putranya yakni I Gusti Ngurah Gde Pemecutan dan I Gusti Ngurah Made Pemecutan masih kecil-kecil, maka untuk menjalankan roda pemerintahan Anglurah Kesiman tampil dan berlaku sebagai wali raja.¹⁰ Dengan penampilan Anglurah Kesiman sebagai wali raja maka seluruh Badung telah disatukan dalam suatu kekuasaan tunggal.

Pada tahun 1859 ketika I Gusti Ngurah Gde Pemecutan telah dewasa, ia kemudian memerintahkan untuk membangun sebuah istana yang terletak di sebelah utara Pasar Badung,¹¹ yang kemudian diberikan nama Puri Denpasar. Oleh karena I Gusti Ngurah Gde Pemecutan yang tinggal di istana itu, maka ia kemudian diberikan gelar I Gusti Ngurah Gde Denpasar.

Ketika Anglurah Kesiman (I Gusti Ngurah Kesiman) meninggal pada tahun 1861,¹² I Gusti Ngurah Gde Denpasar langsung menggantikannya sebagai raja Badung, sedangkan adiknya yakni I Gusti Ngurah Made Pemecutan diangkat sebagai "punggawa Pemecutan".

Tahun 1861 oleh raja I Gusti Ngurah Gde Denpasar dianggap sebagai permulaan konsolidasi kekuasaannya setelah hampir selama 35 tahun yang dimulai dari tahun 1826-1861, kebijaksanaan kerajaan yang ditangani oleh I Gusti Ngurah Ke-

siman membawa Badung kepada suatu peran yang dinilainya sangat merugikan kerajaan. Aktivitas Ngurah Kesiman yang seringkali bersedia bekerja sama dengan Belanda telah membawa nama kerajaan kepada penilaian yang negatif khususnya di mata raja-raja Bali lainnya. Bahkan persekutuan Badung Belanda yang dalam kenyataannya Badung mengingkari ikrar raja-raja di Bali yang dicetuskan dalam pertemuan raja-raja di Bali dan bertempat di Puri Klungkung¹³, telah membawa suatu sengketa yang tak pernah berakhir antara Buleleng dengan pihak Badung.

Untuk menghilangkan citra yang buruk terhadap Badung inilah raja memulai pemerintahannya dari Puri Denpasar. Kebijaksanaannya dalam konsolidasi wilayah misalnya mengadakan kerja sama dengan Tabanan dan berusaha menghancurkan Mengwi. Dalam hal ini tampaknya Badung sudah menyadari bahwa kebijaksanaan baru dengan tidak mengindahkan Belanda justru akan berakibat timbulnya konflik dengan Belanda. Dengan kenyataan ini Badung kemudian berusaha untuk menghancurkan Mengwi dengan harapan apabila terjadi serangan atas Badung oleh Belanda, Tabanan akan dengan mudah memberikan bantuan laskar.¹⁴

Dalam membenahi sistem pemerintahannya raja Badung berusaha untuk merangkul seluruh pejabat kerajaan agar tidak dapat diadudomba oleh Belanda. Dalam pelaksanaan pemerintahannya, raja sebagai penguasa tertinggi kerajaan didampingi oleh beberapa orang penasihat yang bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan baik dalam hal-hal pemerintahan maupun dalam hal adat dan agama Hindu. Penasihat ini disebut "bhagawanta" (pendeta istana). Sedangkan untuk memudahkan pengawasan terhadap daerah, raja membagi-bagi wilayah kerajaan dalam suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang "punggawa". Wilayah itu antara lain Pemecutan, Kesiman, Abiansemal, Petang dan Mengwi. Punggawa dalam kenyataannya di samping sebagai pembantu raja dalam wilayah yang lebih kecil juga berlaku sebagai raja dalam wilayah tersebut. Sebagai bawahan raja, ia diwajibkan untuk melaksanakan peraturan-per-

aturan pemerintahan kerajaan, sedangkan raja kecil di wilayahnya ia berhak pula mengatur rakyatnya. Wilayah dari seorang punggawa kemudian dibagi-bagi lagi dalam wilayah "kemancaan" yang dipimpin oleh "manca". Setiap "manca" membawahi beberapa "keperbekelan" yang masing-masing dikepalai oleh seorang "perbekel". Struktur terendah dari sistem pemerintahan kerajaan adalah wilayah Banjar yang masing-masing dikepalai oleh seorang "kelian dinas" dan "kelian adat".

Sebagai seorang manca, ia mempunyai tugas untuk melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan peraturan pemerintah kerajaan dalam wilayahnya sehingga tugasnya adalah sebagai koordinator dari para perbekel yang ada dalam kekuasaannya. Dalam masa perang manca bertugas untuk mengkoordinasikan laskar serta memilih laskar yang dinilai mampu menghadapi musuh kerajaan.¹⁵

Untuk menjamin kejujuran para manca ataupun pejabat kerajaan lainnya, raja menghadiahkan sebidang tanah sebagai tanah bukti di samping juga diberikan hak untuk memungut pajak (upeti) dari rakyat dalam wilayah masing-masing.¹⁶

Dalam masa pemerintahan I Gusti Made Agung yang kemudian bergelar I Gusti Alit Ngurah yakni pengganti I Gusti Ngurah Gde Denpasar, sistem pemerintahan ini tampaknya tetap dipertahankan bahkan untuk memperkuat penguasa tertinggi, raja kemudian mengangkat seorang patih yang secara khusus diberikan kekuasaan sebagai panglima kelaskaran. Patih satu-satunya dalam struktur Kerajaan Badung adalah Ida Bagus Ngurah, yang bersama-sama dengan seluruh laskar Badung dan raja beserta seluruh keluarga istana gugur dalam Puputan Badung pada tanggal 20 September 1906.

3.1.2 Denpasar Sebagai Kota Kolonial

Untuk pertama kalinya nama Denpasar muncul sebagai sebutan sebuah nama tempat, menggantikan sebutan Badung setelah peristiwa Puputan Badung yang secara kebetulan sekali

puncak peristiwanya ada di sekitar Puri Denpasar. Orang Belanda yang ikut dalam pertempuran itu menyebutkan nama tempat di sekitar puri yang menjadi ajang pertempuran termasuk di wilayah Pemecutan dengan nama "Denpasar".¹⁷ Nama Denpasar ini kemudian berkembang sebagai nama pusat pemerintahan kolonial yang secara kebetulan bekas Puri Denpasar dijadikan tempat pemerintahan sementara serta langsung dihuni oleh Assisten Residen Swartz yang membawahi wilayah *Afdeeling Zuid Bali*.¹⁸

Namun demikian sebutan Denpasar sebagai nama sebuah kota untuk pertama kalinya diberitakan oleh M Van Geuns yang datang ke daerah ini pada tanggal 24 Nopember 1906 yang kemudian dalam laporan perjalanannya menyebutkan antara lain Denpasar sebagai sebuah kota untuk sementara waktu hanya akan merupakan tempat pemukiman rumah-rumah penduduk karena keadaan jalan yang kurang menunjang.¹⁹ Dengan kenyataan ini nama Denpasar sebagai sebuah nama kota lahir pada tanggal 24 Nopember 1906. Dan justru orang Belandalah yang memberikan julukan kepada tempat puputan ini dengan nama Denpasar.

Dengan keluarnya Belanda sebagai pemenang dalam Puputan Badung yang terjadi pada tanggal 20 September 1906, maka praktis seluruh wilayah Kerajaan Badung menjadi milik Belanda. Dengan segera Belanda ingin untuk menerapkan kebijaksanaannya dalam lapangan politik, ekonomi maupun dalam lapangan sosial budaya. Untuk memudahkan pelaksanaan sistem pemerintahan kolonial di daerah yang baru diduduki ini Belanda kemudian membagi-bagi wilayah Badung ke dalam beberapa kedisarikan yakni Distrik Kota, Distrik Kesiman, Distrik Kuta, Distrik Abiansemal dan Distrik Mengwi.²⁰

Khusus untuk Kedisarikan Kota (Denpasar) terdiri atas beberapa buah keperbekelan yang pembagian wilayah keperbekelannya merupakan warisan zaman kerajaan. Keperbekelan itu antara lain Dagingpuri, Dauhpuri, Pemecutan, Padangsambian dan Kampung Jawa. Wilayah Dagingpuri meliputi banjar-

banjar Taensiat, Tampakgansul, Belaluan, Sumerta, Kaliungu Banjar Bun, Kayumas dan Yangbatu. Untuk wilayah Perbekelan Dauhpuri terdiri atas Wangaya, Lelengon, Titih, Suci, Gemeh, Pekambangan dan Lumintang, Perbekelan Pemecutan terdiri atas wilayah banjar-banjar Balun, Belong, Panti, Grenceng, Tegalinggah, Pemedilan, Busungyeh, Kerandan, Pemeregan, Alangka-jeng, Gelogor, Celanggendong, Tegal, Monang-maning, Sampingbuni, Tenten, Buagan, dan Abiantimbul. Selanjutnya Perbekelan Padangsambian meliputi banjar-banjar Umaklungkung, batu-kandik, Krobokan, Batuparas, Padangsambian, Lelang, Tegesari, Minggir, Penamparan, Anyar, Buana Agung, Buana Kubu Teges, Tegalbuah, Tegallantang, Jabapura dan Umadui. Akhirnya untuk Kampung Jawa mula-mula terletak di dekat Pasar Badung. Tetapi pada tahun 1907 Pasar Badung dipindahkan ke barat sehingga masyarakatnya diberikan dua tempat yakni di dekat Puri Pemecutan yang kemudian disebut Kampung Jawa Pemecutan dan di sebelah utara Wangaya yang bernama Kampung Jawa saja dan sekarang disebut Kampung Wanasari. Kedua Kampung Jawa ini disebut demikian karena mayoritas penduduknya berasal dari Jawa dan beragama Islam. Untuk memudahkan pengawasannya kedua Kampung Jawa ini diberikan status satu perbekelan.

Di samping secara administratif Kedistrikan Kota membawahi perbekelan-perbekelan tersebut di atas, Pemerintah Kolonial Belanda memandang perlu juga untuk memasukkan beberapa wilayah dari kedistrikan lainnya yang mempunyai relevansi yang erat dengan pusat pemerintahan. Daerah-daerah yang kemudian dimasukkan pula dalam wilayah tersebut antara lain Sannur dan Tanjung Benoa yang termasuk wilayah Kedistrikan Kesiman dan hampir seluruh Kedistrikan Kuta. Ke seluruh daerah di atas dianggap relevan karena adanya pelabuhan laut yang telah dipermodernisasi di Tanjung Benoa dan Pelabuhan Udara Tuban. Hal ini terjadi setelah tahun 1933.²¹ Dengan demikian pemerintah kolonial yang dipusatkan di Kota Denpasar sekaligus mengurus Kecamatan Kota, Kecamatan Kesiman dan Kuta.

3.1.3 Denpasar Sebagai Pusat Pemerintahan

Jauh sebelum Kerajaan Badung jatuh ke tangan Belanda, Pemerintah Kolonial Belanda telah mendirikan satu keresidenan untuk mengurus kepentingan Belanda di Bali dan Lombok. Keresidenan Bali dan Lombok adalah merupakan salah satu pecahan Keresidenan Besuki yang didirikan pada tahun 1881 dan berkedudukan di Singaraja. Keresidenan ini terdiri atas tiga buah *afdeeling* yakni *Noorden Bali*, *Zuid Bali* dan *Lombok*. *Noorden Bali* pengurusannya sepenuhnya diurus oleh residen Bali dan Lombok berkedudukan di Singaraja. Lombok berkedudukan di Mataram dan setelah Puputan Badung *Afdeeling Zuid Bali* berkedudukan di Denpasar.²²

Sebagai sebuah kota yang mengurus wilayah yang cukup luas yakni daerah yang termasuk *Zuid Bali* (Bali Selatan) yang meliputi Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung dan Karangasem serta Bali, Denpasar kemudian mulai dibenahi oleh pemerintah kolonial. Pembangunan jalan maupun gedung-gedung perkantoran mulai dilakukan oleh pemerintah kolonial. Jalan setapak yang hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki, baik di tengah-tengah kota maupun jalan yang menghubungkan wilayah pelabuhan dan wilayah rekreasi mendapatkan pelebaran. Bekas Puri Denpasar sebagian dibangun menjadi rumah penginapan bagi orang-orang Belanda (sekarang Hotel Bali) dan sebagian lagi dijadikan kantor administrasi pemerintahan *Afdeeling Zuid Bali* dan *Onderafdeeling Badung*. Oleh karenanya di puri itu juga berdiam Asisten Residen Swartz dan pembantu Controleur Weiling.²³

Di samping jalan-jalan maka pemerintah kolonial telah pula mencoba menerapkan tata kota yang baru bagi Denpasar. Dalam tata kota ini antara lain menyangkut pembenahan, pelebaran dan pembangunan baru sarana maupun prasarana Kota Denpasar seperti Pasar Badung yang merupakan pusat perbelanjaan bagi masyarakat. Pasar Badung yang dalam zaman kerajaan ber-

ada berhadapan dengan puri atau istana raja Badung. Kira-kira dalam masa sekarang ini adalah tempat Markas Kodam IX Udayana digeser ke barat sampai pada tempat sekarang. Demikian pula "Pecinan" atau toko-toko Cina yang semula ada di muka pasar (lokasinya sekarang ditempati oleh BRI) juga digeser ke barat yakni di kiri dan kanan jalan Gajahmada sekarang.

Pemerintah kolonial juga telah merencanakan kawasan-kawasan industri, kawasan hiburan dan rekreasi, pemukiman baru, sekolah-sekolah dan kawasan perkantoran pelengkap administrasi pemerintahan seperti bangunan-bangunan untuk pengurusan pajak, bangunan-bangunan untuk pengurusan pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Dari perencanaan ini tampaknya mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat kota. Hal ini terbukti dengan adanya perkembangan perindustrian seperti penggilingan padi, pabrik minyak kelapa dan pemanfaatan tempat-tempat hiburan oleh masyarakat Kota Denpasar. Lebih-lebih setelah tahun 1933, yakni setelah pemerintah kolonial membenahi Pelabuhan Laut Benoa dan membangun Pelabuhan Udara Tuban. Pantai Kuta yang pada permulaan abad XIX terkenal sebagai pelabuhan yang sangat ramai, pada masa kolonial mulai kembali diperkenalkan dalam fungsi yang lain yakni tempat rekreasi, tempat penginapan dan sebagai tujuan wisata.²⁶

Pembangunan Kota Denpasar sebagai sebuah kota besar di samping Singaraja oleh pemerintah kolonial yakni sebagai pusat pemerintahan untuk *Afdeeling Zuid Bali*, telah banyak membuka lapangan kerja baru baik sebagai pegawai negeri, buruh, pedagang maupun wiraswasta yang akan merangsang lebih jauh terjadinya urbanisasi yang akan banyak menimbulkan masalah-masalah sosial. Keadaan seperti ini telah cukup disadari oleh pemerintah kolonial sehingga sebelum terjadi pemerintahan kolonial telah mempersiapkan masak-masak akibat yang ditimbulkan oleh urbanisasi tersebut seperti penyediaan rumah sakit, kawasan-kawasan untuk pemukiman dan sarana jalan. Kehidupan pun semakin kompleks sebagai akibat pembangunan

kota oleh Pemerintah Kolonial Belanda menuntut adanya keamanan dan ketentraman bagi warga kota. Untuk itulah kemudian Pemerintah Kolonial Belanda melengkapi Kota Denpasar dengan sebuah tangsi militer yang terletak di sebelah timur Pasar Badung, yakni di tempat Markas Komando Daerah Militer IX Udayana sekarang. Di samping itu di Denpasar ditempatkan pula satu detasemen polisi bersenjata terletak di daerah Pekambangan (di tempat polisi sekarang). Pembangunan ini telah dimulai sejak 1914. Sejak tahun ini pula Pemerintah Kolonial Belanda memandang perlu untuk memperluas pembangunan rumah-rumah *controleur* untuk kepentingan administrasi pemerintahan dan juga untuk memperluas lingkungan kota. Di samping itu juga pembangunan untuk perkantoran lainnya seperti Kantor Pekerjaan Umum, Kantor dan Gudang Senjata Kepolisian, Kantor Agraria, Rumah Sakit Sanglah dan Rumah Sakit Wangaya serta rumah rumah dokter, dan kantor *controleur*.^{2 5}

Untuk menghubungkan wilayah Pemecutan dan Desa Daupuri, pemerintah kolonial juga telah membangun jembatan (dua buah) yang terletak di sebelah barat Desa Gemeh dan di sebelah barat Desa Titih (yakni di Jalan Gajahmada sekarang), agar lalu lintas dapat langsung dan agar desa-desa di Perbekelan Pemecutan tidak terisolasi terutama dalam musim penghujan.^{2 6}

Fasilitas kota yang dibangun oleh pemerintah kolonial telah ikut merangsang adanya urbanisasi. Ini terjadi hampir sejak permulaan masa Kolonial sehingga seringkali menimbulkan masalah bagi pemerintah seperti masalah pemukiman, masalah kesehatan dan lain-lain. Namun demikian pemerintah telah menyadari akan masalah tersebut sehingga masalah-masalah seperti itu dapat ditangani dengan mudah. Pemerintah hanya bersikap memberikan petunjuk kawasan mana yang dapat dimukimi sesuai dengan rencana pemekaran Kota Denpasar. Perkembangan ini berlanjut sampai akhir pemerintahan kolonial Belanda di Bali pada bulan Maret 1942^{2 7}

Dalam masa pendudukan Jepang peranan Kota Denpasar hampir sama dengan peranan Kota Denpasar pada masa kolonial; hanya saja istilah-istilah perkantoran maupun aktivitas kegiatan kota disesuaikan dan diganti dengan istilah Jepang. Masa ini berlangsung sampai dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

3.1.4 *Denpasar Sebagai Sebuah Kota Republik*

Sejak proklamasi kemerdekaan sampai pemulihan kedaulatan RI, situasi dan kondisi Denpasar hampir tidak mengalami perubahan yang berarti. Dalam masa revolusi di Denpasar pernah terjadi pertempuran yang sengit dari pejuang kemerdekaan melawan tentara kolonial yang mencoba menginjakkan kakinya kembali di Bali. Demikian pula dalam masa revolusi di Denpasar pernah terjadi sebuah konfrensi yang terkenal dengan Konfrensi Denpasar yang melahirkan sebuah negara boneka yang didukung oleh Belanda dan yang kemudian terkenal dengan nama Negara Indonesia Timur. Ketika itu Denpasar berperan sebagai ibu kota Negara Indonesia Timur tersebut. Peranan ini pulalah yang secara tidak langsung telah mencoret nama Bali sebagai salah satu daerah Republik Indonesia di mana para pemudanya ikut bertempur untuk mempertahankan kemerdekaan RI.

Dalam masa berikutnya, yakni setelah pemulihan kedaulatan RI, Kota Denpasar sedikit demi sedikit menjalankan fungsinya kembali sebagai pusat pemerintahan untuk wilayah Bali. Dalam tahun-tahun ini Bali merupakan satu daerah yang termasuk ke dalam Provinsi Sunda Kecil yang dalam tahun 1954 diubah menjadi Provinsi Nusa Tenggara. Pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara ada di Singaraja sedangkan untuk wilayah Daerah Bali pusat pemerintahannya ada di Kota Denpasar. Jadi Denpasar merupakan ibu kota Daerah Bali di mana sebagai pimpinan tertinggi ditangani oleh kepala Daerah yang pada saat itu dijabat oleh Suteja. Demikian juga untuk menyesuaikan diri dengan sistem pemerintahan pusat di samping ke-

pala daerah terdapat pula satu lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang juga berkedudukan di Denpasar.

Di samping Denpasar berperanan sebagai ibu kota Daerah Bali, Denpasar juga menjadi ibu kota untuk Daerah Badung di mana dalam sistem pemerintahan ini peranan raja sebagai *regent* masih tetap diakui, hanya dalam pelaksanaan tugas hariannya dipegang oleh Dewan Pemerintah Daerah. Dengan adanya dua pemerintahan di Kota Denpasar, dengan sendirinya menuntut pula adanya pembangunan sarana fisik seperti gedung perkantoran untuk pemerintahan daerah Bali yang dalam hal ini ditempatkan di bekas Kantor Asisten Residen Bali Selatan (yang pada saat ini ada di Komplek Perumahan Gubernur Provinsi Bali) dan gedung untuk Kantor Pemerintah Daerah (yang pada saat ini menjadi Kantor Walikota Denpasar).

Sistem pemerintahan seperti ini berlangsung sampai dengan tahun 1958 yakni pada saat mana Provinsi Nusa Tenggara dipecah menjadi tiga Provinsi yakni Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Untuk Bali, pusat pemerintahannya tidak lagi Singaraja tetapi langsung berada di Denpasar. Untuk Nusa Tenggara Barat (Lombok dan Sumbawa), beribukota di Mataram dan untuk Nusa Tenggara Timur beribukota di Kupang

Sebagai sebuah provinsi, Bali kemudian dibagi menjadi delapan kabupaten yakni Badung, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Karangasem, Klungkung, Bangli dan Gianyar. Untuk Kabupaten Badung ibukotanya juga Denpasar seperti juga Provinsi Bali yang beribukota di Denpasar pula. Sepintas lalu peranan ganda dari Kota Denpasar ini boleh dikatakan telah dimulai sejak tahun 1950, namun sampai dengan tahun 1958 boleh dikatakan Denpasar belum menambahkan pemekarannya. Baru setelah ibukota provinsi disahkan di Denpasar, kota ini mulai berkembang. Pendirian Fakultas Sastra Udayana Universitas Airlangga pada bulan September 1958 merupakan awal pemekaran dan pembangunan Kota Denpasar bukan saja sebagai ibu kota Pro-

vinsi Bali tempat pusat pemerintahan, juga Denpasar mulai dibangun sebagai kota pendidikan, kota ekonomi dan kota seni budaya serta kota wisata.

Ide pemerintah ini sedikit demi sedikit mulai menjadi kenyataan dengan mulai dibangunnya sekolah-sekolah seperti SPG Negeri dan SMAN di samping sekolah swasta seperti Perguruan Saraswati, Perguruan Dwijendra, Swastiastu, Widyapura dan yang paling penting adalah pelepasan Fakultas Sastra Udayana dari Universitas Airlangga dan kemudian menjadi fakultas pertama yang memperkuat berdirinya Universitas Udayana bersama-sama dengan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan yang berlangsung pada tanggal 29 September 1962.

Dalam tahun yang sama pula Pemerintah Daerah Kabupaten Badung mulai membenahi pasar-pasar kabupaten. Dalam hal ini Pasar Kamboja mulai dibangun serta mendapatkan perluasan, di samping memantapkan Pasar Badung sebagai pusat-pusat perbelanjaan bagi masyarakat Denpasar. Demikian pula pada masa-masa ini pemerintah mulai mengembangkan jaringan jalan di Kota Denpasar untuk memperlancar arus komunikasi maupun perdagangan. Sedangkan untuk mengembangkan seni budaya, maka sekitar tahun 1959 pemerintah telah pula membangun Sekolah Kerawitan (KOKAR) yang kemudian dengan dipelopori oleh beberapa orang pencinta seni tari Bali didirikan pula Akademi Seni Tari (ASTI) Denpasar. Pendirian ini tampaknya sesuai dengan *policy* pemerintah daerah di dalam menuju cita-cita kota wisata bagi Denpasar. Sedangkan sarana fisiknya, pada tahun 1962 itu pula mulai dibangun sebuah hotel bertaraf internasional yakni Hotel Bali Beach yang pembangunannya baru selesai pada akhir tahun 1965 dan mulai dioperasikan pada tahun 1966.

Walaupun pada tahun 1965 telah terjadi suatu pembrontakan besar yang didalangi oleh PKI, namun pembangunan Kota Denpasar berjalan terus. Hal ini disebabkan oleh musuh-

musuh PKI di Bali khususnya di Denpasar jauh lebih kuat daripada PKI sehingga dengan mudah PKI dapat dihancurkan sama sekali, dan pembangunan berjalan terus.

Sejak masa orde baru, Denpasar sebagai salah satu kota di Indonesia menjadi semakin kompleks. Batas wilayah kecamatan menjadi tidak jelas lagi karena perkembangan yang pesat dari pemukiman baru dan pertumbuhan industri serta aktivitas ekonomi masyarakat. Jarak antara Kota Denpasar dengan kecamatan di lingkungan kota seperti Kuta dan Kesiman tidak terasa lagi, bahkan seolah-olah menjadi dekat. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan "kota-kota satelit" seperti Kreneng, Sanglah, Ubung di samping perkembangan beberapa buah desa yang membatasi kecamatan-kecamatan tersebut seperti Abiankapas, Tanjungbungkak, Sesetan, Pemedilan dan beberapa desa menuju Pelabuhan Udara Tuban. Bahkan setelah beroperasinya Pelabuhan Udara Ngurah Rai pada tahun 1969 beserta modernisasinya, kawasan Kuta menjadi semakin penting sebagai salah satu kawasan pariwisata.

Pembangunan sarana fisik Kota Denpasar berkembang sangat pesat sampai pada saat ini lebih-lebih setelah Kota Denpasar ditingkatkan menjadi kota administratif pada tahun 1979. Kota Denpasar dalam hal ini diperluas dalam tiga kecamatan yakni Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur dan Denpasar Selatan. Dalam hal ini Kecamatan Kota kemudian diubah dan dimasukkan ke dalam Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Kesiman menjadi Denpasar Timur dan Kecamatan Kuta beserta sebagian wilayah Kecamatan Kota menjadi Kecamatan Denpasar Selatan.

Dengan kenyataan ini jelaslah bahwa kedudukan Sanur, Benoa dan kawasan wisata Nusa Dua serta Kuta sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kotamadya Denpasar, sehingga praktis secara ekologis Kota Denpasar menjadi semakin luas apabila dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.

3.2 *Pembangunan Denpasar Sebagai Pusat Pemerintahan*

Sebagai sebuah kota yang banyak memberikan kenangan sejarah khususnya dalam menghadapi kolonialisme Belanda pemerintah daerah telah mencoba untuk mengabadikan melalui sebuah momumen di suatu tempat yang pada tahun 1906 menjadi ajang dari pertempuran Badung. Di samping itu bekas puri dari Raja yang berpuputan pada saat ini dibangun sebuah perumahan dengan gaya arsitektur khas Bali yang kini menjadi Perumahan Dinas Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali sebagai kenangan untuk mengingat kembali peristiwa bersejarah tersebut.

Pembangunan Kota Denpasar sebagai sebuah kota pusat pemerintahan telah diambil suatu kebijaksanaan antara lain sebagai ibu kota kotamadya, pusat kotanya ditempatkan pada bekas Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung yakni di sebelah barat Lapangan Puputan Badung. Sebagai ibukota kabupaten pembangunan perkantornya dipusatkan di wilayah Lumintang (+ Km 3 dari bekas Kantor Bupati yang lama ke arah utara). Sebagai ibu kota Daerah Provinsi Bali, Kota Denpasar membangun pusat perkantornya di kawasan Niti Mandala Renon, Denpasar. Kawasan ini direncanakan merupakan kota satelit yang baru dan pada kawasan ini pula telah mulai dibangun pusat perkantoran untuk tingkatan yang sederajat dengan pemerintahan tingkat provinsi seperti kantor-kantor wilayah, Kantor Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kesehatan, Kantor Perdagangan, Kantor Keuangan, Kantor Bendahara negara dan banyak lagi yang baru dalam tahapan pematangan perencanaan.

Dengan demikian kesemrawutan dalam pemerintahan diharapkan tidak akan terjadi, karena pemusatan-pemusatan perkantoran telah diatur sedemikian rupa. Sejalan dengan hal ini perkantoran dalam tingkat pimpinan daerah seperti Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Komando Daerah Militer, Kepolisian Daerah mengikuti planing yang telah disetujui. Sementara

itu pimpinan dalam tingkatan kabupaten juga diharapkan untuk diatur kembali walaupun dalam kenyataannya masih tetap seperti sebelumnya.

3.2.1 *Perkembangan Jaringan Jalan di Kota Denpasar*

Menjelang akhir masa Kerajaan Badung jalan-jalan berupa lorong-lorong sempit yang hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki. Angkutan terbesar hanyalah gerobak-gerobak yang ditarik oleh kuda sedangkan alat angkutan yang vital adalah kuda tunggangan. Jalan-jalan dalam zaman kerajaan antara lain jalan dari muka Puri Denpasar menuju Kuta yang dapat ditempuh dalam waktu paling cepat enam jam.²⁸ Dalam hal ini Puri Denpasar merupakan pusat persimpangan jalan, karena dari sini pula orang berangkat meninggalkan Badung dan di tempat ini pula orang mengakhiri perjalanannya menuju Badung. Hanya seizin raja orang dapat pergi atau tinggal di wilayah Badung.²⁹ Dengan kenyataan inilah kita akan mendapatkan jaringan jalan yang terbatas seperti juga ke arah timur menuju Sanur yang hanya dapat ditempuh dalam waktu sekitar empat jam perjalanan karena harus melintasi beberapa sungai kecil³⁰. Jalan lain yang cukup penting adalah jalan menuju Tanjung Benua, karena wilayah ini merupakan salah satu pelabuhan laut kerajaan setelah Kuta yang mengalami kemunduran pada pertengahan abad 19³¹.

Di samping ketiga jalan utama tersebut sebenarnya masih terdapat lorong-lorong kecil yang menghubungkan Puri Denpasar dengan daerah-daerah seperti Pemecutan, Padangsambian, Pagan dan Sumerta. Jalan yang menghubungkan Kerajaan Badung dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya lebih lebar dan dapat dilalui agak lancar dengan naik pedati seperti ke Gianyar, Tabanan, dan Mengwi³²

Dalam masa kolonial keadaan jalan seperti ini mendapatkan perhatian yang utama. Pemerintah kolonial kemudian mengadakan pelebaran serta pembangunan kembali jalan-jalan ko-

ta, bahkan kemudian mengadakan pengaspalan. Pemerintah kolonial menghendaki agar Badung bukan lagi sebagai wilayah tertutup sehingga rencana pemerintah jajahan dapat berjalan lancar. Hal ini berarti keuntungan yang tidak sedikit bagi pemerintah kolonial.³³ Karena itu jalan sebagai sarana utama yang akan menunjang program pemerintah harus segera diwujudkan. Sebagai realisasinya, pemerintah kolonial kemudian mengadakan pelebaran dan pembuatan jalan baru, antara lain pelebaran serta pengaspalan jalan menuju Sanur, Kuta, Lansekap Gianyar dan Lansekap Tabanan serta Lansekap Buleleng. Panjang jalan antara Denpasar – Sanur 7 km Denpasar–Kuta–Tuban 11 km, Denpasar–Singaraja 87 km dan Denpasar–Tabanan 20 km³⁴, sedangkan ke arah timur menuju Gianyar panjangnya sekitar 27 km.

Di samping jalan-jalan itu pemerintah kolonial juga membangun jaringan jalan baru di Kota Denpasar sebagai jalan-jalan keluar dari desa-desa atau pemukiman yang baru dibangun seperti jalan-jalan di kawasan Kampung Tiga yang menggunakan nama-nama bunga-bunga dan buah-buahan. Di samping itu dibangun juga jalan-jalan tembus menuju kompleks Banjar Wangaya³⁵, yang menggunakan nama-nama wayang seperti Jalan Arjuna, Kresna Nakula dan lain-lain. Semua jalan tersebut dalam masa kolonial masih dalam tahap pembukaan dan masih merupakan jalan tanah.

Dalam masa republik khususnya setelah pemulihan kedaulatan RI, perhatian pemerintah terhadap jalan dan jembatan semakin meningkat. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya jaringan jalan yang ada di Kota Denpasar sehingga perlu memberikan nama jalan dalam suatu jenis nama seperti nama pahlawan, nama buah, nama bunga, nama gunung, nama pulau, dan nama suatu peristiwa seperti Jalan Puputan. Pengelompokan nama-nama ini dimaksudkan untuk memudahkan seseorang mencari jalan, lebih-lebih bagi mereka yang baru pertama kali tinggal di Kota Denpasar.

Klasifikasi jalan hampir sama kriterianya dengan daerah lain di Indonesia yakni adanya jalan kabupaten yang merupakan jaringan jalan di dalam wilayah kabupaten, jalan provinsi yang menghubungkan daerah-daerah antara kabupaten dan jalan negara yang terdiri atas jalan tembus ke kota kabupaten lainnya dan jalan-jalan utama yang memang dibangun untuk memperlancar arus wisata seperti jalan *by pass* dan juga jalan yang menuju pusat kawasan wisata, pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Pengklasifikasian jalan ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan pendapatan daerah yang akan menunjang pemeliharaan jalan tersebut. Karena itu apabila pemerintah daerah ternyata tidak mampu memelihara jalan-jalan, maka pemerintah kabupaten dapat mengusulkan agar jalan tersebut ditingkatkan.

Gambaran tentang keadaan jalan di Kota Denpasar dapat disebutkan sebagai berikut. Jalan kabupaten sepanjang 175 kilometer hampir seluruhnya telah diaspal, jalan provinsi sepanjang 75 kilometer seluruhnya telah diaspal, dan jalan negara sepanjang 90 kilometer sebagian merupakan jalan *by pass* seperti jalan Tohpati Nusadua dan Jalan Raya Puputan juga telah diaspal seluruhnya.³⁶

Penambahan dan perpanjangan jalan baru memang dimaksudkan untuk menghindari kemacetan lalu-lintas yang semakin hari semakin padat. Dari kenyataan ini pemerintah mencoba membuka jalur-jalur *by pass* di luar kota untuk memberikan kesempatan bagi mobil-mobil berukuran besar yang berlalulalang terutama bis-bis wisatawan agar lebih mudah dan lebih dekat menuju penginapan ataupun mengadakan *tour* ke luar Denpasar. Oleh sebab itulah jalur *by pass* tampaknya memang dikhususkan bagi wilayah-wilayah yang menjadi pusat pariwisata seperti Sanur, Nusa Dua dan Kuta langsung ke luar Kota Denpasar.³⁷

3.2.2 *Perkembangan Perekonomian di Kota Denpasar*

Apabila kita melihat ke masa lampau, maka akan tampak dengan jelas sekali perkembangan ekonomi Kota Denpasar Ekonomi tertutup yang hanya mencukupi kebutuhan sendiri dengan dasar *self help* dan transaksi secara barter merupakan keadaan perekonomian masyarakat Denpasar selama masa kerajaan. Dalam masa kolonial dengan adanya keinginan pemerintah kolonial untuk membuka jalan dan jembatan sebagai salah satu sarana membuka Badung ke dalam sistem ekonomi yang terbuka mulailah Badung berkenalan dengan sistem ekonomi uang yang jauh lebih dinamis dari masa kerajaan. Transaksi berdasarkan barter dapat dikatakan mengendur dan digantikan dengan beredarnya uang. Dalam masa kolonial uang Kerajaan Belanda merupakan alat pembayaran yang paling sah.

Sementara itu kegiatan perdagangan pada masa kolonial menampilkan bahan-bahan komoditi perdagangan seperti beras, bahan kerajinan, kopi, babi, sapi, kain-kain, bahan perhiasan dan bahan-bahan dari logam seperti alat-alat pertanian. Dalam hal ini Pasar Badung berperanan sangat penting sebagai pelemparan hasil bumi masyarakat di samping sebagai tempat untuk transaksi perdagangan. Ekspor dan import sepenuhnya dipegang oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Ekspor Bali terdiri atas sapi, babi dan beras yang ditangani oleh pemerintah kolonial.³⁸ Dalam pembangunan perekonomian di Bali Pemerintah Kolonial Belanda mencoba untuk membangun Pelabuhan Udara Tuban dan memodernisasi Pelabuhan Laut Benoa.³⁹ dengan tujuan menarik keuntungan sebesar-besarnya dari potensi yang dimiliki oleh Bali khususnya Denpasar. Dalam hal ini yang dimaksudkan tidak lain dari potensi kepariwisataan yang pada saat itu mulai berkembang sejajar dengan perkembangan seni lukis yang dipersembahkan oleh para pelukis Ubud. Karena itu jalan wisata yang mulai dikenal pada saat itu adalah *Ubud Tour*.⁴⁰

Dalam lapangan perindustrian, di Denpasar sejak masa kolonial mulai dikenal pabrik minyak kelapa milik pengusaha Cina yang terdapat di Sanglah maupun di Kapal, sedangkan perusahaan-perusahaan lainnya hampir tidak ada. Namun demikian setelah masa republik, perekonomian masyarakat di Kota Denpasar menunjukkan peningkatan. Rehabilitasi pusat-pusat perbelanjaan seperti pasar, toko-toko dan pembangunan pabrik-pabrik baru ikut merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat perkotaan. Perdagangan antar daerah ikut pula meramaikan pusat-pusat perbelanjaan di Kota Denpasar, karena itu untuk dapat menertibkan para pedagang yang datang ke Denpasar pemerintah telah berupaya membangun pasar-pasar baru seperti Pasar Kamboja, Pasar Kumbasari, Pasar Lokitasari dan Pasar Satria di samping Pasar Badung yang baru selesai direhabilitasi.

Tampaknya perkembangan ekonomi Kota Denpasar tidak akan dapat berkembang dengan pesat tanpa adanya pandangan-pandangan lain seperti pandangan ke arah pengembangan industri jasa kepariwisataan sesuai dengan potensi wilayah yang dimiliki. Oleh sebab itu sejak tahun 1966 yakni sejak beroperasinya Hotel Bali Beach di Sanur, lapangan usaha jasa ini berkembang dengan pesat dengan ditandai oleh perkembangan hotel-hotel, restoran, tempat hiburan, tempat rekreasi, dan toko-toko barang-barang kesenian serta perkembangan seni tari Bali sebagai tontonan bagi wisatawan.

Dengan perkembangan ini perkembangan ekonomi pada masyarakat Kota Denpasar tidak hanya terbatas pada ekonomi perdagangan tetapi juga pada ekonomi jasa yang mempunyai kaitan erat dengan perkembangan kepariwisataan. Tercatat sejak beroperasinya Hotel Bali Beach di Sanur berkembang pula beberapa penginapan dalam bentuk hotel maupun *home stay* terutama di daerah Kuta, jasa angkutan wisata yang dalam hal ini ditangani oleh biro-biro perjalanan (travel biro) yang dalam perkembangannya mengalami suatu pasang naik dan pasang

turun. Dampak dari perkembangan kepariwisataan ini dalam bidang ekonomi adalah beberapa komoditi perdagangan yang ada hubungannya dengan pariwisata seperti daging sapi, babi, telur ayam, sayur-sayuran, buah-buahan serta barang-barang kerajinan menjadi laku terjual dengan baik. Hal ini secara langsung akan membawa dampak positif bagi perdagangan di dalam masyarakat Kota Denpasar.

3.2.3 *Perkembangan Pendidikan di Kota Denpasar*

Sistem pendidikan modern untuk pertama kalinya di Kota Denpasar dikembangkan oleh Belanda. Sebagaimana juga di daerah lainnya dalam jajahan kolonialis Belanda, pendirian sekolah bukanlah bertujuan untuk membuat masyarakat pandai dan meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi hanyalah sebagai salah satu cara untuk mencari tenaga kerja yang berpendidikan Barat untuk dipekerjakan dalam kantor-kantor pemerintah kolonial sebagai tenaga administrasi pemerintahan. Hal ini berlaku juga bagi masyarakat Denpasar. Karena itu dalam pendirian sekolah-sekolah ini Pemerintah Kolonial Belanda hanya mendirikan sekolah sampai tingkat HIS (*Hollandsch Inlansche School*) yang hanya ada satu buah di Denpasar.

Untuk lebih jelasnya pendirian sekolah-sekolah modern di Denpasar dalam masa kolonial adalah sebagai berikut.^{4 1} Pada tahun 1919 terdapat 2 buah *Tweede Klasse School*, 3 buah *Volkschoolen*, dan 1 buah *HIS*; tahun 1929 terdapat 5 buah *Tweede Klasse School*, 20 buah *Volkschoolen*, dan 1 buah *HIS*; tahun 1932 terdapat 6 buah *HIS*; tahun 1932 terdapat 6 buah *Tweede Klasse School*, 22 buah *Volkschoolen*, 2 buah *HIS*, 5 buah *Vakondenuijs*, 2 buah *Vervolgschool*, dan 1 buah *Landbowschool*; tahun 1941 terdapat 6 buah *Tweede Klasse School*, 35 buah *Volkschoolen*, 2 buah *HIS*, 1 buah *Ambachtsleergang*, 16 buah *Vakonderwijs*, 1 buah *Particulier Onderwijs Taman Siswa*, 1 buah *Huishoud-*

school, 8 buah *Vervolgschool*, 1 buah *Landbowschool*, dan 1 buah *Meijssjes Vervolgschool*.

Keadaan seperti ini pada akhirnya dibekukan setelah Jepang menduduki Bali dan Pemerintah Kolonial Belanda menyerah pada tanggal 1 Maret 1942. Sejak itu mulailah zaman pendudukan Jepang di Bali. Pendidikan kemudian disesuaikan dengan keinginan Pemerintah Jepang.

Dalam masa republik, yakni setelah pemulihan kedaulatan RI, bidang pendidikan baru mulai dibenahi kembali. Sekolah Rakyat (yang sekarang menjadi Sekolah Dasar) baru ada beberapa buah di Kota Denpasar (+ 9 buah). Tingkat SLTP terdapat satu buah negeri dan satu buah swasta yakni SMP Negeri I dan SLUB Saraswati, sedangkan pada tingkatan SLTA hanya ada SLUA Saraswati. Dalam tahun 1970-an dunia pendidikan di Kota Denpasar meningkat dengan tajam. Sampai dengan tahun 1979 tercatat sebagai berikut.^{4 2} Taman Kanak-kanak sebanyak 18 buah kesemuanya dikelola oleh pihak swasta, Sekolah Dasar Negeri 125 buah dan swasta 15 buah, SMP (dan yang sederajat) negeri 5 buah, SPG negeri 1 buah dan swasta 3 buah, STM negeri 1 buah dan swasta 2 buah, SMKI negeri 1 buah, SMTK negeri 1 buah, SKKA negeri 1 buah, perguruan tinggi/akademi negeri 2 buah (Universitas Udayana dan ASTI Denpasar) dan swasta 12 buah.

Dengan melihat perkembangan ini jelaslah bahwa minat untuk mendapatkan pendidikan cukup besar di kalangan masyarakat Denpasar. Namun demikian harus diakui bahwa sebagian dari murid dan mahasiswa di sekolah-sekolah pada tingkatan SLTA sampai dengan mahasiswa universitas negeri maupun swasta berasal dari luar Kota Denpasar. Bagi masyarakat Denpasar sendiri sebagian besar hanya merupakan masyarakat yang hanya menyediakan pemondokan atau bahkan banyak di antara masyarakat asli Kota Denpasar menjual sebagian atau seluruh tanah miliknya kepada para pendatang. Mereka kemudian tinggal di desa-desa sebagai petani. Tentu saja hal ini

dimungkinkan karena harga jual beli tanah di Kota Denpasar dari hari ke hari meningkat terus sehingga memungkinkan bagi penduduk asli Kota Denpasar yang hanya memiliki beberapa are tanah di Denpasar mampu membeli tanah pertanian yang cukup luas di pedesaan sehingga profesi mereka sebagai petani tetap akan terpelihara.

CATATAN BAB III

1. Kata "Den" dapat pula dilihat dalam kata Den Bukit yang artinya sebelah utara Bukit yang maksudnya untuk menyebutkan Singaraja. Jadi dengan kata *den* tsb. untuk menegaskan letak puri (istana) raja-raja di Bali. Jadi Puri Denpasar bukan hanya ada di Badung tetapi ada juga di seluruh Bali.
2. Lihat *Pamancangah Ratu Tabanan* (Manuskrip, Koleksi Gedung Kirtya Singaraja) lb.lb - 5a
3. Lihat R Van Eck, Schetschen van het Eiland Bali dalam *TNI* I tahun 1880 hal 210 – 225 dan lihat pula PL Van Bloemenwanders, *Bijdragen tot de Kennis van het Eiland Bali* dalam *TNI* II th. 1868. 365 – 366.
4. *Ibid.*
5. Lihat R van Eck, *loc.cit.*
6. Lihat C Lekkerkerker, *Het Voorspel der Verstiging van de Nederlandsche macht op Bali* dalam *BKI* 50 th. 1922, hal.205 dan bandingkan dengan Van den Broek, *Verslag Nopens het Eiland Bali* dalam *De Oosteerting*, I th. 1883 halaman 174.

7. Lihat *Babad Bandana Raja* (manuskrip koleksi AA Ngurah Putra, Denpasar) lb. 5a–6b.
8. *ibid* lb. 11a–13a.
9. *Ibid* lb. 1b–5a.; lihat pula R.van Eck, *op.cit.* hal 210–212.
10. *Ibid.* (bahkan R van Eck menyebutkan dengan istilah Coup.
11. Lihat *BABad Badung Buahon* (manuskrip koleksi I Gusti Ngurah Alit Konta) lb. 13a–15b.
12. *Ibid.*
13. Pertemuan ini dilakukan pada tahun 1824 lihat E. Utrecht, *Sedjarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok* (Bandung: Sumur Bandung, 1962) halaman 171–172.
14. Lihat Lauts, *Het Eiland Bali en de Balinezen*, (Amsterdam, 1848) hal. 11–20.
15. Cf. *Babad Dalem* (Manuskrip, koleksi Perpustakaan Lontar Fak. Sastra UNUD) lb. 15a–18b.
16. Hasil interviu dengan Ida Pedanda Gde Sidawa (Gianyar), bekas sekretaris bestuur Gianyar), pada tanggal 20 Agustus 1985.
17. Lihat Van Geuns, *Door Badoeng en Tabanan dalam Soerabajas Handelblaads* (Batavia, 1906), hal. 6–13.
18. Lihat E Utrecht, *op.cit*, hal 181–183.
19. Lihat Van Geuns, *loc.cit.*

20. Lihat HS Hookstra, *Nota van Toelichtingen betreffende het in te stellen Zelfbestourend Landschap Badoeng* (tanpa tahun) halaman 59.
21. *Ibid.*
22. E. Utrecht, *loc.cit.*
23. Van Koll, *Uit Onze Kolonien* (Amsterdam 1908), hal. 95.
24. HJ Hookstra, *op.cit.* hal 74–76.
25. *Ibid.*
26. *Ibid.*
27. HJE Moll, *Memorie van Overgave van den Resident op Bali en Lombok*, Mei 1941, hal. 96–98.
28. Van Koll, *loc.cit.*, Cf. J J De Hollander, *Handleiding bij de boefening der landen, volkenkunde van Nederlandsche Oost Indie*, (Breda: Van Boes & Gompagnie, 1898) hal. 15–30.
29. *Ibid.*
30. *Ibid*, Cf. Lauts, *loc. cit.*
31. R Van Eck, *op.cit* hal. 275.
32. HJ Hookstra, *op.cit.* hal 60–67.
33. *Ibid.*
34. Lihat LU van Stenis, *Memorie van Overgave van het Gewest Bali en Lombok*, April 1919, hal. 52–53.

35. *Ibid* hal. 56.
36. Data ada di PU Kabupaten Badung.
37. Penjelasan dari Kepala PU Kabupaten Badung tanggal 5 September 1985.
38. FA Lifrincq, *Nog Einige Verordeningen en Overenskoms-ten van Balische Vorsten* ('s Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1921), hal. 23–25.
39. HJ. Hookstra, *op.cit.* hal. 60.
40. *Ibid.*
41. Untuk data tahun 1919 lihat LU van Stenis, *op.cit.*, hal 28–31. Untuk tahun 1929 lihat LJJ Caron, *Memorie van Overgave van den Resident Bali en Lombok*, April 1929 hal. 80–83. Data tahun 1932 lihat Broweker, *Memorie van Overgave van den Residen op Bali en Lombok* (1932) hal. 56–58. dan data tahun 1941 lihat HJE Moll, *op.cit* hal. 80–84.
42. Seluruh data ini didapatkan di Kantor Wilayah P dan K Prop. Bali.

BAB IV KEHIDUPAN KOTA DENPASAR

4.1 *Kota Denpasar Sebagai Pusat Pemerintahan dan Kehidupan Sosial Politik*

Denpasar pada mulanya adalah ibu kota Kerajaan Badung. Istana raja berada di Puri Pemecutan dan pernah pula di Puri Denpasar akan tetapi setelah jatuhnya Kerajaan Badung pada tahun 1906, demikian pula setelah jatuhnya Kerajaan Klungkung pada tahun 1908, oleh Pemerintah Kolonial Belanda Pulau Bali dan Lombok digabungkan menjadi satu wilayah karesidenan di bawah seorang residen yang berkedudukan di Kota Singaraja. Denpasar menjadi tempat kedudukan asisten residen yang bertugas mengendalikan pemerintahan di Bali. Pulau Bali dibagi menjadi dua *afdeeling* yaitu Bali Utara dan Bali Selatan dan masing *afdeeling* membawahi beberapa *onder afdeeling*.¹

Dengan mendaratnya tentara Jepang di Pantai Sanur pada tanggal 19 Februari 1942, Kota Denpasar dijadikan pusat aktivitas pemerintahan Jepang di Bali. Setelah Proklamasi, Kota Denpasar menjadi pusat aktivitas pemuda dalam menyambut Proklamasi dan menyebarkan ke seluruh Bali.

Berita proklamasi kemerdekaan secara resmi dan luas baru diketahui di Bali pada tanggal 23 Agustus 1945, yaitu setelah kedatangan Mr. I Gusti Ketut Puja dari Jakarta untuk memangku jabatan sebagai gubernur Sunda Kecil. Para pemuda menyambutnya dengan cara mendirikan organisasi pemuda Angkatan Muda Indonesia (AMI) pada akhir Agustus 1945 di dua kota di Bali yaitu Denpasar dan Singaraja. Kegiatan organisasi pemuda ini adalah menyebarkan berita Proklamasi, menempelkan selebaran kertas merah-putih kecil-kecil di tembok-tembok toko dan mengibarkan bendera Merah Putih.²

Setelah beberapa pemuda kembali dari kunjungannya di Kota Surabaya, nama organisasi pemuda AMI Denpasar diubah menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI), karena nama AMI masih dianggap berbau Jepang. PRI kemudian menyebarkan organisasinya ke seluruh pelosok desa di Bali, khususnya di Bali Selatan, sedangkan AMI Singaraja diubah namanya menjadi Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) pada tanggal 13 November 1945. Pesindo menyebarkan organisasinya ke seluruh pelosok desa di Bali Utara.³

Kegiatan menyambut berita Proklamasi lebih semarak lagi dengan kedatangan rombongan pelajar Bali dari Jawa, rombongan penerangan dari Komite Nasional Indonesia Daerah Banyuwangi, rombongan mahasiswa *Ika Daigaku* Jakarta, demikian pula utusan dari Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Yogyakarta. Dalam pertemuannya dengan para pemuda di Kota Denpasar, rombongan mahasiswa *Ika Daigaku* menyampaikan bahwa para pemuda di Bali jangan sampai ketinggalan untuk ikut serta memerahputihkan Indonesia dari desa sampai ke gunung-gunung.⁴

Organisasi lainnya yang lahir di Kota Denpasar adalah Badan Keamanan Rakyat (BKR) Badung pada bulan Oktober 1945 di bawah pimpinan I Nyoman Pegeg. Sesuai dengan Maklumat Pemerintah RI tanggal 5 Oktober 1945, organisasi BKR kemudian dilebur menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR)

pada tanggal 1 November 1945. TKR Sunda Kecil di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai, dengan kekuatan 13½ kompi dan ditempatkan tersebar di seluruh kota di Bali. Markas TKR Sunda Kecil berkedudukan di Kota Denpasar yaitu di sebelah selatan Lapangan Puputan Badung sekarang. Persenjataan TKR Sunda Kecil sangat terbatas yakni berupa senjata-senjata bekas (*prayoda* yang berhasil dikumpulkan dan jumlahnya tidak banyak. Untuk melengkapi persenjataan TKR Sunda Kecil, pihak gubernur Sunda Kecil telah mengadakan perundingan dengan pimpinan tentara pendudukan Jepang di Sunda Kecil bertempat di Sekolah Rakyat Sempidi, Kabupaten Badung pada bulan November 1945. Dalam perundingan ini pihak Jepang tidak bersedia menyerahkan senjatanya, karena terikat atas perintah Sekutu untuk tetap memelihara status *quo*. Pihak pemuda membalasnya dengan cara mengadakan penyerbuan terhadap semua *daidan*/tangsi Jepang di Bali, dan untuk Kota Denpasar adalah tangsi Jepang di Banjar Kayumas. Serbuan ini mengalami kegagalan karena sudah bocor sebelumnya. Di Kota Denpasar tentara Jepang membuat pertahanan di Lapangan Puputan Badung sekarang. Tengah malam tentara Jepang melakukan tembakan ke segala arah mengakibatkan para pemuda mengurungkan niatnya untuk menyerbu. Kesokan harinya tentara Jepang keluar dari dalam tangsinya, dan kemudian melakukan pengejaran terhadap para pemuda sambil melakukan tembakan kepada setiap pemuda yang diketemuinya di jalan raya. Para pemuda mengundurkan diri ke luar kota untuk menghindari kepungan dari tentara Jepang. Banyak pemuda yang berhasil ditangkap, akan tetapi tidak lama ditahan kemudian dilepaskannya lagi.⁵

Pada tanggal 2 Maret 1946 tentara Gajah Merah menduduki Kota Denpasar, dan untuk selanjutnya menduduki pula kota-kota lainnya di Bali. Para pemuda Denpasar mengadakan konsolidasi perjuangan seperti latihan menggunakan senjata, latihan pertempuran, dengan bertempat di Desa Pagutan, Denpasar Barat. Untuk mendapatkan senjata mereka kemudian mengada-

kan serangan terhadap tangsi NICA yang ada di Kota Denpasar yaitu Tangsi Satria dan Tangsi Kayumas. Serangan dilakukan pada tanggal 10 April 1946 dan yang mengakibatkan gugurnya seorang pemuda Ida Bagus Japa. Setelah kegagalan ini para pemuda memenuhi panggilan Rai untuk bergabung di Munduk Malang, Kabupaten Tabanan. Mulai saat itu pusat kegiatan gerilya beralih ke pegunungan seperti Munduk Malang, Bengkel Anyar, Marga, Munduk. Meskipun demikian hubungan dengan perjuangan di kota tetap dilaksanakan melalui para kurir, untuk mendapatkan informasi dari kota, demikian pula bantuan seperti gula, rokok, obat-obatan, koran, majalah, peluru dan sebagainya. Tatkala perjuangan di desa-desa dan di gunung-gunung mendapat tekanan keras dari pihak NICA, aktivitas perjuangan dialihkan ke bidang politik dengan cara mendirikan partai-partai politik seperti Partai Rakyat Indonesia (Parrindo) pada tanggal 8 Desember 1946 di bawah pimpinan I Gusti Putu Merta dengan pusatnya Kota Denpasar. Belum sempat Parrindo meluaskan cabangnya di Bali, para pemimpinnya sudah dijebloskan ke dalam penjara oleh Belanda.⁶

Setelah NICA memandang situasi di Bali aman, pada tanggal 18–24 Desember 1946 diadakan Konferensi Denpasar bertempat di Bali Hotel Denpasar. Konferensi melahirkan Negara Indonesia Timur (NIT) yang pembentukannya bertentangan dengan naskah Persetujuan Linggarjati. Baik NIT maupun Persetujuan Linggarjati telah melemahkan kedudukan MBU DPRI Sunda Kecil yang tetap memperjuangkan terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan di pihak NIT tetap berusaha untuk menghancurkan para pemuda yang dituduhnya perusuh dan perampok (ekstremis).⁷

Karena Parindra secara legal tidak bisa bergerak, maka untuk tetap memelihara perjuangan di kota-kota di Bali, pada bulan Maret 1947 di Kota Denpasar dibentuk Markas Kota Pusat (MKP), akan tetapi tidak bisa melaksanakan programnya karena para pemimpinnya juga dijebloskan ke dalam penjara. Setelah pengakuan kedaulatan, di Bali muncul partai-partai po-

litik. Partai-partai yang ada di Jawa berusaha menyebarluaskan keanggotaannya di Bali. Di samping itu berdiri pula organisasi pemuda dan partai-partai yang bersifat lokal. Partai-partai dan organisasi pemuda yang ada di Bali pada waktu itu adalah PNI, Masyumi, KPNI (Kesatuan Pemuda Nasional Indonesia), Ikatan Rakyat Murba Indonesia (IRMI), Gabungan Buruh Indonesia (GBI), Persatuan Wanita Indonesia dan Golongan Tani. Organisasi-organisasi ini pengurus daerahnya berkedudukan di Kota Denpasar. Dari kalangan organisasi-organisasi ini muncul tuntutan antara lain (1) Demokrasi sering di bidang pemerintah (2) Lekas didatangkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Bali (3) Diadakan reorganisasi di kalangan kepolisian.⁸

Berdasarkan suara-suara di atas, pada tanggal 8 Juni 1950, Paruman Agung mengadakan sidang secara mendadak untuk membicarakan rencana perubahan ketatanegaraan di Bali. Dari hasil pertemuan itu dikeluarkan peraturan Paruman Agung No. 1/Darurat/1950 yang menetapkan pembentukan Badan Pelaksana Pemerintah Daerah Bali. Dengan adanya peraturan tersebut, dibentuklah Badan Pelaksana Pemerintah Daerah Bali dengan susunan (1) I Gusti Putu Merta (urusan politik) (2) I Gusti Gde Subamia (urusan sosial), (3) I Wayan Daging (urusan ekonomi), (4) I Wayan Badra (urusan umum).⁹ Baru beberapa hari badan pelaksana ini menjalankan pemerintahan di Bali, Pemerintah NIT mengeluarkan undang-undang tanggal 15 Juni 1950, Nomor: 44/1950, untuk mengadakan perubahan ketatanegaraan di Indonesia Timur sesuai dengan perubahan keadaan zaman.

Pada saat itu situasi keamanan di Bali sangat kacau dengan adanya pembunuhan terhadap bekas mata-mata NICA, penggedoran, pencurian, perampokan dan penculikan. Terdengar suara-suara supaya Dewan Raja-raja dihapuskan dan Undang-undang No. 44/1950 segera dilaksanakan.

Dengan kedatangan menteri dalam negeri NIT ke Bali, dibentuklah Panitia Penyelenggara Undang-undang No. 44/

1950, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pemerintah Bali tanggal 7 Agustus 1950, Nomor: 718/1/61. Berkat adanya kerja keras panitia akhirnya pada tanggal 25 September 1950 berhasil dilantik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali dengan bertempat di Pendopo Bali Hotel Denpasar. Jumlah anggota DPR Daerah Bali pada waktu itu sebanyak 41 orang, terdiri atas wakil-wakil dari PNI, Masyumi, KPNI, IRMI, GBI, Persatuan Wanita Indonesia, Golongan Tani dan orang-orang yang tidak terikat oleh partai/organisasi. Sebagai ketua DPR Daerah Bali terpilih I Gusti Putu Merta dengan wakil Ida Bagus Oka, sedangkan sebagai sekretaris adalah I Gusti Putu Gde Kuntri. Sehari setelah pelantikan DPRD Bali diadakan pemilihan kepala daerah Bali dan sebagai calon terpilih Anak Agung Bagus Suteja dan Tjokorda Anom Putra. Presiden kemudian menyetujui Anak Agung Bagus Suteja sebagai kepala daerah Bali. Untuk selanjutnya diadakan pemilihan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah Bali dengan hasil I Gusti Made Mudra untuk urusan politik, I Gusti Gde Subamia untuk urusan sosial, I Wayan Daging untuk urusan ekonomi, dan I Gusti Bagus Sugriwa untuk urusan umum. Berdasarkan Undang-undang No. 44/1950 diadakan pula perubahan struktur pemerintahan di masing-masing swapraja di Bali, sehingga pada bulan Mei 1951 di semua swapraja di Bali telah terbentuk DPR Daerah Bagian (swapraja), dan dibentuk pula Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Dengan terbentuknya badan-badan baru ini, lembaga-lembaga pemerintahan yang ada sebelumnya seperti Paruman Agung, Paruman Negara dan Dewan Raja-raja dibubarkan. Usaha untuk melaksanakan demokratisasi dalam bidang pemerintahan, sesuai dengan cita-cita masyarakat telah berhasil dilaksanakan.¹⁰

Setelah pemilihan umum pertama di Indonesia tahun 1955, timbul ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Dalam situasi yang demikian ini lahir Undang-undang No. 1 tahun 1957 yaitu Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah RI. Dengan berlaku-

nya Undang-undang No. 1 tahun 1957, Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Sarimin Reksodihardjo mengusulkan kepada Pemerintah Pusat RI supaya Provinsi Nusa Tenggara dibagi menjadi dua daerah swatantra tingkat satu yaitu Daerah swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang meliputi Pulau Bali, Pulau Lombok, dan Pulau Sumbawa dengan ibu kota Singaraja dan Daerah swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang meliputi Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timor dengan ibu kota Kupang.¹¹ Akan tetapi dengan disahkannya Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tanggal 14 Agustus 1958, akhirnya Nusa Tenggara dibagi menjadi tiga daerah swatantra tingkat satu, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pulau Bali dibagi menjadi delapan daerah swatantra tingkat dua, yaitu Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem dan Buleleng. Dengan demikian secara resmi Provinsi Daerah Tingkat I Bali lahir pada tanggal 14 Agustus 1958 dengan ibu kota Singaraja, akan tetapi selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 23 Juni 1960, No. 52/2/36 – B6, yang berdasarkan resolusi DPRD Tingkat I Bali, kedudukan ibu kota Singaraja dipindahkan ke Denpasar. Denpasar yang pada mulanya merupakan ibu kota Daerah Bali, sejak tanggal 14 Agustus 1958 menjadi ibu kota Swatantra Tingkat I Bali. Akibatnya kantor-kantor pemerintah yang pada mulanya berkedudukan di Singaraja secara berangsur-angsur dipindahkan ke Kota Denpasar. Di samping itu Denpasar juga menjadi ibu kota Swatantra Tingkat II Badung dengan segala dinas-dinasnya juga berkedudukan di Kota Denpasar.

Kantor gubernur terletak di Jalan Surapati atau di tempat bekas kantor asisten residen, sedangkan kantor bupati Badung terletak di Jalan Gajah Mada atau di tempat bekas kantor kontroler Badung. Dengan demikian kantor gubernur Bali berdekatan dengan kantor bupati Badung, sedangkan kantor-kantor lainnya terletak di sekitarnya. Pemusatan kantor-kantor ini menyebabkan para pegawai yang pada mulanya berdomisili di Kota

Singaraja kemudian pindah ke Denpasar, sehingga mengakibatkan penduduk Kota Denpasar bertambah banyak.

Kota Denpasar sendiri termasuk dalam wilayah Kecamatan Denpasar, Kabupaten Badung. Kecamatan lainnya yang termasuk wilayah Kabupaten Badung adalah Kuta, Mengwi, Abiansemal, Kesiman dan Potang. Kecamatan Denpasar terdiri atas empat desa, yaitu Desa Dangin Puri, Desa Dauh Puri, Desa Pemecutan dan Desa Padang Sambian. Batas-batas Kecamatan Denpasar ialah (1) di sebelah timur Kecamatan Kesiman (2) di sebelah selatan Kecamatan Kesiman dan Kecamatan Kuta (3) di sebelah barat Kecamatan Kuta (4) di sebelah utara Kecamatan Kesiman dan Abiansemal (lihat lampiran 1).

Pusat kegiatan perkotaan seperti pusat pemerintahan, perdagangan, industri dan pendidikan terletak di Desa Dangin Puri, Desa Dauh Puri dan Desa Pemecutan. Ketiga desa ini penduduknya paling padat. Fasilitas kota yang paling memadai adalah listrik, air minum, telepon, dan pasar. Daerah ini pulalah yang dapat dikategorikan sebagai kota lama Denpasar. Administrasi pemerintahan Kota Denpasar pada mulanya diurus oleh pihak kecamatan, sedangkan masalah-masalah lainnya seperti pembangunan, kebersihan kota, ketertiban, diurus oleh Pemerintah Kabupaten Badung, dengan aparatnya seperti Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Badung, Dinas Kebersihan Kota dan Bagian Ketertiban Umum.

Pesatnya perkembangan Kota Denpasar mengakibatkan fungsinya demikian kompleks, yaitu (1) sebagai ibu kota Daerah Tingkat I Provinsi Bali dengan pemusatan aktivitas pemerintahan Daerah Tingkat I Bali (2) sebagai ibu kota Daerah Tingkat II Kabupaten Badung (3) sebagai penghubung lalu-lintas antara daerah-daerah lainnya, baik udara, laut dan darat (4) sebagai kota pusat aktivitas masyarakat sehari-hari di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial (5) sebagai kota pariwisata (Bali sebagai pusat kepariwisataan di Indonesia bagian tengah)¹². Agar supaya perkembangan Kota Denpasar tidak semrawut, dipandang

perlu untuk membuat perencanaan kota. Berdasarkan hasil survai tahun 1969 dan 1970, yang dilakukan oleh Unit Perencanaan Daerah Bali, Direktorat Tata Kota & Daerah Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen PUTL, pada tahun 1972 telah berhasil disusun Rencana Induk Kota Denpasar (*Master Plan Kota Denpasar*). Rencana Induk Kota Denpasar ini merupakan peninjauan kembali *out line* Kota Denpasar yang disusun tahun 1966 serta merupakan bagian integral dari Rencana Regional Bali. Rencana induk ini ditetapkan dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Badung, Nomor 36/DPRD/1972 tanggal 15 Juni 1972.

Perencanaan Kota Denpasar berpegang kepada konsep bahwa kota merupakan wadah dari manusia dengan segala aktivitasnya yang selalu bergerak dan mengalami perkembangan-perkembangan dalam segala bidang baik sosial, ekonomi maupun fisik. Untuk menjaga keserasian perkembangannya, perkembangan kota perlu diatur, diawasi dan dikendalikan seperlunya. Dalam rencana wilayah administratif, Kota Denpasar meliputi Kecamatan Denpasar, Kecamatan Kesiman, dan sebagian Kecamatan Kuta. Wilayah kota akan dibagi menjadi wilayah-wilayah *civic centre* atau pusat-pusat pemerintahan yaitu pusat pemerintahan provinsi, pusat pemerintahan kabupaten dan pusat pemerintahan kota madya, wilayah pusat pendidikan dan kebudayaan, wilayah perdagangan dan usaha, wilayah perumahan, wilayah rekreasi dan pengembangan pariwisata, wilayah industri, fasilitas umum dan perlengkapan kota serta yang berhubungan dengan kota lama akan diatur atau diremajakan kembali sehingga sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan masyarakatnya.^{1 3}

Sesuai dengan aktivitas wilayah sekitarnya seperti Sanur, Kuta, dan Tuban dengan segala aktivitas kepariwataannya, maka perkembangan Kota Denpasar mengarah ke selatan dan timur. Untuk mengarahkan perkembangan kota, maka menurut Rencana Induk Kota Denpasar pertumbuhan fisik kota diperluas ke arah timur dan selatan.¹⁴

Aktivitas kota akan disebarakan ke seluruh bagian kota dengan membentuk sub-sub pusat atau pusat-pusat wilayah. Setiap lingkungan perencanaan akan memiliki pula pusat yang lebih kecil. Hirarki kota adalah pusat kota, pusat wilayah, pusat lingkungan, dan pusat masyarakat. Tiap-tiap pusat tersebut sesuai dengan tingkatannya akan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas dan pelayanan umum seperti kantor-kantor pemerintahan, daerah perdagangan, sekolah, pasar dan lain-lain. Sesuai dengan rencana, pusat pemerintahan untuk Provinsi Bali adalah *Civic Centre Renon*, sedangkan untuk Kabupaten Badung adalah *Civic Centre Lumintang*.¹⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1978, Kota Denpasar ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif Denpasar, dengan dasar pertimbangan bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Denpasar telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan kota pada umumnya yang memerlukan pengelolaan secara khusus. Dengan adanya peraturan ini, secara resmi Kota Denpasar dibentuk tanggal 28 Agustus 1978 dengan wali kota pertama I Gusti Ngurah Wardana. Wilayah Kota Administratif Denpasar meliputi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Barat, dan Kecamatan Denpasar Selatan. Tiap-tiap kecamatan membawahi beberapa kelurahan. Kecamatan Denpasar Timur meliputi Kelurahan Penatih, Kelurahan Tonja, Kelurahan Daging Puri, dan Kelurahan Sumerta, Kesiman. Kecamatan Denpasar Barat meliputi Kelurahan Peguyangan, Kelurahan Ubung, Kelurahan Padang Sambian, dan Kelurahan Pemecutan, Dauh Puri. Kecamatan Denpasar Selatan meliputi Kelurahan Sanur, Kelurahan Renon, Kelurahan Panjer, Kelurahan Sesetan, Kelurahan Pedungan dan Kelurahan Serangan.¹⁶ Di samping kelurahan, dalam pemekaran wilayah di Kotif Denpasar, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali tanggal 1 April 1980, nomor 7/Pem./II.a/2-57/1980, telah ditetapkan 25 desa persiapan. Selanjutan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting-

kat I Bali tanggal 1 Juni 1982, nomor 57 tahun 1982 ditetapkan menjadi desa definitif. Desa-desanya tersebut adalah (1) Denpasar Barat, meliputi Pemecutan Kaja, Pemecutan Kelod, Padang Sambian Kaja, Padangsambian Kelod, Dauh Puri Kaja, Dauh Puri Kangin, Dauh Puri Kauh, Dauh Puri Kelod, Ubung Kaja, Peguyangan Kaja, dan Peguyangan Kangin (2) Denpasar Selatan meliputi Sidakarya, Pemogan, Sanur Kaja, dan Sanur Kauh (3) Denpasar Timur meliputi Dangin Puri Kauh, Dangin Puri Kaja, Dangin Puri Kelod, Dangin Puri Kangin, Sumerta Kauh, Sumerta Kaja, Sumerta Kelod, Kesiman Petilan, Kesiman Kerta Langu, dan Penatih Dangin Puri.¹⁶

Selanjutnya dalam PP No. 20 Tahun 1978 ditentukan bahwa tujuan pembentukan Kota Administratif Denpasar adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan. Sejalan dengan pembentukan Kota Administratif Denpasar ditetapkan pula fungsi pemerintahannya, yaitu (1) meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik ekonomi, sosial dan budaya perkotaan (2) membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan (3) mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Bali pada umumnya dan Kabupaten Dati II Badung pada khususnya.¹⁷

Untuk dapat melaksanakan fungsi pemerintahan dengan sebaik-baiknya, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1978, Pemerintah Kota Administratif Denpasar dilengkapi dengan perangkat-perangkat (1) kepala wilayah dengan sebutan walikota sebagai unsur pimpinan (2) sekretariat yang terdiri atas staf pelaksana dengan sebutan seksi, staf administrasi dengan sebutan sub bagian (3) pelaksana teknis dengan sebutan suku dinas (4) organisasi pemerintah kecamatan dengan sebutan pemerintah kecamatan.¹⁸

Dilihat dari statusnya, pemerintah kota administratif bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Badung, sedangkan dalam rangka memperlancar laju pembangunan wilayah Kota Administratif Denpasar, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Denpasar.

Pusat Pemerintah Kota Administratif Denpasar berkedudukan di Kota Denpasar, sedangkan pusat pemerintahan Kecamatan Denpasar Barat di Desa Pemecutan, Pusat Pemerintahan Kecamatan Denpasar Timur berkedudukan di Desa Kesiman, sedangkan Pusat Pemerintahan Kecamatan Denpasar Selatan di Desa Sesetan.

Sumber-sumber pembiayaan Kota Administratif Denpasar sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Juli 1978 Nomor 16 Tahun 1978 diperoleh dari pajak dan retribusi daerah yang dipungut dalam wilayah Kota Administratif Denpasar, subsidi-subsidi dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Badung, dan sumbangan belanja rutin dan belanja pembangunan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Bali¹ 9

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor: Not.4/81/1981 tanggal 6 September 1980, maka penanganan kebersihan kota dan ketertiban umum diserahkan kepada walikota Denpasar. Demikian pula beberapa tugas kewenangan yang berhubungan dengan Kotif Denpasar diserahkan oleh bupati Badung kepada walikota Denpasar seperti pemerintahan, perekonomian, urusan umum, kesejahteraan rakyat, pembangunan, pendapatan/pajak, dan pekerjaan umum² 0

Secara berangsur-angsur walikota Denpasar menyempurnakan aparatnya sesuai dengan ketentuan struktur pemerintahan Kotif Denpasar, sehingga bisa melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Dengan cepatnya perkembangan Kotif Denpasar, banyak masalah-masalah yang timbul yang harus dipecah-

kan segera baik oleh walikota Denpasar maupun oleh pihak bupati Badung. Masalah-masalah tersebut adalah masalah kependudukan, kegiatan masyarakat, fasilitas kota, penyediaan tanah untuk pembangunan umum, administrasi pemerintahan, partisipasi masyarakat dan koordinasi. Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul, bupati Badung bersama walikota Denpasar telah melakukan usaha-usaha (1) menertibkan orang yang keluar-masuk Pulau Bali, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali dengan cara mengadakan razia-razia serta mengeluarkan kartu penduduk lebih teliti (2) membagi Kota Denpasar menjadi dua pusat kegiatan yaitu Denpasar bagian barat dengan pusatnya di Pasar Badung dan Denpasar bagian timur dengan pusatnya di Pasar Kamboja dengan cara mengikutsertakan peranan swasta. Di samping itu di setiap batas kota dibangun pasar-pasar untuk keperluan sehari-hari sehingga penduduk dapat lebih tersebar (3) kekurangan perumahan secara berangsur-angsur diatasi dengan membangun perumahan lewat kredit Bank Tabungan Negara (BTN) dengan lokasi di Desa Monang-Maning, yang dilaksanakan oleh Perumnas dengan luas tanah sebanyak 50 ha, lengkap dengan segala fasilitasnya. Di samping itu telah pula diprogramkan perbaikan kampung untuk desa-desa di Kota Denpasar dan untuk tahap permulaan telah diadakan perbaikan kampung di Desa Sanur di atas areal 30 ha. Juga telah diadakan penjajagan di dalam menata tanah sesuai dengan cara *urban land consolidation*. Untuk tahap pertama *land consolidation* diterapkan di daerah *Civic Centre Renon*; (4) berhubung lapangan Puputan Badung akan dijadikan taman di tengah-tengah Kota Denpasar, maka sebagai pengganti dan penambahan fasilitas olahraga, telah diusahakan penyelesaian lapangan olah raga Puputan Margarana, lapangan olahraga *civic centre* di Kabupaten Badung yaitu di Lumintang (CCK Lumintang) dengan "mantilan" serba guna, penyempurnaan Lila Ulangun Oengan untuk olahraga renang. Di samping itu dibangun pula lapangan olahraga di Denpasar Barat dan Denpasar Timur; (5) agar pembangunan Kota Denpasar dapat berjalan sesuai de-

ngan *master plan*, maka usaha-usaha yang segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung adalah mengadakan revisi terhadap *master plan*, memperkenalkan *urban land consolidation*, memperbaiki beberapa peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi seperti perda kebersihan, perda tentang jalur hijau, dan perda tentang pasar; (6) untuk mengatasi masalah wanita tuna susila (wts), telah dilakukan usaha dengan cara mengadakan operasi penertiban secara kontinyu dan kemudian mengembalikan mereka ke daerah asalnya.¹

Kegiatan sosial politik di Bali, yang terutama berpusat di Kota Denpasar, baru terjadi setelah adanya pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949. Partai-partai politik yang ada di Jawa menyebarluaskan organisasinya ke Bali. Partai-partai tersebut adalah PNI, Masyumi, Gabungan Buruh Indonesia, Persatuan Wanita Indonesia, dan Golongan Tani. Di samping itu muncul pula organisasi lokal seperti Kesatuan Pemuda Nasional Indonesia (KPNI) dan IRMI (Ikatan Rakyat Murba Indonesia). Setelah Panitia Pemilihan Umum pusat dibentuk pada tanggal 31 Mei 1954 dan diumumkan bahwa pemilihan umum untuk parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1955 dan untuk Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Dengan adanya pengumuman itu kampanye yang diadakan oleh partai di Bali semakin meningkat. Pengurus Daerah partai-partai tersebut semuanya berkedudukan di Kota Denpasar. Partai-partai tersebut adalah PNI, Masyumi, NU, PRI, PSI, PIR, PRN, PRI, Partai Buruh, Partai Katolik, Parkindo, PSII, Perti, Baperki, Parindra dan Biro Pancasila. Dengan bermacam-macam cara mereka berusaha mendapatkan pemilih yang sebesar-besarnya atau simpati dari publik dengan memakai semua kemungkinan pendekatan dan hubungan, termasuk kedua hubungan baik yang bersifat tradisional maupun modern seperti *gusti-panjak*, *siwa/surya - sista*, *mekel - roang*, bapak - anak buah atau pengikut. Pendekatan juga dilakukan melalui sistem organisasi sosial tradisional seperti *banjar*, *desa*, *dadia*, dan *sekeha*. Dari hasil pemilihan umum tanggal 29 September 1955 dan 15 Desember 1955

yang keluar sebagai pemenang adalah PNI dan PSI (lihat lampiran 2 dan 3). Mengenai perimbangan suara khusus untuk Kecamatan Denpasar hingga kini penulis belum ketemukan datanya dan rupanya pada waktu itu belum ada sistem pengarsipan yang memadai, sehingga sumber-sumber sangat sulit untuk diketemukan. Yang jelas bahwa untuk Kabupaten Badung, keluar sebagai pemenang adalah PSI? ²

Setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkanlah Penpres No. 7 tahun 1959 yang mengatur tentang dapat atau tidaknya sesuatu parpol diakui eksistensinya dalam Negara Republik Indonesia. Dalam Penpres tersebut disebutkan ketentuan-ketentuan mewajibkan parpol mencantumkan dalam programnya "tidak bertentangan dengan azas dan tujuan negara, menerima Pancasila dan UUD 1945, menghukum partai-partai yang terlibat dalam pemberontakan. Sehubungan dengan Penpres No. 7 tahun 1959, maka pada tahun 1960 Masyumi dan PSI dibubarkan. Dengan dibubarkannya kedua partai tersebut kekuatan atau persaingan yang kemudian timbul dalam bidang politik di Bali antara partai PNI dan PKI. Kegiatan propaganda dari PKI makin hari makin meningkat melalui kader-kadernya dan media cetak seperti buku-buku dan surat kabar. Mereka tidak tanggung-tanggung menyerang partai lain dalam propagandanya misalnya dengan menyatakan antek-antek imperialis, antek-antek feodal, setan desa, kapitalis birokrat dan sebagainya. Mereka melakukan aksi-aksi sepihak yang mengakibatkan terjadinya konflik terus menerus di masyarakat terutama antara PNI dan PKI. Dengan meletusnya peristiwa G 30 S/PKI, PKI dilarang di Indonesia sesuai dengan tuntutan Tritura.

Menjelang pemilihan pertama dalam masa Orde Baru muncul kekuatan baru di Bali yaitu Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) dengan pengurus daerahnya berkedudukan di Kota Denpasar. Organisasi yang termasuk dalam Sekber Golkar di antaranya adalah Soksi, MKGR, Kosgoro dan lain-lain. Dalam pemilihan umum tahun 1971 ternyata Golkar telah keluar sebagai pemenang di Bali (lebih jauh lihat lampiran 4).

Kontestan lainnya adalah partai Katholik, PSII, NU, Parmusi, Parkindo, Murba, PNI, Perti, dan IPKI. Demikian pula dalam pemilihan umum tahun 1977, yang diikuti tiga kontestan yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), maka Golkar telah keluar sebagai pemenang di Bali (lihat lampiran 5).

4.2 *Kehidupan Perekonomian*

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda Kota Denpasar bukan saja menjadi pusat pemerintahan untuk Pulau Bali, akan tetapi juga dijadikan pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata. Hal ini terbukti dari usaha-usaha yang mereka lakukan semenjak Pulau Bali dikuasainya. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Denpasar adalah (1) membuat jalan-jalan raya di sekitar Kota Denpasar untuk menghubungkan satu desa dengan desa lainnya yaitu Kesiman – Dangin Puri, Dauh Puri – Pemecutan – Padangsambian, jalan raya Denpasar – Sanur, Denpasar – Kuta, dan Denpasar – Ubung. Jalan-jalan tersebut lama kelamaan diaspal dengan lebarnya lebih-kurang 4 – 5 m.²³

Sebelum Belanda berkuasa di Bali, Pantai Kuta merupakan pelabuhan Kerajaan Badung. Ramainya Pelabuhan Kuta disebabkan oleh adanya hubungan dagang antara Mataram dengan Batavia melalui Pelabuhan Kuta. Kegiatan perdagangan di Kuta menjadi ramai berkat usaha John Mads Lange, seorang pedagang yang berkebangsaan Denmark. Ia membuka kantor dagang di Kuta atas izin raja Badung. Barang-barang yang diperdagangkan di Pelabuhan Kuta antara lain beras, minyak kelapa, kopra, dan lain-lainnya. Di samping itu juga ramai diadakan perdagangan budak, karena budak sangat diperlukan oleh Belanda untuk dipakai serdadu dalam perang kolonialnya di Jawa. Mereka yang dijadikan budak adalah orang-orang yang tidak sanggup membayar pajak atau orang-orang hukuman. Perdagangan budak adalah monopoli raja Badung, akan tetapi sering pula dilaksanakan secara gelap/selundupan oleh pedagang-pedagang Bugis

yang bermukim di Pulau Serangan. Setelah Belanda menguasai Kerajaan Buleleng pada tahun 1849, peran Kuta sebagai pelabuhan mulai mundur karena Belanda mengembangkan Pelabuhan Pabean Buleleng. Pemerintah Kolonial Belanda kemudian mengembangkan Kuta sebagai obyek wisata, dengan cara mendirikan sebuah hotel yang bernama Swara Segara milik Ktut Tantri, seorang wartawan berkebangsaan Amerika?⁴

Pada tahun 1907 lokasi pasar Kerajaan Badung yang pada mulanya bertempat di kantor walikota (sekarang di Jalan Gajah Mada) dipindahkan agak ke barat (di lokasi Pasar Badung sekarang). Pada mulanya lokasi Pasar Badung adalah tempat kediaman orang-orang Jawa dan Madura. Karena tempat tersebut dipakai lokasi pasar, maka orang-orang Jawa dan Madura dialihkan lokasinya ke arah utara yaitu di Kampung Wonosari (Kampung Jawa sekarang). Oleh Pemerintah Kolonial Belanda di dalam lokasi Pasar Badung dibangun los-los pasar untuk para pedagang, sedangkan tempat-tempat di sekitar Pasar Badung yaitu di Jalan Gajah Mada dan Sulawesi sekarang bermukim pedagang-pedagang Cina, India dan Arab yang mata pencaharian utamanya adalah berdagang dan dengan cara membuka toko sebagai tempat untuk berjualan. Barang-barang yang diperdagangkannya adalah candu, tembakau, barang-barang perhiasan, dan barang-barang klontong lainnya. Usaha Pemerintah Kolonial Belanda lainnya adalah memodernisasi Pelabuhan Benoa pada tahun 1908, memajukan usaha pariwisata mulai tahun 1920, mendorong berdirinya pabrik-pabrik di Kota Denpasar seperti pabrik minyak kelapa, penggilingan beras, dan es. Pelabuhan Benoa dijadikan pelabuhan ekspor dan impor. Barang-barang yang diekspor dari Pelabuhan Benoa waktu itu adalah ternak sapi dan babi. Untuk mendukung perkembangan pariwisata di Bali, di Kota Denpasar dibangun Bali Hotel, Museum Bali, dan dibuka pula Lapangan Tuban pada tahun 1933.²⁵

Semenjak Jepang berkuasa di Bali tanggal 19 Februari 1942, Kota Denpasar dijadikan pusat pemerintahan, perekonomian, dan pertahanan untuk daerah Bali. Perusahaan-perusa-

haan yang didirikan oleh pengusaha-pengusaha Jepang di Kota Denpasar adalah *Mitsui Busan Kaisha* (badan pengumpulan padi dan penggilingannya), *Mitsui Norin* (pengumpulan kapas dengan pemintalannya), *Goshio* (pembuatan karung goni), *Taiwan Chikusan* (pemotongan ternak, pengawetan daging dan penyamakan kulit). Semua produksinya diarahkan untuk kepentingan logistik perangnya, guna mendukung kemenangan perang *dai toa*-nya. Di Kota Denpasar dibuka pula pertokoan *Hei Kiju Kumini* (toko serba guna) untuk melayani kepentingan orang-orang Jepang. Karena semua produksi diarahkan untuk mendukung kemenangan perang Jepang, akibatnya kehidupan rakyat sangat melarat, serba dalam kekurangan, seolah-olah hampir telanjang, karena tidak tersedianya bahan-bahan pakaian. Suasana masyarakatpun dalam keadaan ketakutan akibat tindakan yang sangat kejam dari *kempetai* (polisi rahasia Jepang) yang terkenal di Kota Denpasar dengan *kempetai kawasima*.²⁶ Setelah Jepang menyerah kepada Serikat, keadaan ekonomi mengalami kekalutan karena uang Jepang tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran sehingga masyarakat merasa sangat dirugikan.

Setelah Proklamasi, Kota Denpasar lebih banyak dijadikan pusat kegiatan menyambut Proklamasi oleh pihak pemuda. Dengan kedatangan tentara Belanda (Gajah Merah) tanggal 2 Maret 1946, suasana di Bali menjadi tidak aman karena di mana-mana terjadi pertempuran antara pihak pemuda melawan tentara Gajah Merah atau lebih populer dengan sebutan masyarakat serdadu NICA (*Netherland Indies Civil Administration*). Pihak Belanda kemudian berusaha mengembalikan situasi Kota Denpasar sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan perekonomian. Bidang perekonomian masih tetap dikuasai oleh pengusaha-pengusaha asing (Belanda, Cina, Arab), yang mempunyai *skill*, organisasi, dan pengalaman yang lebih banyak. Keadaan yang pincang ini mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha nasional di Kota Denpasar seperti Perserikatan Dagang Indonesia (Perdi tahun 1947) pada tahun 1955 dilebur menjadi Dewan

Ekonomi Indonesia (DEI), NV Gabungan Ekspor Hewan Indonesia (GEHI) Trading Coy tahun 1948, NV Gabungan Impor Ekspor Bali (GIEB tahun 1948), dan NV Perserikatan Tenu Indonesia (PERTI tahun 1949).²⁷

Setelah pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949, lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan nasional yang lahir di Kota Denpasar, seperti Pusat Penjualan Gula Indonesia (1950), NV Bank Pernaigaan Umum (1952), NV Bali Veem (1955) dan NV Ikatan Eksportir Babi Indonesia (1958). Dalam rangka mendorong pertumbuhan usaha nasional ini, Pemerintah Daerah Bali memberikan bantuan/fasilitas sepenuhnya seperti: izin, permodalan, bimbingan dan sebagainya. Kerjasama antara pemerintah dan pengusaha swasta sangat erat untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.²⁸

Pemerintah Daerah Bali menyadari sepenuhnya bahwa untuk mengembangkan industri berat tidak mungkin karena tidak mempunyai sumber-sumber bahan mineral seperti bijih besi. Kemungkinan yang bisa dikembangkan di Bali adalah industri ringan, sektor jasa, dan kerajinan tangan untuk mendukung pengembangan pariwisata di Bali. Pengembangan pariwisata sangat dimungkinkan, karena Pulau Bali mempunyai situasi dan kondisi yang memungkinkan seperti keadaan alam, keramah-tamahan penduduknya, adat-istiadat yang unik, dan mutu kesenian yang tinggi baik seni tari, seni lukis, maupun seni pahatnya bahkan hal ini sudah dirintis sebelumnya oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Bali²⁹

Agar supaya pengembangan pembangunan Daerah Bali terlaksana dengan baik, demikian pula pengembangan Kota Denpasar, pada tahun 1966 disusunlah rencana regional Bali, sedangkan pada tahun 1972 telah disahkan Rencana Induk Kota Denpasar oleh DPRD Kabupaten Badung. Rencana induk yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kota Denpasar meliputi bidang prasarana jalan, tempat parkir, pasar, kawasan industri, pusat-pusat pariwisata (*resort tourist*), pertokoan atau pusat perbelanjaan, perhotelan dan lain-lain.

Seluruh desa yang ada di Kotif Denpasar sudah dapat dicapai oleh kendaraan beroda empat, kecuali Desa Serangan yang merupakan sebuah pulau. Yang berbeda dari masing-masing desa adalah kepadatan jalan dan kualitas jalannya. Desa yang terpadat jalannya adalah Desa Dauh Puri yaitu 70,4 m per hektar. Desa-desa Dangin Puri, Sumerta, dan Sanur kepadatan jalannya antara 30 - 40 m per ha. Desa yang paling rendah kepadatan jalannya adalah Desa Serangan dan Renon yaitu 10 m per ha. Desa-desa lainnya sekitar 10 m per ha. Ternyata pola kepadatan jalan raya, sesuai dengan kepadatan penduduk, kecuali Desa Panjer dan Desa Pemecutan.³⁰

Kualitas jalan di Kotif Denpasar dapat digolongkan pada satu jalur, dua jalur atau lebih dari dua jalur jalan. Jalan-jalan ke luar kota semuanya termasuk lebih dari dua jalur.

Sarana angkutan untuk Kotif Denpasar pada umumnya menggunakan kendaraan beroda tiga dan empat. Ada juga roda dua yang disebut ojek yang pada umumnya beroperasi di daerah yang belum ada *route* bemo seperti di Jalan Puputan. Untuk angkutan wisatawan baik dalam kota maupun ke luar kota dipergunakan taksi.

Jumlah kendaraan yang digunakan untuk angkutan ke luar kota dan terutama kota-kota di Jawa seperti Surabaya, Malang, Jember, Yogyakarta, dan Jakarta jumlahnya cukup besar (lihat tabel 1)

Tabel 1
JUMLAH BIS DAN TRAYEK ANGKUTAN LUAR
KOTA DI KOTIF DENPASAR TAHUN 1979

No	Trayek	Perusahaan	Jumlah	
			Bis	Rit
1	Denpasar - Surabaya	8	34	34
2.	Padangbai - Surabaya	2	6	6
3	Denpasar - Yogyakarta	4	8	8
4	Denpasar - Banyuwangi	1	11	22
5	Denpasar - Malang	4	8	8
	Jumlah	19	67	78

Dari tabel di atas ternyata arus lalu-lintas yang terpadat adalah Denpasar - Surabaya, dan setelah itu baru Denpasar - Banyuwangi dan Denpasar - Malang.³¹

Kecelakaan lalu-lintas di Kotif Denpasar cukup tinggi, rata-rata tiap hari paling sedikit empat kecelakaan. Jumlah yang mati akibat kecelakaan rata-rata 78 orang per tahun. Menurut data tahun 1979, jalan yang paling tinggi angka kecelakaannya adalah jalan jurusan Tabanan yaitu sebanyak 141 kejadian dengan 17 orang meninggal dunia per tahun. Jalan ke Sanur sebanyak 127 kecelakaan dengan 8 orang meninggal per tahun. Kecelakaan di Jalan Diponegoro sebanyak 125 kejadian dengan 5 orang meninggal dunia per tahun. Dengan melihat segi kepadatan lalu-lintas, ternyata bahwa pola penyebaran kecelakaan lalu-lintas ada hubungannya dengan pola kepadatan lalu lintasnya.³²

Bermacam-macam cara telah dilakukan untuk mengatasi kecelakaan lalu-lintas seperti ceramah-ceramah lalu-lintas ke sekolah-sekolah, ceramah-ceramah untuk sopir-sopir, membuat rambu-rambu jalan, melakukan pengawasan setiap hari dari pihak kepolisian, razia kendaraan. Dan setiap saat diadakan perubahan jalur lalu lintas untuk mengurangi kecelakaan serta pementasan drama melalui TVRI dengan topik tentang kecelakaan lalu lintas. Dari 154 kasus kecelakaan lalu-lintas yang pernah diotopsi, hampir 70% (109 kasus) dari semua kematian adalah laki-laki dan sisanya 30% (45 kasus) adalah kaum wanita dan 64% (98 kasus) kematian disebabkan oleh cedera pada bagian kepala dan 36% (54 kasus) karena cedera pada organ-organ dada, perut, dan arogenetal.³³

Yang menjadi masalah utama dalam mengatur lalu-lintas di Kotif Denpasar adalah (1) makin bertambahnya jumlah kendaraan yang masuk kota Denpasar setiap hari (2) sulitnya memperlebar jalan-jalan yang sudah ada sekarang, sedangkan lebar jalan tersebut tidak mampu menampung arus lalu lintas (3) sulitnya membuat jalan-jalan baru, karena harga tanah di dalam

kota terlalu tinggi. Kendaraan yang paling banyak terkait pada kecelakaan lalu-lintas adalah sepeda motor 44% (89 buah), kendaraan roda tiga dan empat 33% (67 buah). Lampu lalu-lintas yang ada di Kotif Denpasar seluruhnya berjumlah 17 buah. Masih banyak persimpangan jalan yang belum mempunyai lampu lalu-lintas.³⁴

Terminal bus luar kota untuk jurusan arah ke barat dan utara yaitu ke Gilimanuk, Jawa dan Singaraja hanya ada satu buah yaitu di terminal Ubung, Denpasar Barat. Terminal itu merupakan terminal bus yang terbesar di Kotif, Denpasar. Terminal Ubung juga dipergunakan untuk terminal angkutan dalam kota kendaraan roda tiga dan empat untuk jurusan Tegal, Kreneng, Gajah Mada, Sanglah, Kesiman. Terminal lainnya yang ada di Kota Denpasar adalah Terminal Kreneng untuk kendaraan ke luar kota untuk menuju jurusan arah ke timur yaitu Gianyar, Bangli, Kintamani, Klungkung, Padangbai, Karangasem. Terminal ini juga dipergunakan untuk kendaraan roda tiga dan roda empat untuk menuju jurusan Sanur, Sanglah, Gajah Mada dan Tegal. Untuk jurusan ke selatan ada dua terminal yaitu Terminal Suci dan Terminal Tegal. Terminal Suci untuk jurusan Sesetan, Pegok, Sanggaran dan Benoa sedangkan Terminal Tegal untuk jurusan Kuta, Tuban, Pecatu, Nusa Dua, dan Uluwatu. Tempat-tempat lainnya sebagai tempat berkumpulnya kendaraan angkutan kota di luar terminal khusus di atas adalah di Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin, dan Jalan Puduk. Terminal untuk taksi adalah Terminal Suci, sedangkan tempat parkir di Pasar Badung terletak di muka Pasar Badung, dan tempat parkir untuk arah utara (ke luar kota) seperti Peguyangan, Mambal, Sangeh, Carangsari, Petang, Plaga (Badung Utara) di Wongaya.³⁵

Semua kendaraan diwajibkan parkir di terminal dan untuk menuju kota dipergunakan kendaraan roda tiga dan empat, dan ada pula dengan ojek untuk daerah-daerah yang tidak dilalui *route* bemo. Setiap kendaraan yang masuk terminal dikenai pungutan (retribusi), yang merupakan peng-

hasilan yang cukup besar bagi Pemerintah Kabupaten Badung. Tempat-tempat parkir untuk kendaraan roda dua tersebar di mana-mana di dalam kota seperti di depan pasar, di muka-muka toko, di muka gedung bioskop sehingga sering mengakibatkan jalan yang sudah sempit menjadi bertambah sempit lagi. Di sini juga dipungut bayaran untuk pemasukan kas Pemerintah Kabupaten Badung.

Satu-satunya angkutan laut yang melayani kebutuhan Kotif Denpasar adalah melalui Pelabuhan Benoa. Pelabuhan Benoa terletak di ujung selatan Kota Denpasar (7 km) dan terletak di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, termasuk Kelurahan Benoa. Pelabuhan Benoa mempunyai arti penting bagi Kota Denpasar maupun Pulau Bali, sebab Pelabuhan Benoa merupakan pintu keluar masuk barang-barang kebutuhan masyarakat. Dari tabel di bawah ini dapat dilihat jumlah barang keluar-masuk di Pelabuhan Benoa.³⁶

**Tabel i PERKEMBANGAN BARANG KELUAR MASUK
DI PELABUHAN BENOA DALAM TON**

No	Jenis	M/K	1979	1980	1981
1	Beras	M	67.939	98.741	120.000
2	Pupuk	M	36.703	32.835	40.000
3	Semen	M	59.300	56.296	72.000
4	Aspal	M	3.860	15.628	20.520
5	Kayu	M	14.361	18.961	21.500
6	Terigu	M	2.270	4.420	6.000
7	lain-lain	M/K	5.881	5.971	2.500
Jumlah			190.314	232.852	282.510

Pelabuhan Benoa juga merupakan pintu masuk wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. Wisatawan asing yang berkunjung

ke Bali dapat juga dengan angkutan udara. Mereka mendarat di Lapangan Terbang Ngurah Rai (sebelumnya bernama Lapangan Udara Tuban). Pelabuhan Udara arealnya tidak termasuk Kotif Denpasar, melainkan termasuk Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Jarak dari lapangan terbang ke Kota Denpasar adalah 13 km. Angkutan menuju Kota Denpasar pada umumnya mempergunakan taksi. Pelabuhan Udara Ngurah Rai juga merupakan pintu keluar masuk barang-barang untuk Propinsi Bali. Jumlah pesawat terbang yang datang ke Bali dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.³⁷

Tabel 3
PERKEMBANGAN JUMLAH PESAWAT TERBANG YANG
DATANG KE BALI SELAMA 8 TAHUN

No.	Tahun	Domestik	Internasional
1	1973	3982	1172
2.	1974	4517	1195
3	1975	4150	2933
4	1976	5185	2543
5	1977	7544	1025
6	1978	8883	965
7	1979	8955	951
8	1980	8781	770

Dari tabel di atas jelas nampak bahwa penerbangan domestik setiap tahun terus meningkat, akan tetapi penerbangan internasional terus menurun sejak tahun 1977. Meskipun demikian jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Bali setiap tahun terus menunjukkan peningkatan.

Pusat pusat pertokoan di Kotif Denpasar terletak di sekitar pasar seperti Pasar Badung, Pasar Kamboja, Pasar Sanglah, dan Pasar Satria. Toko-toko juga dibangun mengikuti jalan protokol seperti Jalan Gajah Mada, Jalan Kartini, Jalan Pattimura, Jalan Veteran, Jalan Melati, Jalan Sulawesi, Jalan Hasanuddin,

Jalan Diponegoro, Jalan Imam Bonjol dan Jalan Supratman dengan pusat perbelanjaan di Lokita Sari, Kumba Sari, dan Pasar Kamboja. Bermacam-macam jenis barang dan makanan yang diperjualbelikan di toko-toko dan di pusat-pusat perbelanjaan seperti kain-kain, barang pecah-belah, bahan-bahan bangunan, mainan anak-anak, buah-buahan, roti dan lain-lain. Barang-barang tersebut didatangkan dari seluruh Bali seperti sayur-sayuran dan bunga-bunga dari Bedugul dan Kintamani, buah-buahan jeruk dari Buleleng, salak dari Karangasem, pisang dari Petang, Negara dan Marga, beras dari daerah Tabanan, Singaraja dan Gianyar. Barang-barang jadi seperti kain-kain, bahan-bahan bangunan seperti semen, besi didatangkan dari Jawa terutama dari Surabaya dan Jakarta, sedangkan kayu didatangkan dari Kalimantan. Barang-barang tersebut diangkut dengan truk menuju Denpasar dan ada pula yang melalui Pelabuhan Benoa dan Celukan Bawang.³⁸

Pasar cukup banyak ada di Kotif Denpasar. Pasar yang ada di Kotif Denpasar adalah Pasar Badung, Pasar Kreneng, Pasar Kumba Sari, Pasar Senggol Kumba Sari, Pasar Lokita Sari, Pasar Pemecutan, Pasar Gunung Agung, Pasar Sanglah, Pasar Senggol Sanglah, Pasar Satria, Pasar Inpres Ubung, Pasar Inpres Ketapian, Pasar Tenten Kota, Pasar Senggol Suci, dan Pasar Abian Timbul. Mengenai daya tampung dari pasar-pasar tersebut dapat dilihat dalam lampiran 6. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan di pasar-pasar tersebut adalah pakaian, sayur-sayuran, buah-buahan, alat-alat listrik, barang-klontong, beras dan lain-lain. Pasar yang paling banyak mendatangkan retribusi bagi Pemerintah Kabupaten Badung adalah Pasar Kumba Sari, Pasar Badung dan Pasar Kreneng. Bangunan Pasar Badung, Pasar Kreneng, dan Pasar Satria sudah direhabilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Badung dengan bantuan dana Inpres. Pasar Kreneng dibuat bertingkat sehingga dapat menampung kebutuhan para pedagang untuk tempat berjualan, demikian pula tempat parkir untuk menaikkan dan menurunkan barang-barang dapat diatasi.³⁹

Selain toko dan pasar yang telah diuraikan di atas, masih ada lagi toko seni dan pasar seni, yang khusus menjual barang-barang kesenian. Lokasinya adalah di Kumba Sari dan di Desa Sanur. Di samping itu muncul pula pasar loak yaitu tempat menjual barang-barang bekas seperti pakaian, sepeda, yang mengambil lokasi di sekitar Pasar Kreneng, demikian pula pasar burung di sekitar Puri Satria.

Menurut Rencana Induk Kotif Denpasar, lokasi industri berada di sekitar Ubung dan Pedungan. Industri yang berlokasi di Ubung adalah industri-industri yang hasilnya terutama akan dipasarkan di Jawa, sedangkan industri-industri yang dipusatkan di Pedungan adalah industri-industri yang produksinya akan diekspor melalui Pelabuhan Benoa. Di kedua lokasi tersebut disediakan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk pengembangan industri seperti jalan, air, tanah, listrik dan tidak mengganggu lingkungan perumahan penduduk.

Industri-industri yang telah ada di Kotif Denpasar menyebar di sepanjang jalan utama. Selain itu ada juga industri yang letaknya bercampur dengan perumahan rakyat seperti industri ringan, industri rakyat. Pola penyebaran industri masih belum begitu padat. Jumlah dan jenis industri yang ada di Kotif Denpasar dapat dilihat dalam lampiran 7a, b, dan c.

Untuk mendorong perkembangan ekonomi di Bali dan khususnya di Kotif Denpasar, dan untuk meningkatkan hasrat masyarakat untuk menabung, demikian pula untuk menyimpan uangnya supaya lebih aman, di Kotif Denpasar banyak didirikan bank-bank, baik bank pemerintah maupun milik swasta. Di antara bank-bank tersebut adalah Bank Indonesia, BNI 46, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, Bapindo, Bank Pembangunan Daerah dan lain-lain. Bank-bank swasta yang ada di Kotif Denpasar adalah Bank Dagang Bali, Bank Perniagaan Umum, Overseas Bank, Bank Antar Daerah dan lain-lain. Demikian pula sejumlah bank pasar yaitu Bank Pasar Kamboja, Bank Patas Semeton, Bank Sari Partha, Bank Sinar Hara-

pan, Bank Sinar Menara, Bank Pelita Kencana. Di samping itu di Kotif Denpasar ada juga *Money Exchange* yang secara khusus melayani penukaran valuta asing sehingga memudahkan para wisatawan untuk menukarkan mata uangnya.

Para pedagang kaki lima atau sektor informal telah ditangani dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Badung bersama walikota Denpasar. Mereka diberikan tempat di Kumbasari, Sanglah, dan di Pasar Kamboja, sedangkan untuk pedagang acung terus menerus dilakukan penertiban sehingga tidak mengganggu wisatawan yang menginap di hotel-hotel. Pedagang-pedagang kaki lima yang seluruhnya berasal dari Bali kemudian menetap di Kota Denpasar. Jenis-jenis barang yang diperdagangkannya ialah kain, barang-barang kelontong, buku, mainan, kaca mata, sepatu, buah-buahan, nasi campur, es, sate, jajan, sayur mayur dan lain-lain.

Fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah dalam bidang ekonomi adalah listrik dan air minum. Hingga tahun 1981 lebih kurang 19,2% dari seluruh luas Kotif Denpasar sudah mendapat pelayanan listrik, kecuali Desa Serangan yang hingga kini belum mendapatkan fasilitas listrik. Pola penyebaran fasilitas listrik sejalan dengan pola jaringan jalan. Daerah-daerah yang penduduknya relatif padat sebagian besar sudah mendapatkan fasilitas listrik. Pembangkit tenaga listrik yang telah ada di Kotif Denpasar sebanyak empat buah terletak di Desa Pedungan (Denpasar Selatan). Pembangkit tenaga listrik tersebut bukan saja melayani Kotif Denpasar, akan tetapi juga beberapa kabupaten lainnya di Bali. Konsumsi listrik di Kotif Denpasar dipergunakan untuk kepentingan rumah tangga (89,88%), sedangkan yang lain adalah untuk usaha, hotel, industri, kantor, jalan. Jumlah perusahaan instalator yang ada di Kotif Denpasar adalah 37 buah.⁴⁰

Daerah yang mendapat fasilitas air minum di Kotif Denpasar seluas 1768 ha atau 14% dari luas Kotif Denpasar. Desa-desa yang sudah mendapat fasilitas air minum adalah Desa Dauh Puri, Daging Puri, Pemecutan, Tonja, dan Panjer (60 - 90%

dari luas urban di desa masing-masing). Desa yang belum mendapat fasilitas air minum adalah Desa Padang Sambian, dan Serangan, sedangkan Desa Penatih baru mendapat fasilitas air minum 1,27% dari luas urban di desa tersebut. Pola penyebaran air minum hampir sama dengan pola penyebaran fasilitas listrik yaitu mengikuti pola jalan. Perbedaannya adalah bahwa luas jangkauan penyebaran fasilitas listrik lebih luas daripada jangkauan air minum. Daerah yang jauh dari kota masih sulit dijangkau oleh Perusahaan Air Minum. Perusahaan air minum di Kotif Denpasar adalah Perusahaan Daerah Air Minum Dati II Badung. Bagi desa-desa yang belum terjangkau oleh Perusahaan Air Minum, rakyat memperoleh kebutuhan air minum dengan cara membuat sumur, mencari air di sungai atau membuat sumur pompa. Kesulitan untuk menyediakan fasilitas air minum adalah kurangnya dana untuk menyediakan sarana berupa pipa induk dan pipa cabang dalam jumlah yang cukup besar, mengingat jauhnya lokasi pemukiman yang harus dicapai. Perusahaan Air Minum untuk menyediakan air cukup memadai. Tiap tahun kebutuhan air bagi penduduk terus meningkat. Kebutuhan utama adalah untuk kepentingan non-niaga. Kebutuhan lainnya adalah untuk niaga, sosial, kran, dan pelabuhan.

4.3 *Kehidupan Kebudayaan*

Aktivitas kebudayaan yang menonjol di Kotif Denpasar adalah dalam bidang pendidikan, agama, kesenian dan olahraga. Sejak tahun 1907 Pemerintah Kolonial Belanda mulai melaksanakan pendidikan Barat di Kota Denpasar yaitu dengan cara mendirikan beberapa buah Sekolah Kelas II (*Tweede Inlandsche School*) Tujuan pembangunan sekolah ini adalah dalam rangka melaksanakan *Ethische Politic*, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dalam kenyataannya adalah untuk mendapatkan tenaga-tenaga yang tahu membaca dan menulis untuk kelancaran administrasi pemerintahannya, karena tenaga-tenaga tersebut tidak mungkin didatangkan dari Negeri Belanda.

Pada mulanya pendidikan Barat mendapat sambutan dingin dari masyarakat, bahkan merupakan suatu yang menakutkan, karena untuk mendapatkan murid-murid, aparat desa seperti *prebekel* dan *kelian* langsung mendatangi rumah-rumah penduduk. Akan tetapi kemudian perasaan takut anak-anak hilang dan akhirnya banyak anak yang bersedia bersekolah. Karena guru-gurunya didatangkan dari Jawa, akhirnya Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan *Normaal Cursus* di Denpasar untuk mencetak tenaga-tenaga guru sekolah desa di Bali. Karena tenaga guru sudah memadai, maka perkembangan pendidikan di Bali khususnya di Kota Denpasar sangat pesat. Pada tahun 1918 di Denpasar berdiri Sekolah Bumi Putra Belanda yaitu HIS (*Holland Inlandsche School*) dengan bertempat di SMP Negeri I Denpasar yang sekarang (Jalan Surapati Denpasar). Sekolah Bumi Putra Belanda ini pada umumnya disediakan untuk anak-anak dari golongan bangsawan, tokoh-tokoh terkemuka dan para pegawai negeri. Anak-anak yang telah menamatkan pelajarannya di HIS banyak pula yang melanjutkan pelajarannya ke Jawa seperti MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) dan AMS (*Algemene Middeltare School*).^{4 1}

Di samping pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, kaum pergerakan juga mendirikan sekolah-sekolah kebangsaan seperti Taman Siswa dan Taman Dewasa di Kota Denpasar. Taman Siswa didirikan pada tahun 1933 oleh sebuah badan yang bernama Komite Taman Siswa dan di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Pemecutan, I Nyoman Pegeg, dan I Ketut Ceteg. Tempat belajarnya di belakang Bali Hotel sekarang. Taman Siswa kemudian meluaskan cabang-cabangnya di Bali yaitu Tejakula, Negara dan Karangasem. Untuk menampung hasrat para siswa yang telah menamatkan pelajarannya di Taman Siswa (kelas tujuh), akhirnya dari pihak Komite Taman Siswa membuka sekolah lanjutan dari Taman Siswa yaitu Taman Dewasa dengan tempat belajar di Gemeh, Denpasar.^{4 2}

Setelah pendudukan Jepang di Bali (tahun 1942), sistem persekolahan mengalami perubahan, karena sistem penggolongan baik menurut bangsa maupun menurut status sosial dihapus. Hal ini rupanya dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan. Semua sekolah yang sejenis diintegrasikan dan bahasa Indonesia mulai dipakai di sekolah, sedangkan bahasa Jepang merupakan bahasa yang kedua. Pemakaian bahasa Belanda dilarang. Sekolah-sekolah swasta dibubarkan. Sekolah Dasar yang ada pada waktu itu disebut Sekolah Rakyat dan terbuka bagi semua penduduk dan lama belajar adalah enam tahun. Sekolah Menengah yang ada di Kota Denpasar pada waktu itu adalah Sekolah Pertanian, Sekolah Pertukangan dan Sekolah Guru (*Kyoing Yusesso*). Rupanya sekolah-sekolah kejuruan lebih mendapat prioritas, karena ada kaitannya dengan usaha Jepang untuk meningkatkan produksi demi untuk mendukung kemenangan perang *dai toa*-nya.^{4 3}

Tujuan pendidikan pada zaman Jepang adalah untuk menghasilkan atau menyediakan tenaga-tenaga buruh kasar secara cuma-cuma dan prajurit-prajurit tangguh untuk kemenangan perangnya. Karena itu para pelajar diwajibkan mengikuti latihan fisik seperti senam pagi (*taiso*), latihan kemiliteran dan indoktrinasi yang sangat ketat.^{4 4}

Di tengah-tengah Revolusi Fisik di Bali, pada tanggal 8 Desember 1946 di Denpasar lahir Perguruan Rakyat Saraswati dengan tujuan mewujudkan Indonesia Merdeka yang adil dan makmur. Sekolah yang didirikan bernama SLO ("Sekolah Landjoet Oemoem"). Sekolah ini dibangun di tengah kebun kelapa dalam sebuah gubuk darurat di Banjar Kaliungu Kelod, Denpasar. Sekolah ini dikelola oleh sebuah Majelis dengan nama Majelis Pendidikan Rakyat yang diketuai oleh I Made Anom.^{4 5}

Setelah pengakuan kedaulatan, anomo masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya sangat besar, akan tetapi kemampuan pemerintah untuk mendirikan sekolah sangat terbatas. Masyarakat mengambil inisiatif sendiri untuk mendirikan

gedung-gedung sekolah dasar, sedangkan pemerintah sekedar memberikan insentif untuk menggairahkan masyarakat untuk membangun. Banyak pula sekolah-sekolah menengah baik menengah pertama maupun menengah atas dan kejuruan didirikan di Kota Denpasar, baik atas inisiatif pemerintah maupun atas inisiatif pihak swasta. Perkembangan pendidikan di Kota Denpasar terus bertambah maju, karena yang melanjutkan pelajaran di Kota Denpasar hampir semua pelajar dari seluruh Bali.

Perguruan tinggi negeri pertama yang ada di Kota Denpasar adalah Fakultas Sastra Cabang Universitas Airlangga yang didirikan pada tahun 1958 dengan dua jurusannya yaitu Jurusan Purbakala dan Sejarah Kebudayaan dan Jurusan Sastra Indonesia. Pada tahun 1962 berdiri Universitas Udayana dengan empat fakultas yaitu Fakultas Sastra, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan dan Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan (FKIP). Semua Fakultas berkedudukan di Kota Denpasar, kecuali FKIP di Singaraja. Dalam perkembangan selanjutnya Universitas Udayana membuka empat buah fakultas lagi yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pertanian.^{4 6}

Dengan dilaksanakannya Inpres Sekolah Dasar mulai tahun 1973, jumlah bangunan sekolah dasar sangat meningkat, sehingga kebutuhan gedung sekolah secara bertahap dapat dipenuhi. Dari survai yang dilakukan pada tahun 1981 tercatat di Kotif Denpasar terdapat 139 buah sekolah dasar dengan ruangan kelas sebanyak 1066 kelas, dan tenaga pengajarnya sebanyak 957 orang.^{4 7}

Perkembangan SMTP, SMTA, sekolah kejuruan dan perguruan tinggi di Kotif Denpasar terus meningkat. Jumlah SMTP dan SMTA yang ada di Kotif Denpasar sampai dengan tahun 1980 dapat dilihat pada tabel terlampir (lampiran 8), sedangkan perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Kotif Denpasar berjumlah 14 buah (lihat lampiran 9).

Lokasi SD, SMTP, SMTA' sekolah kejuruan dan perguruan tinggi menyebar di seluruh Kotif Denpasar, sebab dalam Rencana Induk KOTA Denpasar tahun 1972, tiap-tiap lingkungan dilengkapi dengan fasilitas pendidikan. Khusus untuk lokasi pengembangan perguruan tinggi direncanakan di Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur. Untuk menghindari tanah-tanah produktif/pertanian terus berkurang karena dipakai untuk kepentingan bangunan, Universitas Udayana merencanakan pembangunan kampusnya di Ungasan/Bukit, Kecamatan Kuta, sedangkan kampus untuk perguruan tinggi swasta tetap berlokasi di Penatih.

Jumlah penduduk Kotif Denpasar menurut agama tahun 1980 adalah 261.011 orang dengan perincian 23.712 orang beragama Islam, 3289 orang beragama Katholik, 5969 orang beragama Kristen, 213.528 orang beragama Hindu, dan 5513 orang beragama Budha. Mayoritas penduduk Kotif Denpasar beragama Hindu. Mengenai perkembangan agama Hindu di Bali adalah sebagai berikut. Secara historis agama Hindu di Bali merupakan sinkretisme antara kepercayaan Indonesia (Bali) asli sebagai dasarnya dengan kepercayaan agama Hindu yang masuk di daerah ini. Dari semua kepercayaan dan konsepsi keagamaan tersebut kemudian luluh menjadi satu dan berkembang secara luwes sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan (bahasa Bali: *dasa, kala, patra*).^{4 8}

Pada tahun 1938, berdasarkan *Zelfbestuurregelen 1938* Pulau Bali dibagi menjadi delapan lansekap yang masing-masing dikepalai oleh seorang *Zelfbestuurder* (raja-raja di samping sebagai kepala pemerintahan, juga mengayomi kehidupan beragama). Dengan demikian jikalau terjadi penodaan terhadap agama, raja bertindak aktif, demikian pula raja menyediakan anggaran untuk upacara-upacara yang bersifat keagamaan seperti *pecaruam, aci-aci*, di pura dan sebagainya. Untuk tetap tegak kokohnya adat dan agama, pemerintah kerajaan membuat pengadilan adat dalam dua tingkat yaitu "Raad Distrik" yang di-

ketuai oleh punggawa dan "Raad Kerta" yang diketuai oleh raja, sedangkan para hakim adalah seorang pendeta.^{4 9}

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1950, dibentuklah Provinsi Sunda Kecil dengan ibu kota Singaraja. Pada tahun 1951 di Singaraja dibentuk Kantor Urusan Agama Provinsi Sunda Kecil, sedangkan agama Hindu tidak menjadi lapangan tugasnya. Di Departemen Agama Pusat juga belum ada bagian yang menangani agama Hindu. Agar supaya ada yang membina kehidupan agama Hindu di Bali, maka pada tahun 1955 Pemerintah Daerah Bali membentuk Dinas Agama Otonom Daerah Bali dan di tiap-tiap daerah-bagian/kabupaten sekarang dibentuk Kantor Agama Daerah Bagian. Pada waktu itu Dinas Agama Otonom Daerah Bali belum mendapat pengakuan Departemen Agama, akan tetapi pada tahun 1956 atas usul Pemerintah Daerah Bali, di Departemen Agama RI dibentuk bagian agama Hindu.^{5 0}

Pada tanggal 23 Februari 1959 oleh umat Hindu didirikan Parisada Dharma Hindu Bali dan selanjutnya bernama Parisada Hindu Dharma yang bersifat majelis umat yang menganut agama Hindu, dengan pusat kedudukannya di Kota Denpasar. Umat-umat lainnya juga membentuk lembaga-lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Islam tahun 1974 dan untuk umat Kristen Protestan ada tigabelas lembaga yang berbentuk Gereja dan Yayasan Kristen.^{5 1}

Fasilitas-fasilitas tempat ibadah seperti pura, mesjid dan gereja cukup memadai di Kotif Denpasar. Tempat-tempat ibadah ini dibangun oleh umatnya masing-masing dan kadangkadang mendapat bantuan pula dari pemerintah. Kerukunan antar umat beragama di Kotif Denpasar sangat baik, sehingga setiap umat dapat melaksanakan ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Sekolah-sekolah agama yang ada di Kotif Denpasar antara lain Pendidikan Guru Agama Hindu (PGAH) dengan pendidikan enam tahun, Institut Hindu Dharma (IHD) dan sebuah pesantren.

Menurut Rencana Induk Kota Denpasar, tempat rekreasi akan disebarakan ke seluruh Denpasar dalam lima tempat yaitu satu di utara, satu di tengah, satu di selatan, satu di barat, dan satu lagi di timur. Daerah rekreasi akan berbentuk (1) kebun binatang (2) taman dengan kolam-kolam, kebun bunga, tempat bermain untuk anak-anak, jalan-jalan untuk jalan kaki (3) taman untuk kemah, lengkap dengan fasilitas kamar mandi/WC dan perlistrikan. Lokasi dari tempat rekreasi tersebut adalah (1) kebun binatang di Desa Penatih, (2) taman di Balun, Tanjung, Tagtag, Rangin dan Batannyuh. Rencana tempat rekreasi itu hingga kini belum dapat diwujudkan karena terbatasnya dana yang dimiliki oleh Kotif Denpasar.^{5 2}

Hiburan yang paling dominan untuk penduduk Kotif Denpasar adalah filem. Filem tersebut dipertunjukkan di gedung bioskop *Denpasar Teatre, Nirwana Teatre, Lokita Sari Teatre, Gajah Mada Teatre, Kumba Sari Teatre* dan *Indra Jaya Teatre*. Di balai banjar atau wantilan pun sering dipakai untuk pertunjukan filem dengan bayaran yang lebih rendah. Filem-filem yang diputar pada umumnya filem barat, Mandarin, India dan Indonesia. Hiburan-hiburan lainnya yang sering dipertunjukkan di Kotif Denpasar adalah arja, drama gong, cak, dengan mengambal tempat di wantilan, balai banjar Werdi Budaya dan Tanung Bungkak.

Hiburan-hiburan yang secara cunctinyu ada di Kotif Denpasar untuk melayani para wisatawan yang berkunjung ke Bali adalah tarian kecak di Ayodya Pura Tanjung Bungkak yang pertunjukannya dilaksanakan setiap hari, wayang kulit setiap hari Senin di Puri Pemecutan Denpasar, tarian Legong setiap hari Selasa di Tanjung Bungkak, wayang golek setiap hari Kamis di Puri Pemecutan, dan Sendratari Ramayana setiap hari Sabtu di Tanjung Bungkak. Fasilitas rekreasi yang ada di Kotif Denpasar, adalah gedung bioskop 31 buah, tempat kesenian 40 buah, lapangan sepak bola 32 buah, lapangan olahraga 26 buah, dan tempat hiburan 37 buah.^{5 3}

Dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan Bali, Pemerintah Daerah Bali pada tahun 1966 membentuk Listibya (Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan) Provinsi Bali yang kantor pusatnya berkedudukan di Kota Denpasar. Usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh Lestibya Provinsi Bali adalah menyusun pola-pola dasar pembinaan Kebudayaan Bali yang telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bali, sayembara Sastra Daerah tahun 1971/1972. Workshop Gambuh tahun 1973/1974, menyepsonori terbentuknya Yayasan Pewayangan Daerah Bali, memberikan Patram Budaya kepada *sekehe-sekehe*/perkumpulan-perkumpulan kesenian dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kesenian Bali. Pada tahun 1966 dalam rangka membina seni rupa dan seni tari Bali, maka didirikanlah Sekolah Seni Rupa (SESRI) dan Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) yang berlokasi di Kota Denpasar, dan kemudian berturut-turut dinegerikan pada tahun 1968 dan 1969. Listibya juga bertugas memberikan penilaian dalam rangka memberikan rekomendasi bagi *sekehe-sekehe* kesenian yang akan melakukan pertunjukan ke luar negeri.⁵⁴

Pada tahun 1979 atas inisiatif Gubernur Bali Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, telah mulai dilaksanakan Pesta Kesenian Bali dengan bertempat di Werdi Budaya Abiankapas, Denpasar Timur. Kegiatan Pesta Seni diawali dengan pawai kesenian keliling Kota Denpasar, yang diikuti seluruh kabupaten di Bali. Acara-acara dalam pesta seni adalah lomba seperti busana, pakaian, "mejejahitan", seminar sastra dan budaya, pertunjukan massal seperti sendratari Mahabarata yang dikoordinasi oleh Kantor Gubernur Provinsi Bali, sedangkan para pemainnya adalah mahasiswa ASTI dan SMKI (Sekolah Menengah Kerawitan Indonesia) Denpasar, tarian lepas seperti arja dan topeng, pameran seni lukis, patung dan pakaian, demikian pula promosi barang-barang hasil kerajinan. Usaha ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat Bali.

Fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh pemerintah di Kotif Denpasar adalah rumah sakit, Puskesmas, pemadam ke-

bakaran dan armada kebersihan kota. Sarana kesehatan yang ada di Kotif Denpasar dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.^{5 5}

Tabel 4 SARANA KESEHATAN DI KOTIF DENPASAR

No.	Kecamatan	Balai Pengobatan	Puskesmas	BKIA
1.	Denpasar Barat	8	1	13
2	Denpasar Timur	1	1	4
3	Denpasar Selatan	6	1	4

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas areal kecamatan, maka fasilitas dokter belum seimbang, akan tetapi untuk melayani kebutuhan masyarakat, di Kotif Denpasar ada pula rumah sakit yang cukup besar yaitu Rumah Sakit Umum (RSU) Wongaya, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah, Rumah Sakit Angkatan Darat, dan poliklinik-poliklinik swasta. Banyak pula dokter praktek sore hari, baik dokter umum maupun dokter spesialis, sehingga kebutuhan akan pelayanan kesehatan cukup memadai. Untuk mengetahui lebih terinci tentang jumlah tenaga dokter yang ada di Kabupaten Badung dapat dilihat dalam lampiran 10. Apotik jaga tersebar cukup banyak di Kotif Denpasar. Di antaranya Apotik Sada Karya, Apotik Kresna Karya, Apotik Gajah Mada, Apotik Farma Karya, Apotik Rahayu, Apotik Suli, Apotik Bali Farma, Apotik Kimia Farma, Apotik Setia Kawan, Apotik Sehat dan lain-lain, bahkan Apotik Kimia Farma melayani penduduk selama 24 jam.

Untuk menghindari kerugian penduduk akibat kebakaran, Pemerintah Kabupaten Badung telah menyediakan sarana pemadam kebakaran sebanyak tiga unit dengan personal 67 orang. Pos pemadam kebakaran terletak di Jalan Imam Bonjol. Memperhatikan luas wilayah Kotif Denpasar, ternyata sarana pema-

dam kebakaran masih sangat kurang, sehingga dipandang perlu untuk mengadakan penambahan unit pemadam kebakaran dan peralatannya.⁵⁶

Masalah kebersihan adalah masalah utama bagi Kotif Denpasar, karena Denpasar merupakan jantung pariwisata di Pulau Bali. Oleh karena itu kesan Denpasar sebagai kota pariwisata perlu diwujudkan, sebagai pendukung untuk mewujudkan Bali menjadi pulau taman. Untuk itu walikota Denpasar telah menangani secara khusus dengan cara membentuk Dinas Kebersihan Kota. Dinas Kebersihan Kota telah menyediakan 159 bak sampah untuk Kotif Denpasar. Bak-bak itu dibuat di tempat-tempat yang strategis untuk tiap-tiap lingkungan sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk membuang sampahnya. Mobil kebersihan kota kemudian mengambil sampah tersebut, untuk kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah yaitu sekitar Busung Yeh, Desa Pemecutan, Balun, dan Padang Galak, dengan sistem *land fill* (dibuang begitu saja di permukaan tanah).⁵⁷ Meskipun masalah sampah telah ditangani dengan sebaik-baiknya oleh walikota Denpasar, akan tetapi tidak jarang pula penduduk membuang sampahnya di got yang mengakibatkan pada musim hujan terjadi banjir. Jumlah pekerja yang menangani masalah sampah di Kotif Denpasar lebih jauh dapat dilihat dalam tabel 5.⁵⁸

Tabel 5 JUMLAH DAN JABATAN PEKERJA
KEBERSIHAN KOTA

No.	Jabatan	Jumlah
1	Mandor	12 orang
2	Kepala pekerja	13 orang
3	Pekerja/buruh	254 orang
4	Sopir	17 orang
5	Kernet	10 orang

CATATAN BAB IV

1. Utrecht, E, *Sedjarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok* (Bandung: Sumur Bandung, 1962), hal. 217.
2. Pendit, Nyoman S., *Bali Berjuang* (Jakarta: Gunung Agung, 1979), hal. 70.
3. *Ibid.*
4. Team Penulisan Pusat Sejarah ABRI, *Operasi Lintas Laut dari Banyuwangi ke Bali tahun 1946*, naskah ketikan, Koleksi Disjarahdam XVI Udayana Denpasar, hal. 4.
5. Pendit, Nyoman S., *op. cit.*, hal. 101 – 107.
6. *Ibid.*, hal. 250.
7. Lihat SAM, "Sekeliling Ngurah Rai," dalam *Penerangan Pusat Gerakan Rakjat Indonesia Sunda Kecil 20 November 1947* (Jogjakarta), hal. 7.
8. Pendit, Nyoman S., *op. cit.*, hal. 345 – 346.
9. *Ibid.*, hal. 353 – 354.
10. *Ibid.*, hal. 358 – 359.
11. Reksodihardjo, Sarimin, *Memori Penjerahan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara*, Djilid II, hal. 112.

12. Wardana, Drs. I Gusti Ngurah, "Data dan Permasalahan Kota Denpasar," (makalah yang disajikan dalam loka karya pembangunan kota Denpasar dari tanggal 22 s/d 24 September 1980 di kampus Universitas Udayana Denpasar), hal. 3.
13. Unit Perencanaan Daerah Bali, *Perencanaan Induk Kota Denpasar*, Denpasar, 1972, hal. 3.
14. *Ibid.*, hal. 5.
15. *Ibid.*, hal. 39.
16. Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1978 Tentang Pembentukan Kota Administratif Denpasar, Arsip Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian Kantor Walikota Administratif Denpasar (Jakarta: 11 Juli 1978), hal. 3 – 5.
17. *Ibid.*
18. Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1978 Tentang Pola Organisasi Pemerintahan Wilayah Kota Administratif Denpasar (Arsip Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian Kantor Walikota Administratif Denpasar (Jakarta: 11 Juli 1978), hal. 2 – 4.
19. Lihat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1978 Tentang Pembentukan Kota Administratif Denpasar, Arsip Sub. Bagian Hukum Dan Kepegawaian Kantor Walikota Administratif Denpasar (Jakarta: 11 Juli 1978), hal. 3.
20. Lihat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung, Nomor: NOT.4/81/1980, Tentang Peralihan Tugas, Wewenang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung kepada Pemerintah Kota Administratif Denpasar, Arsip Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian Kantor Walikota Administratif Denpasar (Denpasar: 6 September 1980), hal. 2.
21. Oka, I Dewa Gde, "Kota Denpasar dengan Permasalahannya," (makalah yang disajikan dalam loka karya pembangunan kota Denpasar dari tanggal 22 s/d 24 Sep-

- tember 1980 di kampus Universitas Udayana Denpasar), hal. 6—8.
22. Widminarko, "Bunga Rampai Pemilihan Umum 1955," dalam *Bali Post*, 9 April 1977, hal. 2.
 23. Astara, I Wayan Wesna, *Perkembangan Kota Denpasar Tahun 1906-1938*, (skripsi) (Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana, 1984) hal. 69-70.
 24. *Ibid.*, hal. 79-86.
 25. *Ibid.*, hal. 87-91.
 26. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Daerah Bali* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hal. 141.
 27. *Ibid.*, hal. 169.
 28. *Ibid.*, hal. 171.
 29. *Ibid.*, hal. 172.
 30. Proyek Pembinaan Unit Perencanaan Daerah Tingkat I Bali, Dit. Tata Kota dan Tata Daerah Dit. Jen. Cipta Karya Departemen PU, *Kota Administratif Denpasar, Fakta dan Penjelajarannya* (Denpasar: 1981), hal. 24.
 31. *Ibid.*, hal. 27.
 32. *Ibid.*, hal. 29.
 33. Wardana, Drs. I Gusti Ngurah, *op. cit.*, hal. 5.
 34. Proyek Pembinaan Unit Perencanaan Daerah Tingkat I Bali, *loc. cit.*
 35. *Ibid.*, hal. 29-30.
 36. *Ibid.*, hal. 31.
 37. *Ibid.*, hal. 33.
 38. Hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Sukarma, B.Sc., Denpasar, 25 Oktober 1985.
 39. Sukarma, I Wayan, B.Sc., "Daftar Penyediaan Fasilitas Pasar oleh Pemerintah Daerah Di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung," (Arsip Dinas Pendapatan Sedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung), (Denpasar: 24 April 1985).

40. Proyek Pembinaan Unit Perencanaan Daerah Tingkat I Bali, *op. cit.*, hal. 20.
41. Astara, I Wayan Wesna, *op. cit.*, hal. 92-93.
42. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hal. 129.
43. *Ibid.*, hal. 173.
44. Balai Pustaka, *Pendidikan di Indonesia 1900-1974* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 30.
45. Pendit, Nyoman S., *Mencari Inovasi* (Jakarta: Gunung Agung, 1979), hal. 79.
46. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hal. 174.
47. Proyek dan Pembinaan Unit Perencanaan Daerah Tingkat I Bali, *op. cit.*, hal. 78.
48. *Ibid.*, hal. 56.
49. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hal. 176-177.
50. *Ibid.*, hal. 177-178.
51. *Ibid.*
52. Unit Perencanaan Daerah Bali "Perencanaan Induk Kota Denpasar," (Denpasar: 1972), hal. 74-75.
53. Proyek Pembinaan Unit Perencanaan Daerah Tingkat I Bali, *op. cit.*, hal. 103.
54. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *op. cit.*, hal. 181.
55. Proyek Pembinaan Unit Perencanaan Daerah Tingkat I Bali, *op. cit.*, hal. 36.
56. *Ibid.*, hal. 38.
57. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, *Revisi Rencana Induk Kota Denpasar* (Denpasar: 1981), hal. 8.
58. Proyek Pembinaan Unit Perencanaan Daerah Tingkat I Bali, *loc. cit.*

BAB V KOTA DENPASAR SEBAGAI PUSAT PARIWISATA

5.1. Kegiatan Pariwisata

Kegiatan pariwisata di wilayah Kota Denpasar tentu tidak akan dipisahkan dari kedudukan Pulau Bali sebagai daerah yang terkenal di dunia pariwisata juga tidak terlepas dari kaitannya dengan Pemerintah Indonesia yang secara memusat memikirkan pembangunan pariwisata di Indonesia. Sejak masa kolonial Belanda, Bali telah diperkenalkan terutama oleh orang-orang Belanda sebagai daerah yang indah, tentram dan tinggi kebudayaannya. Keindahan dan keunikan Bali terutama diperkenalkan oleh perusahaan pelayaran Belanda yakni KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*) yang mengeksploitasi Bali demi keuntungan perusahaannya. Banyak patung-patung Bali di sekitar tahun 1920-an mulai dibuat dan dibeli oleh wisatawan yang datang ke Bali.¹

Dari segi kepurbakalaan juga Bali telah menarik ahli-ahli ilmu pengetahuan asing = terutama Belanda = untuk datang ke Bali. Pada tahun 1885 dua orang ahli bangsa Belanda Dr. Van der Tuuk dan Dr. J.L.A. Brandes telah mendirikan tiga buah prasasti dari Desa Belantih dan Kelandis. Pada 2 Juni 1928 di Singaraja didirikan sebuah taman pustaka yang diberi nama

Gedong Kirtya Liefrinck = Van der Tuuk = yang kemudian menjadi Gedong Kirtya. Pada tahun 1929 Dr. W.F. Stutterheim menerbitkan pula buku mengenai soal-soal kepurbakalaan yakni buku *Oudheden van Bali* I, II.² Pada tahun 1933 dengan datangnya pelukis asing Le Mayeur di Sanur, membuat Bali semakin dikenal di mata wisatawan asing. Karena itu ketika pada tahun 1930-an Pemerintah Kolonial Belanda ingin mengisolasi Bali dari pengaruh luar = menekankan keharmonisan Bali dengan adat dan tradisinya yang berbeda-beda = memberikan isyarat tentang Bali yang ingin dilihat sebagai museum hidup dan memberikan keuntungan dari pengunjung orang-orang asing. Sekurang-kurangnya dari segi politik kolonial, Bali akan mudah dikendalikan oleh sistem kekuasaan kolonial.

Setelah masa kemerdekaan (1945), terutama pada masa-masa revolusi, masalah turisme = karena keadaan kacau = hampir tidak pernah dipikirkan. Baru setelah tahun 1950, keadaan keamanan lebih dapat dikendali, pemerintahan yang teratur mulai disusun dan masalah turisme kembali direncanakan. Tempat penginapan Bali Hotel yang didirikan pada masa kolonial (1927) di Kota Denpasar menjadi tempat penting sebagai penampungan wisatawan yang datang ke Bali. Di sini juga sudah didirikan Bali Museum (1910) yang merupakan obyek wisata karena menyimpan bahan-bahan arkeologis dan bersejarah mengenai Bali. Sebelum Pelita I kepariwisataan di Bali dalam pengembangannya lebih bersifat natural (alamiah) dari pada direncanakan secara teratur. Ini membawa akibat bahwa data-data/catatan mengenai efek yang disebabkan oleh kegiatan kepariwisataan menjadi sulit didapatkan. Perencanaan yang semakin terarah baru dimulai pada Pelita I sesuai dengan pengarahannya pemerintah pusat di Jakarta.

Pada Pelita I (1969) pemerintah pusat menetapkan Bali sebagai "Pusat Pengembangan Kepariwisata Indonesia Bagian Tengah." Sebagai konsekuensinya, Pemerintah Daerah Propinsi Bali perlu mengambil langkah-langkah menuju pengembangan dan pembinaan kepariwisataan di Bali. Pada tahun 1971 DPRD-

GR Propinsi Bali menetapkan pembentukan Dinas Pariwisata Propinsi Bali (Diparda) dengan ketetapan tanggal 10-10-1971 no. 2/PD/DPRD-GR/1971. Badan ini (Diparda) menjalankan tugas-tugas pemerintah daerah dalam bidang kepariwisataan. Pada akhir Pelita I (1974), Pemerintah Daerah Tk I Bali menetapkan suatu Peraturan Daerah (Perda) no. 3 tahun 1974 tentang Pariwisata Budaya. Dengan peraturan ini pemerintah daerah menetapkan bahwa dalam menunjang, membina kepariwisataan di Bali yang perlu dikembangkan adalah soal-soal menyangkut kebudayaan Bali, yang karenanya dikenal dengan pariwisata budaya. Peraturan daerah ini pada pasal 1 dan 2 secara jelas mencantumkan pengertian dan tujuan dari pariwisata budaya di Bali.

Pada pasal 1 antara lain disebutkan, bahwa (1) Pariwisata Budaya adalah kepariwisataan yang dalam kegiatannya untuk memelihara kesenangan wisatawan, menyajikan unsur-unsur yang bernilai dari kebudayaan atau keindahan alam (2) Obyek pariwisata ialah sasaran yang memiliki daya tarik yang besar bagi kunjungan wisatawan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Tk I Bali . Sedangkan mengenai maksud dan tujuannya tercantum di dalam pasal 2 antara lain (1) Menciptakan iklim dan kondisi yang sehat bagi pengembangan kepariwisataan di Bali (2) Mempertahankan nilai-nilai dan ciri khas kebudayaan, kesucian agama dan keindahan alam Bali, mencegah pengaruh-pengaruh buruk yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan kepariwisataan (3) Memperoleh manfaat dari kegiatan-kegiatan kepariwisataan secara langsung maupun tidak langsung untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Bali³. Dengan pedoman peraturan daerah di atas, kepariwisataan di Bali berusaha dikembangkan.

Dalam kaitan ini Kota Denpasar dan sekitarnya mendapatkan perhatian yang semakin serius untuk pengembangan kepariwisataan. Denpasar sebagai salah satu kota Pemerintahan di Bali, semakin berkembang pesat sejak tahun 1960-an ketika

ibu kota propinsi dipindahkan dari Kota Singaraja ke Denpasar. Dengan demikian Denpasar tumbuh menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat kegiatan politik yang sekaligus membawa Kota Denpasar menjadi kota yang penduduknya paling padat di Bali. Sampai dengan tahun 1970 penduduk Kota Denpasar mencapai lebih kurang 100.000 jiwa.⁴ Dalam bidang pariwisata, Kota Denpasar menunjukkan peranannya yang sentral. Dinas Pariwisata Daerah Tk. II = karenanya = baru dibentuk untuk Kabupaten Badung yang berpusat di Denpasar, sedangkan untuk kabupaten lainnya di Bali, persoalan pariwisata masih ditangani oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) kabupaten. Untuk itu berbagai prasarana penunjang pariwisata dibangun di Denpasar.

5.1.1. Pusat Perhotelan

Sejak masa kolonial Kota Denpasar telah dihubungkan dengan jalan-jalan yang menuju obyek wisata seperti Denpasar – Sangeh – Singaraja (ke Utara), Denpasar – Ubud – Tampaksiring – Klungkung – Besakih (ke Timur), Denpasar – Sanur – Kuta – Uluwatu (ke Selatan), dan Denpasar – Mengwi – Tanah Lot (ke Barat). Pada masa awalnya daerah-daerah wisata ini kurang dan jarang memiliki hotel atau tempat penampungan bagi wisatawan. Karena itu di Kota Denpasar yang kedudukannya sentral, banyak orang mengusahakan atau membangun hotel dan penginapan yang menampung para wisatawan baik domestik maupun asing. Sub sektor perhotelan dan restoran tampak merupakan bagian terpenting dari kegiatan pariwisata.

Seperti telah disebutkan bahwa hotel yang pertama di Denpasar adalah Bali Hotel, kini berada di bawah *Natour Ltd (National Hotels & Tourism Corp Ltd)* yang berpusat di Jakarta. Bali Hotel memiliki 71 kamar, dengan jumlah pekerja (staf) sebanyak 210 orang. Hotel-hotel lainnya muncul di Desa Sanur terletak enam kilometer di selatan Kota Denpasar seperti Hotel Narmada dan Hotel Segara (tahun 1956), Hotel Tanjungsari

(tahun 1963), Hotel Hyatt (tahun 1973), Hotel Sanur Beach (tahun 1974). Hotel yang terbesar adalah Bali Beach Hotel yang didirikan tahun 1966. Hotel ini memiliki 307 buah kamar dengan staf pekerja terdiri atas 1010 orang (lokal) dan 15 orang (asing). Dari segi jenis hotel, Bali Hotel dan Bali Beach Hotel termasuk hotel pariwisata yang di dalam pengelolaannya perlu mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Hotel-hotel lainnya termasuk hotel biasa yang pembangunannya mendapatkan izin dari pemerintah kabupaten. Sampai dengan tahun 1969 di Kota Denpasar terdapat sekitar 40-an buah hotel biasa yakni Hotel Pemecutan dengan 11 buah kamar, Hotel Darma Karya dengan 8 buah kamar, Hotel Damai dengan 30 buah kamar, Hotel Darma Wisata dengan 13 buah kamar, Hotel Artha dengan 27 buah kamar, Hotel Punia dengan 19 buah kamar, Hotel Statsion dengan 7 buah kamar, Hotel Dirga Pura dengan 6 buah kamar, Hotel Merta Yoga dengan 10 buah kamar, Hotel Berana dengan 10 buah kamar, Hotel Sedana Yasa dengan 11 buah kamar, Hotel Kesuma dengan 20 buah kamar, Hotel Wisma Pulau Bali dengan 17 buah kamar, Hotel Mertha Sadha dengan 12 buah kamar, Hotel Kentjana dengan 6 buah kamar, Hotel Yasa dengan 17 buah kamar, Hotel Tulangampiang dengan 12 buah kamar, Hotel Tulangampiang I dengan 11 buah kamar, Hotel Lim Tek Sun dengan 10 buah kamar, Hotel Wakat dengan 10 buah kamar, Hotel Badung dengan 13 buah kamar, Hotel Populer dengan 19 buah kamar, Hotel Bali Agung dengan 11 buah kamar, Hotel Giri Putri dengan 12 buah kamar, Hotel Puri dengan 29 buah kamar, Hotel Suranadhi dengan 11 buah kamar, Hotel Bhijantara dengan 11 buah kamar, Hotel Mawar dengan 11 buah kamar, Hotel Anna dengan 23 buah kamar, • Hotel C.V. Chandra dengan 18 buah kamar, Hotel Berata dengan 11 buah kamar, Hotel Raksa Usada dengan 11 buah kamar, Hotel Mertha dengan 18 buah kamar, Hotel Bhudaya-daja dengan 21 buah kamar, Hotel Agung dengan 17 buah kamar, Hotel Merta Sari dengan 8 buah kamar, Hotel Bali Indah dengan 16 buah kamar, Hotel Djaja dengan 14 buah kamar,

Hotel Perinses dengan 8 buah kamar, Hotel Pendawa dengan 8 buah kamar, Hotel Adijasa dengan 20 buah kamar, Hotel Gangga dengan 17 buah kamar, Hotel Anni dengan 19 buah kamar, dan Hotel Irama dengan 10 buah kamar. ⁵

Pembangunan hotel-hotel kemudian semakin dikembangkan ke desa Sanur dan Kuta. Dibukanya hotel Bali Beach Sanur yang termasuk wilayah Kota Administratif Denpasar = menambah semakin banyaknya wisatawan yang datang ke Denpasar. Bila hotel-hotel di pusat Kota Denpasar tampak kurang menarik bagi wisatawan asing, maka hotel atau *home stay* yang ada di Sanur sangat memikat wisatawan, karena di samping Sanur masih lebih memperlihatkan tata cara kehidupan masyarakat desa dibandingkan dengan di pusat kota, juga Sanur dengan pantai dan ombak yang tidak besar merupakan daya tarik yang besar bagi wisatawan asing yang ingin menikmati alam dan budaya Bali. Itulah sebabnya Sanur cepat berkembang menjadi daerah wisatawan yang ramai. Sepanjang pantai Desa Sanur yang jaraknya kurang-lebih enam kilometer merupakan wilayah yang sangat baik untuk membangun hotel-hotel. Sampai dengan tahun 1975 Sanur memiliki empat buah hotel dengan standar internasional dengan 1.286 buah kamar dan 22 buah hotel kelas ekonomi dengan jumlah kamar 445 buah. Di samping hotel-hotel dengan restorannya, juga dibangun toko-toko kesenian (*souvenir shop*) yang menyediakan barang-barang bagi kebutuhan wisatawan. Pada tahun 1975 sudah terdapat sebanyak 77 buah toko kesenian di Desa Sanur.⁶

Pada tahun 1977 pemerintah pusat cq. menteri perhubungan mengeluarkan suatu ketentuan mengenai penggolongan hotel-hotel di Indonesia. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan berikut makan dan minum. Di sini hotel-hotel digolongkan ke dalam lima kelas berdasarkan minimum jumlah kamar, fasilitas dan peralatan yang tersedia dan

pelayanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan penggolongan kelas. Golongan kelas hotel dinyatakan dengan tanda bintang. Tanda bintang lima untuk hotel kelas tertinggi dan tanda bintang satu bagi hotel kelas terendah. Penggolongan ini dinyatakan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh direktur jenderal pariwisata.⁷ Rupanya ketentuan ini membawa akibat bahwa jumlah hotel pada tahun-tahun berikutnya di Kabupaten Badung tampak menurun karena terjadi penggabungan hotel-hotel agar dapat memenuhi sarat, namun dilihat dari jumlah kamar mencapai peningkatan yang cukup besar. Pada tahun 1978 jumlah hotel sebanyak 125 buah dengan jumlah kamar 3.538 buah dan pada tahun 1979 jumlah hotel tetap namun jumlah kamar meningkat menjadi 3.683 buah.⁸ Hotel-hotel ini terutama berada di Denpasar, Sanur dan Kuta, di mana Kuta adalah sebuah kota pantai yang dekat dan lancar berhubungan ke Kota Denpasar.

Meskipun tampak cukup banyak hotel yang dibangun di Kota Denpasar dan Sanur namun itu masih terasa kurang cukup untuk dapat menampung wisatawan. Lebih-lebih pada masa-masa ramainya kunjungan = biasanya pada hari-hari libur bulan Desember = kekurangan tempat penginapan sangat dirasakan. Di samping itu wisatawan asing yang datang menginap di Kota Denpasar dan sekitarnya juga meningkat. Dari satu catatan tampak bahwa kunjungan wisatawan di Kabupaten Badung meningkat terutama dari tahun 1976 (96.869 orang) menjadi 159.559 orang pada tahun 1979. Dari jumlah ini Denpasar (termasuk Sanur) memperoleh sekitar 77,41%.⁹ Ini menunjukkan bahwa Denpasar menampung sebagian besar dari wisatawan yang datang di Kabupaten Badung, yang pada tahun-tahun berikutnya diduga akan terus meningkat. Untuk mengatasi kekurangan tempat itu, pemerintah daerah merencanakan membuka atau memperluas lokasi penginapan (*tourist resort*) selain di Kuta juga di Nusa Dua. Juga dapat disebutkan bahwa semua hotel-hotel besar (berbintang) berada di Kabu-

paten Badung. Sebagai gambaran dapat dicatat bahwa sampai tahun 1981 hotel-hotel berbintang di Denpasar sebanyak 5 buah (1 buah berbintang tiga, 2 buah berbintang dua, dan 2 buah berbintang satu), di Kuta 7 buah (1 buah berbintang lima, 1 buah berbintang tiga dan 5 buah berbintang dua), di Sanur 11 buah (3 buah berbintang empat, 1 buah berbintang tiga, dan 7 buah berbintang dua)¹⁰. Ini menunjukkan bahwa usaha kepariwisataan di Bali terus dikembangkan, yang mau tidak mau akan membawa pengaruh pada keadaan Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan di Bali.

5.1.2 *Pelabuhan Udara Internasional Ngurah Rai*

Sebagai pelabuhan udara, lapangan udara di Tuban ini telah dibuka pada masa kolonial (1933). Alasannya, jelas lebih berorientasi kepada kepentingan-kepentingan pemerintah kolonial. Setelah masa kemerdekaan (1945) lapangan udara ini digunakan untuk kepentingan nasional Indonesia. Mengingat kepentingan yang semakin luas dalam rangka pengembangan kepariwisataan di Indonesia, pelabuhan udara ini dibuka untuk lalu lintas internasional pada tahun 1969, dengan nama Pelabuhan Udara Internasional Ngurah Rai. Pada masa peresmianya, lapangan udara ini memiliki satu *taxi way* dan satu *run way* yang panjangnya mencapai 2.700 meter dan lebar 45 meter, sehingga secara praktis dapat dipakai untuk pendaratan pesawat DC. 8 dan pesawat-pesawat lain yang sejenis. Dengan begitu lapangan udara ini pada tahun 1969 belum dapat digunakan oleh pesawat sejenis DC. 10 dengan kapasitas angkut yang maksimal. Kini Pelabuhan Udara Internasional Ngurah Rai ini melayani dua jenis kegiatan penerbangan, yakni penerbangan dalam negeri (domestik) dan penerbangan luar negeri (internasional) yang menghubungkan kota-kota penting di Indonesia dan luar negeri. Akibatnya arus penumpang yang datang melalui lapangan ini juga meningkat. Bila pada tahun 1969 penumpang melalui pelabuhan ini tercatat sejumlah 46.765 orang, maka pada tahun 1970 menjadi 69.251 orang. Ini berarti kenaikan

mencapai kurang lebih 48%. Pada tahun-tahun berikutnya penumpang yang datang melalui Pelabuhan Udara Ngurah Rai terus meningkat, meskipun peningkatannya mengalami pasang-surut, pada tahun 1979 menjadi 354.946 orang. Maka rata-rata penumpang yang datang melalui pelabuhan ini naik sebesar 21% setiap tahunnya.¹¹

Selanjutnya untuk pengembangan lapangan udara ini sudah dibuat *master plan* Lapangan Udara Ngurah Rai, disusun oleh PT. Encona Engineering Inc., yang merupakan Proyek Perancangan Ditjen Perhubungan Udara. *Master plan* ini membuat rencana sampai dengan tahun 1995. Berdasarkan suatu alternatif dari *master plan* ini diperkirakan bahwa penumpang yang datang melalui pelabuhan udara ini akan meningkat terus. Tahun 1975 jumlah penumpang 219.000 orang, tahun 1976 jumlah penumpang 267.000 orang, tahun 1977 jumlah penumpang 327.000 orang, tahun 1978 jumlah penumpang 396.000 orang, tahun 1979 jumlah penumpang 483.000 orang.¹² Dibandingkan dengan catatan yang ada dari statistik pelabuhan udara ini = mengenai tahun-tahun yang sudah dicapai = maka perkiraan dari *master plan* ini memang tampak berbeda. Alternatif *master plan* menunjukkan angka yang lebih tinggi. Karena hal ini mungkin dapat dimengerti sebagai usaha (target) yang ingin dicapai. *Master plan* memuat pula suatu rekomendasi, antara lain panjang landasan perlu diperpanjang menjadi 3000 meter, lebar landasan diperbesar menjadi 60 meter, kekuatan landasan diusahakan mampu menampung pesawat jenis DC. 10 dan B. 747, perluasan terminal dan tempat parkir, dan menyempurnakan *run way* yang sudah ada.¹³

Namun perlu disebutkan bahwa kedatangan wisatawan di Bali tidak hanya melalui pelabuhan udara, tetapi juga melalui pelabuhan-pelabuhan laut seperti Pelabuhan Benua (Bali Selatan) dan Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk (di Bali Barat). Dalam hubungan ini, dibukanya Pelabuhan Udara Internasional Ngurah Rai tentu dapat dilihat sebagai perluasan sarana perhubungan bagi para wisatawan yang datang ke Bali.

5.1.3 Perkembangan Obyek-obyek Wisata

Berbicara mengenai obyek-obyek wisata tampak tidak dapat dilepaskan dari keadaan alam dan pola kehidupan masyarakat di Bali karena itu apa yang dikenal sebagai obyek wisata. Untuk Bali, sesungguhnya sudah muncul secara alamiah sejak lama; misalnya pemandangan yang indah, pura/tempat suci di tiap desa, juga tata cara hidup dan seni budaya Bali telah banyak menarik wisatawan yang datang di Bali. Secara singkat dapat disebutkan bahwa obyek wisata di sini dapat meliputi empat unsur yang menarik yakni (1) pura (tempat suci umat Hindu di Bali) (2) tempat bersejarah (3) tempat/pemandangan indah (rekreasi) dan (4) adat-istiadat (kehidupan masyarakat). Di sini terkenal Pura Besakih sebagai pusat tempat pemujaan orang-orang di seluruh Bali, Desa Ubud sebagai desa yang kaya dengan kreativitas seninya, Bukit Jambul dengan pemandangan yang indah, upacara pembakaran mayat, tari-tarian tradisional dan lain-lain. Kehidupan seperti itu tampak membawa Bali menjadi terkenal di dunia internasional.

Khusus mengenai keadaan di Kota Denpasar dan sekitarnya, dapat ditunjukkan bahwa di sini masih terdapat obyek-obyek wisata yang telah dikunjungi sejak lama. Di antaranya terkenal obyek-obyek seperti Museum Bali (di Denpasar) yang pendiriannya sudah dimulai pada tahun 1910 di bawah pengawasan kekuasaan Belanda. Pada tahun 1925 pembangunannya dilanjutkan dan langsung dibuka pada bagian-bagian yang telah selesai, tetapi Pemerintah Belanda baru meresmikan pembukaannya pada tahun 1932, setelah seluruh bangunan dianggap selesai. Sejak tahun 1945 Museum Bali ini berada di bawah sebuah Yayasan Perkumpulan Bali Museum dan tahun 1966 berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam Museum Bali tersimpan banyak bahan-bahan peninggalan sejarah, hasil-hasil kebudayaan penduduk Bali yang dapat dilihat oleh wisatawan. Dengan semakin banyaknya benda-benda kebudayaan yang dapat dibawa ke Museum Bali, maka setelah masa pemerintahan Republik Indonesia keadaan gedung-

gedung di museum semakin dikembangkan atau ditambah dengan bangunan-bangunan baru. Ini untuk dapat menampung barang-barang yang semakin banyak yang disimpan di Museum Bali.

5.1.3.1 *Puri Pemecutan*

Puri Pemecutan adalah istana milik raja Badung yang terletak di Kota Denpasar. Raja Badung pernah berkuasa atas seluruh wilayah Kerajaan Badung, yang kini menjadi wilayah Kabupaten Badung. Kejayaan Kerajaan Badung telah muncul pada awal abad XIX. Dengan datangnya kekuasaan kolonial Belanda di Bali sempat membuat kerukunan raja-raja di Kerajaan Badung tidak dapat dipertahankan. Namun demikian Kerajaan Badung juga mencatat peristiwa penting dalam perjalanan sejarahnya dengan pecahnya perlawanan mereka terhadap kekuasaan Belanda yang dikenal dengan Puputan Badung (1906). Ini membawa jatuhnya Kerajaan Badung di bawah kekuasaan Belanda. Puri Pemecutan sebagai bagian dari istana Kerajaan Badung kini merupakan peninggalan sejarah yang menampilkan ciri-ciri Bali (segi-segi arsitektur Bali sangat kentara di dalamnya). Selain itu pola kehidupan keluarga puri yang masih aktif dalam kesenian dan kerajinan memperkuat ciri-ciri tersebut. Maka puri ini sering dikunjungi oleh wisatawan asing yang datang ke Bali.

5.1.3.2 *Museum Le Mayeur (di Sanur)*

Museum ini terletak di pantai Sanur, di sebelah selatan Hotel Bali Beach. Seperti telah disinggung, museum ini mulanya didirikan oleh seniman berkebangsaan asing (Belgia) Le Mayeur pada tahun 1933. Setelah Le Mayeur meninggal, ia menyerahkan pemeliharaan museum itu kepada istrinya Ni Polok (seorang wanita Bali). Oleh pemerintah daerah hal ini diperhatikan, sehingga sekarang = untuk pemeliharannya = mendapat subsidi dari pemerintah. Museum ini tampak penting, sebab dengan pendirian ini Pantai Sanur tampak semakin ramai dikunjungi,

menjadi perhatian orang-orang asing yang datang ke Bali dan bahkan penting untuk Bali, sebab dengan kehadiran Le Mayeur dan sanggarnya di Pantai Sanur, kebudayaan Bali semakin mencuat di mata pengunjung asing. Sampai kini museum ini tetap ramai dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun internasional. Pantai Sanur juga semakin jelas peranannya sebagai tempat rekreasi penduduk dan wisatawan. Di pantai ini hampir setiap hari banyak orang yang datang = terutama di hari Minggu = untuk rekreasi, mandi-mandi, dan berjemur di siang hari atau menikmati terbitnya matahari di pagi hari.

5.1.3.3 *Pura Belanjong*

Tidak jauh dari Pantai Sanur di sebelah barat Museum Le Mayeur terdapat pula tempat pemujaan (peninggalan kuna) yang disebut Pura Belanjong. Dari tulisan prasasti yang berbahasa Sansekerta dan Bali Kuna dapat diketahui bahwa tempat pemujaan itu sudah dibangun pada abad X. Di dalamnya tersebut nama Raja Kesari Warmadewa.¹⁴ Tempat ini memberikan petunjuk yang cukup besar bagi pemahaman persejaraan masyarakat di Bali. Karena itu, pura ini cukup menarik bagi wisatawan yang datang di Bali. Pura Belanjong telah ditetapkan sebagai cagar budaya di Bali.

5.1.3.4 *Pura Sakenan*

Lebih kurang tujuh kilometer di selatan Kota Denpasar terdapat sebuah pulau kecil bernama Pulau Serangan. Di sini terdapat pura yang disebut Pura Sakenan. Pura ini dapat dilihat sebagai pemujaan yang mendapat pengaruh dari kekuasaan Majapahit. Dikatakan pada masa-masa merosotnya kekuasaan Majapahit di Jawa, banyak orang datang dari Jawa ke Bali. Di antara orang-orang itu adalah seorang brahmana, pendeta yang dikenal dengan Pedanda Sakti Bau Rauh. Dalam perjalanan pendeta ini di Bali = mengajarkan agama kepada penduduk = suatu ketika sampai di Pulau Serangan. Di sini sang pendeta bertemu dengan seorang pendeta agama Budha yang bernama Danghyang Asta

Paka. Dari pertemuan kedua pendeta ini terjadi kesepakatan untuk membangun sebuah pemujaan besar bernama Pura Sakenan, suatu pemujaan untuk Siwa dan Budha. Karena itu setiap "piodalan" yang jatuh pada Hari Raya Kuningan, banyak orang dari seluruh pelosok di Bali datang melakukan persembahyangan. Lokasi pura ini menjadi amat indah dan menarik karena terletak di Pulau Serangan yang terpisah = tapi dekat = dengan Bali. Para pengunjung dapat datang dengan menggunakan tongkang-tongkang atau *boat* yang biasa digunakan penduduk bila air sedang pasang. Tetapi bila air sedang surut, orang-orang dapat datang dengan berjalan kaki menuju ke pura itu. Wisatawan asing juga banyak yang datang pada setiap "piodalan" di pura ini.

Selain itu di sekitar Kota Denpasar masih terdapat tempat-tempat pemujaan yang banyak dikunjungi oleh wisatawan seperti Pura Peti Tenget terletak di Desa Kerobokan, sekitar enam kilometer ke arah barat di Kota Denpasar, Pura Uluwatu ± 27 km di ujung selatan Badung, di Jazirah Bukit (*Tafelhoek*). Kedua pura ini juga mempunyai riwayat yang erat berhubungan dengan Pedanda Sakti Bau Rauh dari Majapahit. Karenanya banyak penduduk Bali datang bersembahyang bila hari piodalan tiba. Di sini Pura Uluwatu menjadi sangat menarik bagi wisatawan karena pura itu terletak di atas bukit menjorok ke laut, dengan tebing curam yang tingginya ± 100 meter dari muka laut.¹⁵ Dengan melihat ke bawah dari pura, orang akan dapat melihat air laut yang hijau, jernih dengan ikan-ikan besar-kecil saling berseliweran. Suasana mengesankan juga nampak ketika matahari terbit dan terbenam sehingga membuat pemandangan dari Pura Uluwatu sangat indah. Tempat-tempat ini sangat mudah dicapai dari Kota Denpasar. Tentu masih ada lagi pura-pura kuna lainnya yang menarik perhatian wisatawan untuk datang ke Denpasar (Bali).

Selain pura-pura yang dipelihara sebagai obyek pariwisata di Kota Denpasar dikembangkan pula jenis obyek lainnya seperti:

5.1.3.5 *Konservatori Kerawitan Indonesia Jurusan Bali (KOKAR)*

Sekolah ini dibangun kurang-lebih dua kilometer jaraknya ke arah timur laut dari Museum Bali. Di sini khusus diajarkan berbagai jenis tari dan tabuh mulai dari yang klasik sampai dengan jenis kreasi baru. Berbagai jenis instrumen (gamelan) Bali juga terdapat di tempat ini yakni gerantang joged, gambang, gambuh, angklung, gong gede, gender. Gedung Kokar dibangun dengan hiasan-hiasan relief yang indah dari pragmen cerita Mahabrata, yang menarik wisatawan.

5.1.3.6 *Pusat Pengembangan Kebudayaan (Art Centre)*

Gedung ini terletak di Desa Abian Kapas lebih kurang dua kilometer di sebelah timur pusat Kota Denpasar. Areal kompleks ini cukup luas, di mana terdapat bangunan-bangunan seperti gedung pameran dan panggung terbuka tempat mempertunjukkan berbagai jenis tarian terpilih di daerah Bali. Gedung pameran yang bertingkat dibuat menurut arsitektur Bali, dihiasi dengan relief-relief yang indah dan menarik. Di dalamnya dipamerkan berbagai jenis lukisan dan ukiran hasil seniman Bali yang bermutu. Untuk kunjungan di sini dapat dilakukan setiap hari pagi dan sore. Tempat ini dapat dicapai dalam waktu 20 menit dari Pelabuhan Udara Ngurah Rai yang berjarak sekitar 15 km dari pusat Kota Denpasar.

Lebih kurang tiga kilometer di timur laut Kota Denpasar dibangun pula tempat rekreasi "Lila Ulangun Ongan". Di sini terdapat tempat yang ditata indah di pinggirannya sebuah sungai dan dilengkapi dengan sebuah kolam renang yang baik bagi anak-anak muda latihan berenang. Karenanya tempat ini sangat menarik bagi setiap orang yang ingin berekreasi dari Kota Denpasar. Lapangan Puputan Badung yang terletak di jantung Kota Denpasar juga menjadi tempat menarik bagi pengunjung, karena lapangan ini berhadapan dengan Pura Jagatnatha dan Museum Bali yang berdiri megah (di sebelah timurnya). Sementara di se-

belah utara dibangun rumah dinas (?) dengan gaya Bali yang menarik wisatawan. Di sebelah kanan bangunan yang terakhir ini terletak Bali Hotel yang menampung banyak wisatawan asing.¹⁶

5.2 *Dampak Pariwisata*

Dalam pembicaraan mengenai dampak pariwisata di sini ingin dilihat kurang-lebih pengaruh perkembangan pariwisata terhadap Kota Denpasar. Dengan data-data yang memang belum memadai, di sini akan dicoba diuraikan mengenai hubungan antara kemajuan pariwisata di Bali dan perkembangan Kota Denpasar. Bila hubungan itu dapat dimengerti, itu menunjukkan adanya pengaruh timbal-balik antara keduanya.

5.2.1. *Aspek Sosial Budaya*

Datangnya wisatawan asing yang semakin ramai di Bali, tampak membawa pengaruh baik positif maupun negatif pada segi sosial budaya masyarakat Denpasar khususnya dan masyarakat Bali umumnya. Pada segi kesenian misalnya – dengan kreativitas yang tinggi dari orang Bali – masyarakat Bali tidak menjadi beku atau kaku di dalam keseniannya. Meskipun tidak mengkopi mentah-mentah, orang Bali mudah meniru cara kesenian bangsa (orang) lain yang dipandang baik. Karenanya orang Bali tidak beku pada tradisinya. M. Covarrubias menggambarkan dengan baik mengenai dinamisnya orang Bali pada ujud keseniannya. Antara lain dikatakan bahwa kesenian Bali yang hidup berada dalam aliran yang tetap. Bagi orang Bali kesenian yang turun-temurun memang tetap dipelihara, tetapi bila seniman menemukan hal yang menjemukan, mereka akan mengubahnya dan akan direkakan cara, gaya baru dalam musik atau dalam sandiwara atau cara-cara baru dalam membuat patung dan lukisan.¹⁷ Selanjutnya Covarrubias menunjukkan bahwa ketika seorang pelukis muda Bali melihat pelukis Barat Walter Spies melukiskan warna-warna di pucuk-pucuk daun sebuah pemandangan hutan, pelukis Bali itu pulang dan kemudian men-

ciptakan lukisan yang bercorak Bali, namun dengan model dan warna-warna yang belum pernah dilakukan di Bali.¹⁸

Pada tahun 1920-an memang Bali telah ditandai oleh masuknya aliran baru dalam corak seni lukis. Datangnya pelukis Barat Walter Spies dan R. Bonnet membawa pelukis-pelukis Bali berkenalan dengan seni lukis yang bercorak naturalis. Pelukis-pelukis muda di Bali mulai membuat patung-patung yang naturalis, yang menggambarkan suasana kehidupan masyarakat secara realistik. Patung-patung serupa itu disebut *togog*. Kemudian muncul gaya patung yang humoristik, bahkan sering menjadi porno.¹⁹

Setelah masa kemerdekaan, dan digalakkannya promosi pariwisata, pengerjaan patung-patung oleh seniman pematung di Bali semakin berkembang. Di setiap jalur pariwisata muncul toko-toko barang-barang kesenian yang menyediakan barang-barang hasil kesenian seperti patung-patung, kain dan lain-lain bagi wisatawan. Di Kota Denpasar dan sekitarnya juga muncul toko-toko barang-barang kesenian dan orang-orang yang menjadi pedagang acungan, terutama di obyek-obyek pariwisata. Kehidupan penduduk mau tidak mau mendapat pengaruh dari kepentingan untuk memenuhi keinginan wisatawan. Dari suatu penelitian antropologis dapat dilihat sebagai contoh kasus di Banjar Tengah Sesetan, empat kilometer di selatan Kota Denpasar. Pada mulanya penduduk di Banjar Tengah Sesetan ini sebagian besar hidup dari pekerjaan-pekerjaan sebagai petani, berdagang, menjadi pegawai negeri dan ada yang menjadi buruh di kota. Setelah toko-toko barang-barang kesenian memerlukan patung-patung untuk kepentingan wisatawan, maka penduduk Banjar ini mulai dengan pekerjaan mematung. Mereka menghasilkan banyak patung kayu dengan gaya realistik, melukiskan wanita-wanita setengah telanjang dan orang-orang tani. Patung-patung ini memenuhi toko-toko kesenian di Kota Denpasar. Beberapa pengusaha muncul – termasuk sebuah keluarga WNI turunan Cina – mempekerjakan suatu kelompok pembuat pa-

tung kayu yang bekerja penuh sehari, sehingga mereka turun ke sawah hanya pada saat-saat musim panen.²⁰

Dalam bidang seni tari dapat dilihat bahwa pada tahun 1940-an di Banjar Seseetan ini telah muncul seorang seniman muda yang berpikiran maju bernama I Nyoman Rembang. Pada tahun 1950 dia telah menyertai rombongan penari ke Ceylon dan mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus 1950) di Jakarta. Kemudian dia ikut mendirikan Sekolah Seni Karawitan pertama di Solo (Jawa Tengah), dan tahun 1961 ikut mendirikan Sekolah Kesenian (KOKAR) di Denpasar. Baru pada tahun 1967 dia mencurahkan perhatiannya untuk mengembangkan tari-tarian di Banjar kelahirannya sendiri. Dorongan ini tampak muncul selain perlunya ikut membangun lingkungan dengan kemampuan yang dimilikinya, namun yang penting adalah munculnya keperluan untuk memenuhi selera wisatawan yang ingin menikmati hasil kesenian (tari) Bali di Denpasar. Bila pada masa-masa sebelumnya tari-tarian lebih banyak dipertunjukkan dalam rangka suatu upacara di pura (tempat suci), kini tari-tarian dibuat untuk dapat dipentaskan di depan umum di hadapan para wisatawan. Pada tahun 1968 kelompok seni tari pimpinan I Nyoman Rembang ini mulai menyelenggarakan pertunjukan untuk umum dengan menampilkan tambahan alat-alat untuk melengkapi gamelannya. Tahun 1969 kelompok kesenian ini yang disebut "Duta Irama" telah mendapat izin – ijazah kesenian – dari pemerintah, sehingga dengan demikian semakin menjadi terkenal dan sering mengadakan pertunjukan kesenian di depan umum dan wisatawan. Tahun 1970 kelompok kesenian ini telah mengadakan pertunjukan secara teratur setiap Rabu malam dengan waktu pertunjukan lebih-kurang 1½ jam. Selain pertunjukan yang bersifat rutin ini kadang-kadang kelompok kesenian ini diundang pula untuk melakukan pertunjukan di depan wisatawan asing di Bali Hotel, di Lapangan Udara Ngurah Rai dan Hotel Bali Beach Sanur. Dari hasil-hasil pertunjukannya, kelompok tari Banjar Tengah Sese-

tan semakin mengembangkan tarian dan peralatan yang perlu dimiliki.²¹

Usaha dan aktivitas kesenian yang menunjang pariwisata muncul pula di banjar-banjar lainnya di Denpasar, misalnya di Banjar Sumerta, Desa Sanur, Banjar Kesiman, yang masing-masing memiliki kelompok seni tari dan ukir-ukiran.²² Bila ukir-ukiran atau patung kayu berkembang untuk mengisi toko-toko kesenian atau kerajinan di Denpasar, maka usaha kesenian (tari) yang memang dikembangkan untuk kepentingan wisatawan, mulai diatur dengan cermat, mengikuti jadwal yang teratur. Waktu untuk pertunjukan ditentukan antara 1 – 1½ jam. Suatu pertunjukan yang teratur diadakan pula dalam panggung terbuka di Pusat Pengembangan Kebudayaan Bali (*art centre*) Abian Kapas.

Seni kerajinan keramik – yang sudah ada sejak dulu – kini dengan ramainya wisatawan, semakin dikembangkan di Kota Denpasar. Kerajinan ini – yang bahan-bahannya dari tanah liat – mengerjakan dan menghasilkan barang-barang pecah seperti periuk, pot, kendi, boneka-boneka (cili) yang banyak digemari wisatawan. Juga kerajinan membuat kipas dari kayu cendana dan kayu hitam (eben) merupakan kegiatan yang berkembang di Kota Denpasar akibat kemajuan pariwisata.

Dilihat dari sisi lain berkembangnya kesenian yang berkait dengan kepariwisataan, tampak pula terdapat segi yang tidak menggemirakan di mata masyarakat. Suatu tim peneliti Universitas Udayana menunjukkan bahwa ada kecenderungan di antara seniman di Bali mengikuti selera wisatawan dalam berkarya. Karena laris dibutuhkan wisatawan, menyebabkan terjadinya kemerosotan pada mutu atau nilai karya seni mereka. Para seniman cenderung membuat barang-barang yang dikirim sebagai kenang-kenangan (*souvenir*), dan bukan karya dengan nilai-nilai yang tinggi, bahkan ada yang dinilai sebagai hasil karya yang porno, mengurangi pandangan etika masyarakat. Barang-barang karya sastra seperti lontar-lontar yang bertuliskan huruf

Bali mengenai pengetahuan kebudayaan Bali, dijual kepada wisatawan. Tidak jarang barang-barang yang sudah disucikan atau dikeramatkan seperti arca-arca di pura, barang antik milik pura atau desa, terjual kepada wisatawan.^{2 3}

Suatu seminar mengenai tari sakral dan tari profan yang diselenggarakan di Denpasar pada tanggal 24–25 Maret 1971, jelas dimaksudkan untuk ikut menanggulangi penyimpangan-penyimpangan pementasan tari yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dari hasil seminar ditegaskan ada tiga golongan tari Bali yang patut dimengerti yakni (1) tari wali, suatu tari yang merupakan bagian dari upacara agama Hindu seperti tari sanghiang, tari rejang, tari baris, dan tari pendet. (2) tari bebali, tari yang berfungsi sebagai pengiring upacara agama seperti wayang, topeng, gambuh. (3) tari bali-balihan, suatu tari yang berfungsi sebagai hiburan belaka seperti joged, ganderung, janger dan lain-lain. Sedangkan jenis tarian legong seperti tari nelayan, tari tenun, tari tambulilingan dan lain-lain merupakan jenis tari kreasi baru yang disadur dari tari bebali dan tari bali-balihan. Jenis tarian yang terakhir ini banyak dipertunjukkan untuk umum. Selanjutnya ketentuan Pemerintah Daerah Bali dengan SK. Gubernur/Kdh Tk. I Bali no. 26/Kesra II/C/339/74, yang mengatur mengenai tatacara memasuki pura, mengamankan pura atau obyek dari tingkah laku pengunjung yang mencemarkan,²⁴ dapat dimengerti sebagai suatu tindak lanjut atas tindakan atau prilaku pengunjung yang dipandang telah menyimpang.

5.2.2. *Aspek Sosial Ekonomi*

Seperti telah dikemukakan bahwa salah satu tujuan dari pengembangan pariwisata adalah meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan dengan aspek di atas (sosial-budaya), tentulah apa yang diusahakan akan dapat pula dilihat dari segi sosial-ekonomi. Pembuatan patung-patung secara massal — meskipun kurang memenuhi nilai seni

yang tinggi – akan dapat dilihat dari segi kepentingan pemenuhan ekonomi pembuatnya. Di samping itu usaha membuat barang keramik dan kipas di Kota Denpasar juga memperlihatkan suatu kemajuan dalam arti ekonomi. Pada setiap toko barang-barang kesenian tampak tidak pernah absen dari pajangan kipas yang laris oleh pengunjung, bahkan biasanya peminat memesan agar namanya dapat dibubuhkan pada kipas yang dibuat dan toko-toko barang keramik bermunculan di jalur pariwisata bagian barat. Hal ini dapat dimengerti sebagai petunjuk mengenai usaha yang menguntungkan dari segi ekonomi. Munculnya kelompok-kelompok seniman tari di banjar-banjar yang menyelenggarakan pertunjukan secara teratur untuk wisatawan, membawa dampak besar dari segi ekonomi. Seperti ditunjukkan oleh kelompok seniman "Duta Irama" di Sesetan, maka keuntungan yang diperoleh dari pertunjukan-pertunjukannya dapat digunakan untuk membayar hutang, menambah modal bersama, memperbaiki pura dan bale banjar.²⁵

Usaha yang lebih langsung menunjang kegiatan pariwisata adalah berkembangnya hotel dan restoran. Ini merupakan faktor penting karena dalam suatu perjalanan yang jauh, wisatawan menginginkan pelayanan yang sebaik mungkin, aman, memenuhi sarat mengenai fasilitas penginapan dan makannya. Sebaliknya selain wisatawan harus mengeluarkan uang untuk tinggal dan makannya di hotel, pembangunan hotel-hotel juga membawa serta kebutuhan akan tenaga kerja terampil dari masyarakat. Ini berarti suatu peningkatan penghasilan akan dimungkinkan dari sebagian anggota masyarakat. Dilihat secara keseluruhan (Bali), meningkatnya wisatawan yang datang sesudah dibukanya Pelabuhan Internasional Ngurah Rai, memang diikuti oleh semakin berkembangnya pembangunan hotel-hotel. Dari catatan di Kantor Imigrasi Denpasar dapat diketahui bahwa jumlah wisatawan asing yang datang sejak tahun 1969 meningkat terus. Bila pada tahun 1969 tercatat 11.278 orang, maka pada tahun 1975 menjadi 75.790 orang dan tahun 1979 menjadi 120.084 orang.²⁶ Mengenai data-data jumlah hotel

dapat ditemukan bahwa pada tahun 1979 di Kabupaten Badung tercatat hotel bertaraf internasional 31 buah, hotel menengah 91 buah, dan hotel kecil (losmen, pension) 177 buah. Jumlah kamar seluruhnya ada 2.700 buah dan tenaga kerja yang dapat diserap lebih-kurang 5.205 orang, sedangkan untuk sektor penunjang lainnya menyerap tenaga kerja 1.605 orang. Dilihat dari segi pendapatan daerah ternyata yang terbesar adalah dari sektor pariwisata, yang berupa Pajak Pembangunan I (ini berjumlah lebih dari 50%).²⁷

Keadaan di atas tampak pula berkait dengan perkembangan sektor lain seperti usaha ternak, perkebunan yang menghasilkan bahan-bahan untuk kebutuhan hotel. Meskipun belum jelas untuk Kota Denpasar, namun keadaannya di Bali tentu boleh menjadi petunjuk dari perkembangan itu. Ini dapat dilihat dari pemasukan ayam petelur dan ayam pedaging (*broiler*) dari Jawa ke Bali yang terus meningkat; tahun 1972 sebanyak 8.015 ekor, tahun 1973 sebanyak 28.110 ekor, tahun 1974 sebanyak 41.242 ekor, tahun 1975 sebanyak 59.729 ekor, tahun 1976 sebanyak 168.967 ekor, dan tahun 1977 sebanyak 141.211 ekor.²⁸

Selanjutnya dilihat dari perkembangan penduduk, keadaan di Denpasar juga lebih tinggi dari daerah-daerah lainnya. Keadaan penduduk di Kota Administratif Denpasar yang meliputi Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan (di sini termasuk Desa Sanur) menunjukkan perkembangan pertambahan yang jauh lebih tinggi daripada kecamatan lainnya. Sebagai contoh itu ditunjukkan oleh keadaan penduduk di Kotif Denpasar dari tahun 1978 – 1980. Tahun 1978 dari jumlah 191.519 jiwa menjadi 206.504 jiwa pada tahun 1979 dan meningkat menjadi 262.938 jiwa tahun 1980; jadi kenaikannya sekitar 10.69% per tahun, sedangkan penduduk di kecamatan lain di Kabupaten Badung, kenaikan rata-rata kurang dari 1% per tahun.

Dari segi urbanisasi Kotif Denpasar juga menunjukkan kelebihan. Di sini diperlihatkan contoh di Kecamatan Denpasar

Barat dalam tahun 1981 tercatat pendatang sebanyak 762 orang dan pergi 160 orang; Kecamatan Denpasar Timur tercatat pendatang sebanyak 662 orang dan pergi 357; Kecamatan Denpasar Selatan tercatat pendatang sebanyak 1.813 orang dan pergi 471 orang; dan Kecamatan Kuta tercatat pendatang 342 orang dan pergi 308 orang dan seterusnya.³⁰ Meskipun belum ditunjukkan dengan data yang lebih pasti, tentu dapat diduga bahwa faktor pariwisata turut mendorong keadaan ini.

Dilihat pada segi perkembangan kota – terutama perkembangan fisik kota – dampak pariwisata bahkan sudah muncul atau menjadi pendorong pada tahap perencanaan. Dalam rangka pembinaan Kota Denpasar yang lebih seimbang dengan kota-kota lainnya di Bali, direncanakan perkembangan turisme dialihkan ke Desa Sanur (bagian tenggara Denpasar), di mana dibangun hotel-hotel bertaraf internasional, sedangkan mendekati pusat Kota Denpasar dilakukan pembangunan losmen dan hotel-hotel yang menampung wisatawan dalam negeri.³¹ Memang kemudian muncul hotel-hotel besar di Sanur, terutama sesudah dibangunnya Hotel Bali Beach. Dengan digabungkannya Sanur ke dalam wilayah Kotif Denpasar (1978), ini berarti Kota Denpasar sebagai pusat pariwisata yang tradisional tidak diam, melainkan semakin berkembang juga dengan wilayahnya yang semakin luas, lebih-lebih karena tanah untuk bangunan hotel tidak ditetapkan luasnya. Hal ini sering membawa sikap spekulatif sehingga perkembangannya sulit diatur.

Sementara itu jalur jalan di Kota Denpasar dan sekitarnya juga bertambah sejalan dengan perkembangan penduduk yang semakin padat. Dari indek rasio jumlah sarana angkutan darat, di Kota Denpasar menunjukkan rangking yang tertinggi di Bali.³² Kedudukan Denpasar sebagai lokasi pusat pemerintahan dan dekat dengan pusat-pusat pariwisata di luar Denpasar (seperti Kuta dan Nusa Dua) membawa Denpasar menjadi sentral dari kegiatan pariwisata. Karena itu menuju obyek pariwisata dari Kota Denpasar mendapat prioritas untuk dikembangkan. Akibatnya prasarana lain yang mendukungnya seperti

tempat parkir, terminal juga diperluas sesuai dan mendekati jalur yang dilalui. Jalan-jalan penting yang memusat di Denpasar dapat disebutkan Denpasar – Tanah Lot, Denpasar – Tuban, Denpasar – Benoa, Denpasar – Sanur, Denpasar – Singaraja, dan Denpasar – Sangeh.³³

5.3. *Perubahan Sosial*

Dari uraian tentang kepariwisataan di atas, tentu sudah dapat dilihat tentang adanya suatu perubahan – terutama pada segi-segi fisikanya – di Kota Denpasar dan sekitarnya. Seperti tampak pada semakin banyaknya penduduk, sektor mata pencaharian, gedung-gedung dan perluasan jalan-jalan, yang diusahakan sebagai akibat berkembangnya aktivitas kepariwisataan. Namun yang penting pula ingin dimengerti di sini adalah bagaimana suatu perubahan sosial telah terjadi di dalamnya. Dalam penelitian dan bahan-bahan yang masih terbatas ini, tentu sulit memastikan bagaimana suatu perubahan sosial terjadi, bagaimana mengukurnya, apakah dengan melihat semakin banyaknya orang yang memakai sepeda motor, atau banyaknya turis yang bergaul di Bali, atau sikap orang-orang Bali terhadap kedatangan wisatawan? Tampaknya untuk hal ini masih memerlukan suatu penelitian yang lebih mendalam.

Dalam tulisan ini baru akan disampaikan keadaan perubahan yang dapat diamati secara sepintas lalu, yang dapat dilihat sebagai suatu gejala bentuk-bentuk perubahan sosial, yang boleh merupakan petunjuk untuk suatu penelitian yang lebih mendalam. Dapat disebutkan bahwa suatu usaha pengorganisasian pekerjaan mematang, yang mulai diperhitungkan secara ketat mengenai hasil karyanya seperti yang terjadi di Sesetan, dapat dilihat sebagai satu bentuk perubahan sosial, karena sebelumnya hal semacam itu tidak dilakukan. Meningkatnya orang-orang dari golongan bawah (sudra) ikut aktif di dalam kelompok-kelompok kesenian – yang dapat dilihat sebagai keturunan yang datang dari tradisi kecil³⁴ – dapat pula dilihat sebagai

suatu bentuk perubahan sosial yang terjadi di Sasetan, sebab kini orang-orang yang dipandang golongan bawah sudah dapat banyak bercampur dengan orang-orang bangsawan (triwangsa) melakukan pekerjaan bersama-sama. Hal semacam ini dapat diduga terjadi pula di banjar-banjar lain di Kota Denpasar, dan juga pada kelompok pekerja di sektor lain. Dengan adanya penduduk kota bekerja sebagai pegawai kantor atau perusahaan — lebih-lebih di sektor pariwisata — menyebabkan kegiatan sosial penduduk di banjar-banjar di Kota Denpasar terpaksa digeser. Misalnya bila ada kematian seorang anggota atau ada pekerjaan bergotong-royong, hal itu tidak dapat lagi dilakukan pada pagi hari, tetapi pada sore hari setelah para pegawai kantor pulang kerja. Di sini seka-seka (organisasi) tradisional sering berubah fungsi — menjadi hanya simbol — sementara organisasi-organisasi baru muncul memegang peranan. Misalnya kelompok arisan teman-teman sekantor, kelompok profesi, yang sering mendesak peranan organisasi tradisional.

Sebuah bale banjar (balai masyarakat) yang semula digunakan terutama untuk pertemuan-pertemuan anggota banjar, dapat berubah menjadi tempat pertunjukan untuk wisatawan. Juga sebuah puri (istana) dari zaman kerajaan, dapat dimanfaatkan untuk menjadi hotel atau menampung wisatawan. Selain itu kesibukan orang-orang hidup di kota dengan kegiatan kepariwisataannya, secara tak langsung akan mengajak orang untuk berpandangan individualistis, karena tidak sempat lagi — seperti dulu-dulunya untuk berbincang dengan kawan tetangga. Sementara itu ada di antara orang-orang pekerja di sektor pariwisata sempat menikmati kehidupan yang lebih baik secara material dari rata-rata temannya di kota. Ini tampak membawa status mereka naik di mata masyarakat.

Dengan gambaran keadaan di atas dan dengan mengikuti suatu konsep mengenai perubahan sosial dari para ahli sosiologi yang antara lain mengatakan, "bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasya-

rakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola-pola prilaku”³⁵, dapatlah dikatakan bahwa aktivitas kepariwisataan di Kota Denpasar dan sekitarnya telah membawa pengaruh atau dampaknya pada perubahan sosial. Sekurangnya dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara aktivitas kepariwisataan dan perubahan sosial di Kota Denpasar.

CATATAN BAB V

1. Jef Last, *Bali in de Kontering*, Amsterdam: 1955, hal. 33. Team Universitas Udayana, *Penanggulangan Pengaruh Negatif Kebudayaan Asing terhadap Kebudayaan Bali*, Proyek Sasana Budaya Bali 1977/1978, hal. 35
2. Team Universitas Udayana, hal. 25.
3. Lihat Team Research Universitas Udayana, *Pengaruh adanya Peraturan-Peraturan Daerah terhadap Perkembangan Pariwisata dan Kebudayaan Bali*, (Denpasar: 1976), hal. 11. Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Tingkat I Bali, *Peraturan-Peraturan Pusat dan Daerah Dibidang Kepariwisata-an* (Denpasar: 1974), hal. 5-6.
4. I Gst. Ngr. Bagus, *Bali Dalam Sentuhan Pariwisata* (Denpasar: 1975), hal. 35-36.
5. Data diambil dari OPS Perhotelan di Denpasar, lihat pula *Laporan Kuliah Kerja Bagian Arsitektur ITB tahun 1969*, Direktorat Tata Kota & Daerah, Tanpa Tahun, hal. 12-14. *Rencana Induk Wilayah Wisata Sanur*, hal. 15.
6. *Rencana Induk Wilayah Wisata Sanur*, Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali, 1979, hal. 22-23.

7. Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Tingkat I Bali, *op. cit.*, hal. 94-95.
8. *Monografi Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, tahun 1984*, hal. 88.
9. *Analisa Rencana Umum Kota Denpasar*, Direktorat Tata Kota dan Daerah Direktorat Jendral Cipta Karya Dep. PU, 1983, hal. 12.
10. *Statistik Perkembangan Pariwisata Bali tahun 1981*, Biro Pusat Statistik Kantor Statistik Provinsi, hal. 50.
11. *Rencana Induk Wilayah Wisata Kuta dan Tuban*, Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali, 1979, hal. 68. *Monografi Kabupaten Daerah, op. cit.*, hal. 102.
12. *Ibid.*, hal. 68-69.
13. *Ibid.*, hal. 69.
14. P. Shanty, "Sedjarah Bali Purba," *Indonesia, Nomor Bali*, tanpa tahun, hal. 12.
15. Lihat R. Goris & P.L. Dronkers, *Bali, Atlas Kebudayaan*, Penerbit Republik Indonesia, tanpa tahun, hal. 178.
16. Untuk obyek-obyek wisata di sini lihat "Konsultan Kepariwisata, *Analisa & Saran Data Obyek Pariwisata Bali*, Kantor Dinas Pariwisata Dati I Bali, tanpa tahun.
17. Miguel Covarrubias, "Seni dan Seniman," *Indonesia Nomor Bali, op. cit.*, hal. 70.
18. *Ibid.*
19. Team Universitas Udayana, *op. cit.*, hal. 33-35.
20. Philip F. Mc. Kean, "Analisa Pendahuluan Tentang Interaksi Orang Bali dan Wisatawan," I Gst. Ngr. Bagus (ed.), *Bali Dalam Sentuhan Pariwisata* (Denpasar: 1975), hal. 40-41.
21. *Ibid.*, hal. 42-43.

22. *Rencana Induk Excursion Read Tahap I + II Dati II Badung*, Unit Perencanaan Daerah Tingkat I Bali/Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali/Proyek Pengembangan Pariwisata Bali (Denpasar: tanpa tahun), hal. 12.
23. Team Universitas Udayana, *op. cit.*, hal. 43.
24. Team Research Universitas Udayana, *op. cit.*, hal. 12-13.
25. Philip F.Mc. Kean, *op. cit.*, hal. 43.
26. Team Universitas Udayana, *op. cit.*, hal. 49. *Bali, Pariwisata Dalam Angka* (1983).
27. *Analisa Rencana Umum Kota Denpasar*, *op. cit.*, hal. 12-13, tabel hal. 31.
28. Team Universitas Udayana, *Penanggulangan . . .*, *op. cit.*, hal. 52-53.
29. *Monografi Kabupaten Daerah Tingkat II Badung* (1984), hal. 26.
30. *Ibid.*, hal. 28.
31. *Denpasar*, Direktorat Tata Kota dan Daerah Direktorat Jenderal Tjipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, tanpa tahun, hal. 7.
32. *Analisa Rencana Kota*, *op. cit.*, hal. 14.
33. *Rencana Induk, Excursion Read Dati II Badung*, Unit Perencanaan, *op. cit.*, hal. 8.
34. Philip F.Mc. Kean, *Analisa Pendahuluan*, *op. cit.*, hal. 44.
35. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia (Jakarta: 1970) hal. 236-237.

BAB VI KESIMPULAN

Dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sejak zaman kerajaan pola Kota Denpasar masih tradisional di mana puri merupakan pusat segala aktivitas. Perkembangan Kota Denpasar baru tampak setelah pemerintah kolonial Belanda banyak memasukkan unsur-unsur kebudayaan barat khususnya di bidang arsitektur, sehingga Kota Denpasar lama-kelamaan semakin ramai sebagai kota Kerajaan Badung.

Perkembangan Kota Denpasar baru tampak mengalami kemajuan yang pesat setelah Kota Denpasar ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Tingkat I Bali pada tahun 1960. Di samping faktor letak yang strategis, Kota Denpasar juga memiliki pelabuhan laut dan udara. Hal ini menunjang perkembangan Kota Denpasar menjadi pusat perekonomian. Di samping itu satu faktor yang cukup penting peranannya adalah dari segi kebudayaan, yaitu kebudayaan Bali yang cukup terkenal di dunia sehingga membawa nama Pulau Bali termashur ke mana-mana sebagai pusat pariwisata di Indonesia. Hal ini memberi banyak pengaruh terhadap perkembangan Kota Denpasar sehingga kota ini di

samping sebagai ibu kota juga menjadi pusat perekonomian dan pusat pariwisata.

Ketiga faktor tersebut memberikan dampak terhadap masyarakat Kota Denpasar dengan timbulnya urbanisasi. Seperti lazimnya kota-kota besar lainnya di Indonesia, masalah urbanisasi merupakan ciri dari sebuah kota besar karena timbul dampak sosial yang cukup luas dan komplek. Dari aspek ekonomi dapat kita lihat bahwa berpindahnya penduduk dari desa ke kota semata-mata menginginkan mata pencaharian baru. Hal ini jelas menimbulkan perubahan nilai, sikap, perilaku maupun pandangan. Kebudayaan kota memberikan bentuk gaya hidup kekotaan, sifat-sifat individual mulai tampak yang jauh berbeda dengan pola kehidupan masyarakat pedesaan.

Perubahan sosial semacam ini hampir dijumpai di setiap kota besar di Indonesia. Bagi Kota Denpasar yang berlatar belakang kebudayaan Bali yang berakar kebudayaan Hindu, tampak jelas perbedaan sikap dan pandangan yang membedakan pandangan masyarakat kota dengan masyarakat di luar lingkungannya, terutama apabila kita bandingkan dengan masyarakat pedesaan yang sangat terikat oleh nilai-nilai tradisional, berbagai aturan, sistem banjar, adat kebiasaan, sehingga gaya hidupnya masih tampak lebih sederhana.

Dari ketiga aspek tersebut yang paling menonjol adalah Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan dan pusat pariwisata. Hal ini menjadikan Kota Denpasar memiliki kekhasan dibandingkan kota besar lainnya di Indonesia sehingga menjadikan kebanggaan rakyat Bali, karena Kota Denpasar semakin lama semakin besar dan indah serta membawa nama Bali ke dunia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara, I Wayan Wesna, *Perkembangan Kota Denpasar Tahun 1906-1908* (skripsi sarjana), Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- Analisa Rencana Umum Kota Denpasar*, Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah Direktorat Jendral Cipta Karya Dep. PU, 1983.
- Analisa & Saran Data Obyek Pariwisata Bali*. Kantor Dinas Pariwisata Dati I Bali, tanpa tahun.
- Bali , Pariwisata Dalam Angka*, tahun 1983.
- Bagus, I Gst. Ngr., *Bali Dalam Sentuhan Pariwisata*, Denpasar: 1975.
- Balai Pustaka, *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Bloemenwanders, "Bidragen tot de kennis van het Eiland Bali," dalam *TNI II*, 1868.
- Babad Bandara Raja* (manuskrip), koleksi A.A. Ngurah Putra, Denpasar.
- Babad Badung Bushan* (manuskrip), koleksi I Gusti Ngurah Alit Konta, Denpasar.

- Babad Dalem* (manuskrip), koleksi Perpustakaan Lontar Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- Broweken, *Memorie van Overgave van den Residen op Bali en Lombok*, 1932.
- Bashan, A.L., "Sejarah Timbulnya Kota-Kota di India," dalam Sartono Kartodirdjo (ed.), *Masyarakat Kuno & Kelompok-Kelompok Sosial*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977.
- Covarrubias, Miguel, "Seni dan Seniman," *Indonesia Nomor Bali*.
- Caron, *Memorie van Overgave van den Resident Bali en Lombok*, April 1929.
- Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Bali, *Peraturan-Peraturan Pusat dan Daerah Dibidang Kepariwisataaan*, Denpasar: 1974.
- Denpasar, Direktorat Tata Kota dan Daerah Direktorat Jenderal Tjipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, tanpa tahun.
- Dieters Evers, Hans, *Sosiologi Perkotaan*, Jakarta: LP3S, 1982.
- Eck, R. van, "Schotschen van het Eiland Bali," dalam *TNI I*, 1880.
- Goris, R & Dronkers, P.L., *Bali Atlas Kebudayaan*, Penerbit Republik Indonesia, tanpa tahun.
- Geuns, Van, "Door Badong en Tabanan en ander over Bali en Zijn bewoners, dalam *Soerabayas Handelblaads*, Batavia: 1906.
- Hookstra, H.J., *Nota van Toelichtingen Betreffende het in te stellen Zelfbesturend Landschap Badoeng*, tanpa tahun.
- Hollander, J.J. de, *Handleiding by de boefening der landen, volkenkunde van Nederlandsche Ooost Indie*, Breda; Van Boes & Compagnie, 1898.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1978 Tentang Pembentukan Kota Administratif Denpasar, Jakarta: 11 Juli 1978, Arsip Sub Bagian Hukum dan Kependidikan Kantor Walikota Administratif Denpasar.

- Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung, Nomor Not.4/81/1980, Tentang Peralihan Tugas, Wewenang Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung kepada Pemerintah Kota Administratip Denpasar, Denpasar: 6 September 1980, Arsip Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian Kantor Walikota Administratip Denpasar.
- Koen, F.Mc., "Analisa Pendahuluan Tentang Interaksi Orang Bali dan Wisatawan," I Gst. Ngr. Bagus (ed.), *Bali Dalam Sentuhan Pariwisata*, Denpasar: 1975.
- Kementerian Penerangan RI, Sunda Ketjil, Djakarta: 1954.
- Kartodirdjo, Sartono (ed.), *Masyarakat Kuno & Kelompok-Kelompok Sosial*, Jakarta: Bratara Karya Aksara, 1977.
- Koll, van, *Uit Onge Kolonien*, Amsterdam: 1958.
- Liffrinck, F.A., *De Landsverordeningen der Balische vorsten van Lombok*, S Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1915.
- Lauts, *Het Eiland Bali in de Balnezen*, Amsterdam: 1955.
- Moll, HJE, *Memorie van Overgove van den Resident op Bali en Lombok*, Mei 1941.
- Monografi Kabupaten Daerah Tingkat II Badung*, 1984.
- Nielsen, AR, *Leven en Aventuren van een Oostini je vander op Bali*, Amsterdam: 1928.
- Nordolt, Henk Schlte, *The Lange Connection, A Denish Trader of Bali in the Middle of the KIK Century, Broeker and Buffer*, Amsterdam, 1980.
- Oka, I Dewa Gede, "Kota Denpasar dengan Permasalahannya," makalah yang disajikan dalam loka karya pembangunan kota Denpasar dari tanggal 22 s/d 24 September 1980 di kampus Universitas Udayana, Denpasar.
- Oscar Hadlin and John Burchard, *The Historien and the City*, Massachussetts, The M.I.I. Press, 1963.
- "Orang Bali dengan Perkoempoelannya," dalam majalah *Djatju* No. 11, Singaradja, September 1938.
- Putra Agung, Anak Agung Gde, "Kebudayaan Istana Aulapura," dalam Soedarsono (ed.), *Peranan Kebudayaan Nasional*, Jogjakarta: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan

- Nusantara (Javanologi), Dirjen Kebudayaan, Depdikbud, 1965.
- Pammncangah Batu Tabanan* (manuskrip), koleksi Gedong Kirtya, Singaraja.
- Pendit, Nyoman S., *Bali Berjuang*, Jakarta: Gunung Agung, 1979.
- , *Mencari Inovasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1979.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1978, Tentang Pembentukan Kota Administratip Denpasar, Jakarta: 1 Juli 1978, Arsip Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian Kantor Walikota Administratip Denpasar.
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Daerah Bali*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.
- Proyek Pembinaan Unit Perencanaan Daerah Tingkat I Bali, Dit. Tata Kota dan Tata Daerah Dit. Jen. Cipta Karya Departemen PU, *Kota Administratip Denpasar, Fakta dan Penjelasannya*, Denpasar, 1981.
- Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, *Revisi Rencana Induk Kota Denpasar*, Denpasar: 1981.
- Reksodihardjo, Sarimin, *Memori Penjerahan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara*, Jilid II.
- Rencana Induk Wilayah Wisata Kuta dan Tuban*, Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali, 1979.
- Rencana Induk Exursion Road Tahap I dan II Dati II Badung*. Unit Perencana Daerah Tingkat I Bali/Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali/Proyek Pengembangan Pariwisata Bali, Denpasar, tanpa tahun.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1970.
- Shanty, P., "Sedjarah Bali Purba" dalam *Indonesia* Nomor Bali, tanpa tahun.
- Statistik Perkembangan Pariwisata Bali tahun 1981* Biro Pusat Statistik, Kantor Statistik Propinsi Bali.

- Stenis, LU van, *Memorie van Overgave van Gesest Resident op Bali en Lombok*, 1919.
- Soesanto Astrid S., *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Jakarta Binacipta 1977.
- Soemardjan Selo (ed), *Setangkai Bunga Sosiologi*, Djakarta: Yayasan Penerbit Fak. Ekonomi Univ. Indonesia, 1954.
- Sam., "Sekeliling Ngurah Rai" dalam *Penerangan Pusat Gerak Rakjat Indonesia Sunda Ketjil*, 20 Nopember 1947, Yogyakarta.
- Sukarno, I Wayan BSc., *Daftar Penyediaan Fasilitas Pasar oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten daerah Tingkat II Badung*, Denpasar: Arsip Dinas Pendapatan Sedahan Agung Daerah Tk. II Badung, 24 April 1985.
- Team Penulisan Pusat Sejarah ABRI, *Operasi Lintas Laut dari Banyuwangi ke Bali tahun 1946*. Naskah Ketikan, Koleksi Disjarahdam XVI Udayana, Denpasar.
- Team Research Universitas Udayana, *Pengaruh Adanya Peraturan-Peraturan Daerah Terhadap Perkembangan Pariwisata dan Kebudayaan Bali*, Denpasar: 1976.
- Utrecht, E, *Sedjarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok*, Bandung: Sumur Bandung, 1962.
- Unit Perencanaan Daerah Bali, *Perencana Induk Kota Denpasar*. Denpasar: 1972.
- Wardana, Drs I Gusti Ngurah, *Data dan Permasalahan Kota Denpasar*, makalah yang disajikan dalam Loka karya pembangunan Kota Denpasar dari tanggal 22 s/d 24 September 1980 di Kampus UNUD Denpasar.
- Widminarko, "Bunga Rampai Pemilihan Umum 1955" dalam *Bali Post*, tanggal 9 April 1977.

Lampiran : 1

KABUPATEN BULELENG

**GAMBAR
ORIENTASI
KOTA DENPASAR**

Kec. Pelang

KABUPATEN
BANGIL

KABUPATEN
TABANAN

KABUPATEN
GLANYAR

KABUPATEN BADUNG

Kec. Meno

LEGENDA

-  Kota Denpasar
-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Jalan Negara
-  Jalan Propinsi
-  Jalan Kabupaten

Kec. DPS Timur

Kec. DPS Barat

Kec. DPS Selatan

SAMUDRA
INDONESIA



 km
0 30 50

Sumber :

**DINAS PU DT. II
KAB. BADUNG**

Lampiran 2

**ORGANISASI YANG MENDAPAT DUKUNGAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1955**

No.	Kabupaten	PNI	PSI	PKI	BP	Masyumi
1	Karangasem	63.933	30.582	6.784	—	3.567
2	Klungkung	38.150	5.968	4.935	—	778
3	Gianyar	50.947	49.636	4.067	—	—
4	Bangli	36.340	16.222	206	334	—
5	Badung	40.608	60.584	9.158	2595	—
6	Tabanan	52.706	65.955	3.701	—	694
7	Jembrana	25.398	—	9.772	—	5.152
8	Buleleng	80.701	—	20.402	5769	6.337
Jumlah		388.783	228.947	59.025	8698	16.528

No.	Kabupaten	PRI	PRN	PB	PPPRI	NU	MURBA
1	Karangasem	—	—	1712	—	—	—
2	Klungkung	4504	—	—	*	—	—
3	Gianyar	—	—	568	387	—	—
4	Bangli	—	—	—	214	—	—
5	Badung	5153	—	—	—	—	—
6	Tabanan	—	1676	—	—	—	—
7	Jembrana	—	—	—	—	1.621	1.025
8	Buleleng	4777	—	—	—	—	—
Jumlah		14434	1676	2280	601	1.621	1.025

Keterangan : BP (Biro Pancasila), PB (Partai Buruh), PPPRI (Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia).

Sumber : Widminarko, "Bunga Rampai Pemilihan Umum Tahun 1955, dalam *Bali Post*, 9 April 1977, hal. 2.

Lampiran 3

**PERIMBANGAN ANGGOTA DPRD PERALIHAN SE BALI
BERDASARKAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 1955**

No.	Kabupaten	PNI	PSI	PKI	PRI	BP	Masyumi	NU
1	Karangasem	9	4	1		—	1	—
2	Klungkung	8	2	1	1	—	—	—
3	Gianyar	7	7	1	—	—	—	—
4	Bangli	8	4	—	—	—	—	—
5	Badung	5	7	1	1	1	—	—
6	Tabanan	6	8	1	—	—	—	—
7	Jembrana	6	—	2	—	—	1	1
8	Buleleng	10	—	2	1	1	1	—

Sumber : Widminarko, "Bunga Rampai Pemilihan Umum 1955 dalam Bali Post, 9 April 1977, hal. 2.

Lampiran 4

HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 1971 DI PROPINSI BALI

No.	Nama Daerah Tingkat II	Katholik	PSII	NU	Parmusi	Golkar
1	Buleleng	100	105	2.063	591	188.658
2	Jembrana	578	78	7.775	2539	61.726
3	Tabanan	119	153	826	250	105.275
4	Badung	1051	326	2.404	1103	135.021
5	Gianyar	68	143	354	109	120.286
6	Bangli	11	46	108	19	72.588
7	Klungkung	27	95	1.057	281	62.584
8	Karangasem	56	172	2.283	894	124.506
Jumlah		2010	1118	16.870	5586	370.644

No.	Nama Daerah	Parkindo	Murba	PNI	PERTI	IPKI
1	Buleleng	349	8	259	44	651
2	Jembrana	650	130	3335	39	285
3	Tabanan	267	25	50597	68	8850
4	Badung	1390	73	49838	115	2397
5	Gianyar	137	40	17302	67	2185
6	Bangli	76	5	442	34	304
7	Klungkung	131	12	3757	67	1248
8	Karangasem	247	41	4729	145	4368
Jumlah		3247	334	130259	597	20288

Sumber : Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Bali.

Lampiran 5

HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977 DI PROPINSI BALI

No.	Daerah Pemilihan Tingkat II	Jumlah suara		
		PPP	sah masing-masing GOLKAR	organisasi PDI
1	Karangasem	1.788	146.517	5.609
2	Klungkung	1.117	64.401	6.208
3	Bangli	80	75.733	5.315
4	Gianyar	180	114.414	34.993
5	Badung	4.759	171.132	50.712
6	Tabanan	1.043	135.724	45.121
7	Jembrana	6.888	78.185	3.547
8	Buleleng	3.536	220.112	3.159
Daerah Tk. I Bali		19.391	1.010.218	154.664

Sumber : Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Bali.

Lampiran 6

**DAFTAR PENYEDIAAN FASILITAS PASAR OLEH
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BADUNG TK. II BADUNG**

No.	Nama Lokasi pasar	Daya tampung (Pedagang)	Terdiri dari	
			Toko/Kios	Los
1	Pasar Sanglah	184	35	120
2	Pasar Inpres Sanglah	122	40	82
3	Pasar Senggol Sanglah	26	—	—
4	Pasar Inpres Badung	1749	291	1354
5	Pasar Inpres Kereneng	1110	167	573
6	Pasar Kumbasari	904	293	161
7	Pasar Senggol Kumbasari	145	—	—
8	Pasar Lokitasari	61	24	37
9	Pasar Inpres Gunung Agung	160	22	71
10	Pasar Pemecutan	16	16	—
11	Pasar Inpres Satria	337	43	294
12	Pasar Inpres Ketapian	139	18	69
13	Pasar Senggol Suci	64	—	—
14	Pasar Inpres Ubung	126	16	110
15	Pasar Senggol Bina	108	53	56
J u m l a h		5251	1018	2927

Sumber : Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung, Denpasar,
24 April 1985.

Lampiran 7a

**DAFTAR INDUSTRI
DI KECAMATAN DENPASAR BARAT TAHUN 1981**

KEC. DENPASAR BARAT

No	Jenis Industri	Jumlah	Kapasitas per Tahun	
1.	Makanan dalam kaleng	1 bh	5.000.000	Klg
2.	Bandeng, Ham, Sosis	6 bh	103.920	Kg
3.	Pabrik Es Batu	1 bh	13.000	Ton
4.	Pabrik Es Lilin	1 bh	1.500.000	Bt
5.	Minyak Kelapa	5 bh	31.200	Ton
6.	Kacang Asin	3 bh	18.360	Kg
7.	Penggilingan Jagung	2 bh	309.000	Kg
8.	Makanan Ternak	1 bh	1.200.000	Kg
9.	Roti, Jajan yang sejenis	7 bh	114.750	Kg
10.	Kopi Bubuk	6 bh	325.500	Kg
11.	L i m u n	11 bh	1.067.544	Ltr
12.	Minuman yang mengandung alkohol	6 bh	10.500	Ltr
13.	K e c a p	4 bh	66.840	Kg
14.	Tahu dan Tempe	5 bh	63.300	Kg
15.	Kembang Gula	1 bh	3.600	Kg
16.	Rokok Keretek	1 bh	300.000.000	Bt
17.	M i e	---	---	
18.	Kerupuk	1 bh	2.400	Bt
19.	Agar-agar	1 bh	4.800	Kg
20.	Pemintalan benang	---	---	
21.	Tenun ATBM	26 bh	535	ATBM
22.	Tenun ATM			
23.	Perajutan	1 bh	60.000	Dosin
24.	Tenun Gagag			
25.	Pencelupan	11 bh	3.660	Pak
26.	Penjahit Pakaian	9 bh	37.440	PT
27.	Konveksi	4 bh	38.100	Pt
28.	Percetakan	16 bh	59.866.800	m2
29.	S a b u n	4 bh	2.184.000	Kg

No.	Jenis Industri	Jumlah	Kapasitas per Tahun	
30.	Deterjen			
31.	Barang2 Plastik	2 bh	21.300	Kg
32.	Pelitur	1 bh	2.400	Ltr
33.	D u p a	2 bh	2.400.000	Bt
34.	Perekaman	2 bh	60.000	bh
35.	Pengawetan Kulit	2 bh	240.000	Kg
36.	Sepatu/sandal	1 bh	576	Ps
37.	Rep Sepatu	1 bh	4.500	Ps
38.	Dangdang	4 bh	97.200	Bj
39.	Pengergaji Kayu	7 bh	2.850	m3
40.	Meubeul Kayu/Rotan	11 bh	2.976	bh
41.	Rep Kursi Busa	3 bh	696	Stel
42.	Rep Mobil	26 bh	15.060	bh
43.	Rep Sepeda Motor	11 bh	3.228	bh
44.	Rep Sepeda	12 bh	2.832	bh
45.	Rep Arloji	14 bh	12.072	bh
46.	Rep Radio	5 bh	3.444	bh
47.	Rep Listrik			
48.	Rep Mesin Tulis	1 bh	9.000	bh
49.	Rep Accu/Dinamo	5 bh	924	bh
50.	Lass Kaca Mata	1 bh	10.500	Ps
51.	Erames Kaca Mata			
52.	B u b u t	3 bh		
53.	Cor Logam	1 bh	900	ton
54.	Vulkanisir Ban	2 bh	1.080	bh
55.	Cat Mobil	1 bh	900	bh
56.	Tukang Gigi			
57.	Keramik			
58.	Tegel Beton	13 bh	123.960	m2
59.	K a s u r	1 bh	60	bh
60.	Batu merah			
61.	Genteng	4 bh	123.960	Ps
62.	Patung Kayu	4 bh		
63.	Payung/Pajeng			
64.	Pande Besi			

No.	Jenis Industri	Jumlah	Kapasitas per Tahun	
65.	Kerajinan Mas, Perak	6 bh	13.200	Cr
66.	Stempel Karet			
67.	Barang-barang dari karet	2 bh	9.000	Kg
68.	Barang2 dari Kayu/Bambu	1 bh	1.440	Bh
69.	Pakaian Penari			
70.	Cones Benang	1 bh	600.000	Bj
71.	Kertas Karton	1 bh	15.300	m2
72.	Teraci	4 bh	4.140	m2
73.	Karoseki	3 bh	360	bodi
74.	L a s	5 bh	15.000	m2
75.	Cetak foto	1 bh	60.000	rol
76.	J a m u			
77.	Pande Gong			
78.	Tugu dan Besi Beton	1 bh	1.800	Bh
79.	Tukang Lukis			
80.	Pembuatan Reklame	1 bh	720	m2
81.	Eternit	1 bh	18.000	Lb
82.	Sablon	1 bh	15.000	Bh
83.	Barang2 Plastik	2 bh	14.100	Kg
84.	Rep Radiator	2 bh	216	Bh

Sumber: Proyek Pembinaan Unit Perencanaan Daerah Tingkat I Provinsi Bali Dit Tata Kota dan Tata Daerah Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, *Kota Administratif Denpasar, Fakta dan Penjelasannya*, Denpasar, 1981

Lampiran 7b

**DAFTAR INDUSTRI
DI KECAMATAN DENPASAR TIMUR TAHUN 1981**

No.	Jenis Industri	Jumlah	Kapasitas Per Tahun	
1.	Dendeng, Ham, Sosis	2 bh	19.200	Kg
2.	Pabrik es batu	1 Bh	1.800	Ton
3.	Pabrik es lilin	2 Bh	204.000	BT
4.	Penggilingan Jagung	1 BH	120.000	KG
5.	Makanan Ternak	1 BH	19.200	KG
6.	Kopi Bubuk	1 Bh	28.800	KG
7.	Li m u n	4 Bh	726.300	LTR
8.	Kecap	1 Bh	2.400	KG
9.	Tahu/Tempe	1 Bh	4.800	KG
10.	Pemintalan Benang	1 Bh	15.200	MP
11.	Tenun ATBM	6 Bh	109	ATBM
12.	Tenun ATM	4 Bh	79	ATM
13.	Pencelupan	5 Bh	4.380	Pak
14.	Konveksi	4 Bh	26.400	PT
15.	Percetakan	18 Bh	22.552.000	M2
16.	Penjahit Pakaian	4 Bh	15.600	PT
17.	S a b u n	1 Bh	150.000	KG
18.	Deterjen	2 Bh	312.000	KG
19.	D u p a	3 Bh	7.500.000	BT
20.	Perekaman	3 Bh	30.100	BH
21.	Pengergaji Kayu	3 Bh	1.500	M3
22.	Meubeul Kayu/Rotan	6 Bh	1.416	Bh
23.	Rep Korsi Busa	2 Bh	144	Bh
24.	Rep Mobil	6 Bh	12.504	Bh
25.	Rep Radio	2 Bh	1.620	Bh
26.	Rep Mesin Tulis	1 Bh	180	Bh
27.	Rep Accu/Dinamo	1 Bh	120	Bh
28.	Vulkanisir Ban	1 Bh	9.600	Bh
29.	Cat Mobil	1 Bh	60	Bh

No.	Jenis Industri	Jumlah	Kapasitas per Tahun	
30	Tegel Beton	7 Bh	50.000	M3
31.	Bata Merah	11 Bh	600	M3
32.	Payung/Pajeng	1 Bh	1.680	Bh
33.	Pande Besi	1 Bh	12.000	Bh
34.	Kerajinan Mas, Perak	3 Bh	4.800	GR
35.	Stempel Karet	1 Bh	3.000	Bj
36.	Pakaian Penari	1 Bh	120	Stel
37.	Terali	6 Bh	1.020	M2
38.	Karoseri	1 Bh	144	Body
39.	L a s	2 Bh	1.800	M2
40.	Cetak Foto	1 Bh	15.000	Rol
41.	J a m u	1 Bh	60	BTL
42.	Pande gong	1 Bh	12	Barung
43.	Tugu dan Besi Beton	1 Bh	1.200	Bh
44.	Tukang Lukis	1 Bh	108	Bh
45.	Bata Ton	1 Bh	300.000	Bh

Sumber: **Proyek Pembinaan Unit Perencanaan Daerah Tingkat I Provinsi Bali Dit Tata Kota dan Tata Daerah Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Kota Administratif Denpasar, Fakta dan Penjelasannya, Denpasar, 1981**

Lampiran 7c

**DAFTAR INDUSTRI
DI KECAMATAN DENPASAR SELATAN TAHUN 1981**

No.	Jenis Industri	Jumlah	Kapasitas Per Tahun
1.	Makanan Dalam Kaleng	1 Bh	7,2 juta Kl
2.	Pabrik Es Batu	1 Bh	6.000 Ton
3.	Pabrik Es Lilin	2 Bh	8.100.000 BT
4.	Roti, Jajan kue yang sejenis	1 Bh	2.400 KG
5.	Kopi Bubuk	2 Bh	111.000 KG
6.	Limun	1 Bh	13.333 LTR
7.	Minuman Yang Mengandung Alkohol	1 Bh	18.000 LTR
8.	Tahu/Tempe	1 Bh	18.000 LTR
9.	Tenun ATBM	1 Bh	20 ATBM
10.	Penjahit Pakaian	2 Bh	39.108 PT
11.	Percetakan	1 Bh	480.000 M2
12.	Deterjen	1 Bh	30.000 KG
13.	Perekaman	1 Bh	15.000 Bh
14.	Meubeul Kayu/Rotan	1 Bh	1.008 Bh
15.	Prames Kaca Mata	1 Bh	2.400 Bh
16.	Keramik	1 Bh	36.000 HJ
17.	Tegel Beton	2 Bh	36.960 M2
18.	Batu Merah	1 Bh	384.000 MJ

Sumber: Proyek Pembinaan Unit Perencanaan Daerah Tingkat I Provinsi Bali Dit Tata Kota dan Tata Daerah Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, *Kota Administratif Denpasar, Fakta dan Penjelasan*, Denpasar, 1981

Lampiran 8

**SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA DAN
SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS
TAHUN 1980 YANG ADA DI KOTIF DENPASAR**

No.	Desa	SMTP		SMTA	
		Sekolah	Murid	Sekolah	Murid
1.	Dangin Puri	14	6764	20	10373
2.	Sumerta	2	1061	1	538
3.	Kesiman	1	318	1	289
4.	Tonja			1	251
5.	Penatih	1	140		
6.	Dauh Puri	8	3430	6	2486
7.	Pemecutan	1	717		
8.	Padangsambian				
9.	Paguyangan	1	334		
10.	Ubung	2	173	3	102
11.	Sanur	2	786	1	213
12.	Renon			1	517
13.	Panjer	1	229	3	1501
14.	Sesetan	3	663	5	1841
15.	Pedungan	1	402		
16.	Serangan				
Jumlah		37	14999	42	18111

Sumber: Proyek Pembinaan Unit Perencanaan Daerah Tingkat I
Bali Dit. Tata Kota dan Tata Daerah Dit. Jen. Cipta Karya
Departemen PU, Kota Administratif Denpasar, Fakta dan Pen-
jelasannya, Denpasar, 1981

Lampiran 9

**JUMLAH PERGURUAN TINGGI' AKADEMI DAN TENAGA
PENGAJAR TAHUN 1979 DI KOTIF DENPASAR**

No.	Jenis Perguruan Tinggi dan Akademi	Jumlah mahasiswa	Jumlah pengajar
1	Akademi Perhotelan Bali	95	19
2	Akademi Bahasa Asing	53	11
3	STIK AKABA	504	31
4	Akademi Senitari Indonesia	44	55
5	Universitas Ngurah Rai	655	104
6	Institut Hindu Dharma	455	55
7	Universitas Marhaen	715	105
8	Akademi Perhotelan dan Pariwisata	90	25
9	Universitas Udayana	7227	998
10	IKIP Maha Saraswati	719	51
11	Akademi Teknik 20 Nopember	143	27
12	Akademi Sekretaris dan Manage	140	13
13	Universitas Bali Dwipa	255	132
14	Akademi Administrasi Negara	236	23
Jumlah		11331	1649

Sumber: Proyek Pembinaan Unit Perencanaan Daerah Tingkat I Bali Dit. Tata Kota dan Tata Daerah Dit. Jen. Cipta Karya Departemen PU, *Kota Administratif Denpasar, Fakta dan Penjelasan*, Denpasar, 1981

Lampiran 10

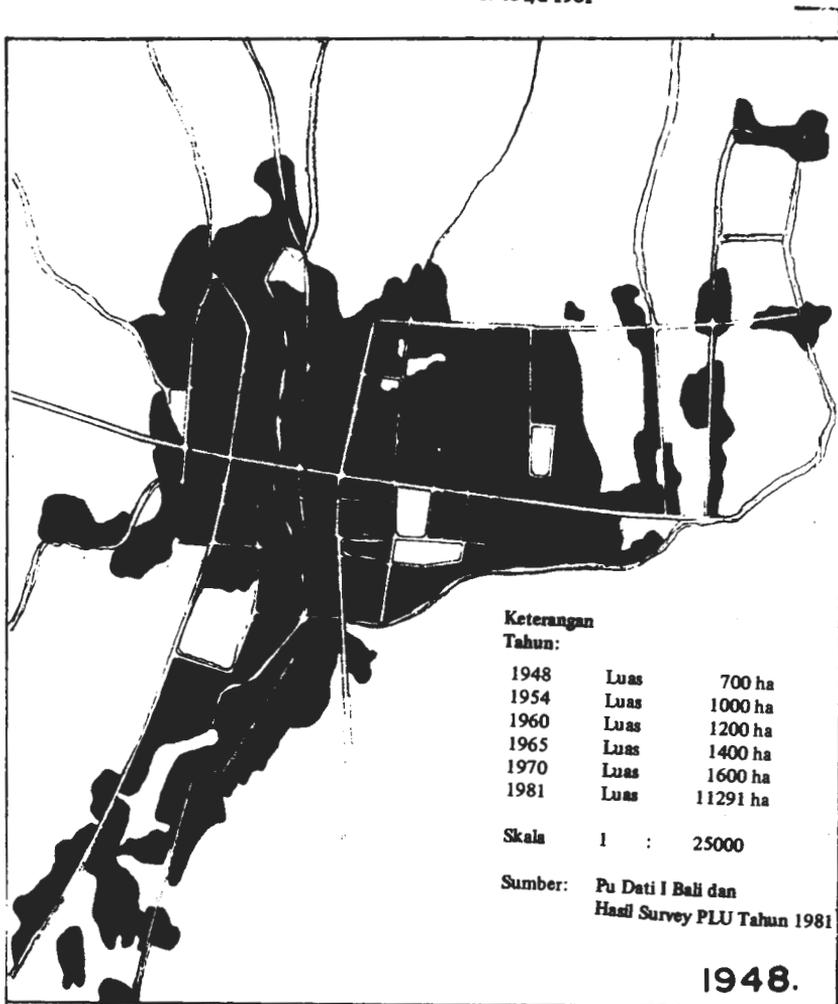
**JUMLAH TENAGA DOKTER DI DAERAH TINGKAT II
BADUNG TAHUN 1979/1980**

No.	Jenis	1977/1978	1978/1979	1979/1980
1	Dokter Ahli Mata	1	2	2
2	Dokter Mata	1		
3	Dokter Gigi	6	10	14
4	Dokter Ahli Penyakit Dalam	3	4	3
5	Dokter Ahli Syaraf	1	2	2
6	Dokter Ahli Anak-anak	3	3	4
7.	Dokter Ahli Kandungan	1	1	1
8	Doker Ahli Penyakit	1	1	1
9	Dokter Ahli Paru-paru	1	1	1
10	Dokter Ahli Bedah	2	2	3
11	Dokter Ahli THT	1	2	2
12	Dokter Umum	119	126	135
Jumlah		140	156	170

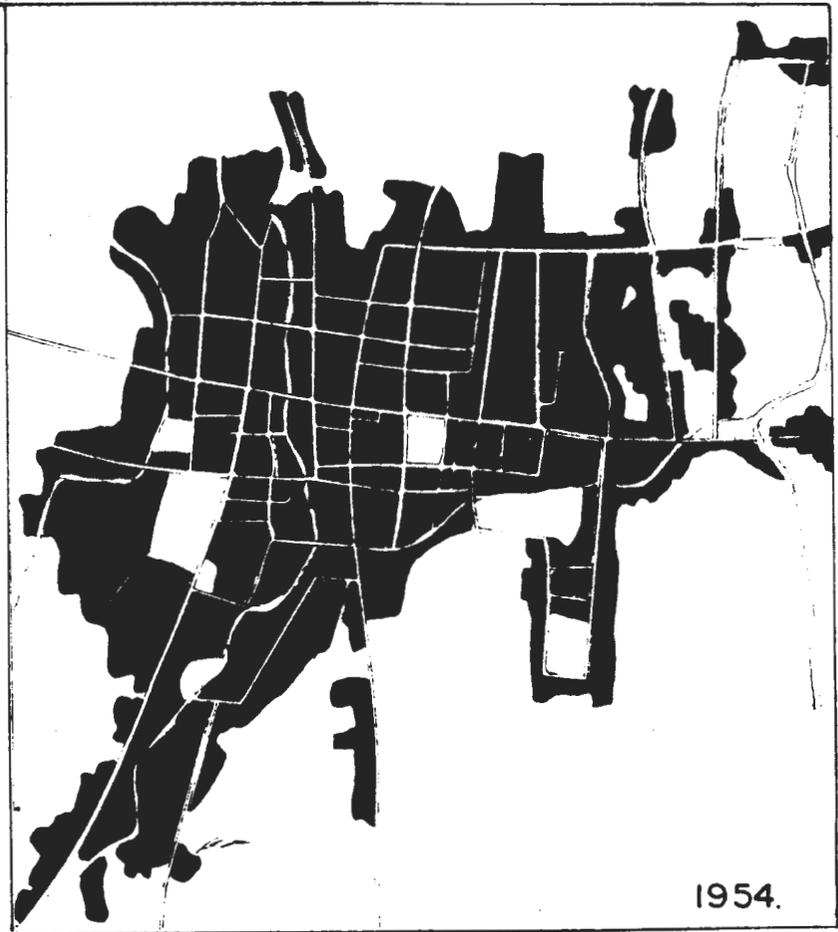
Sumber: Kantor Dokabu Daerah Tingkat II Badung.

Lampiran 11.

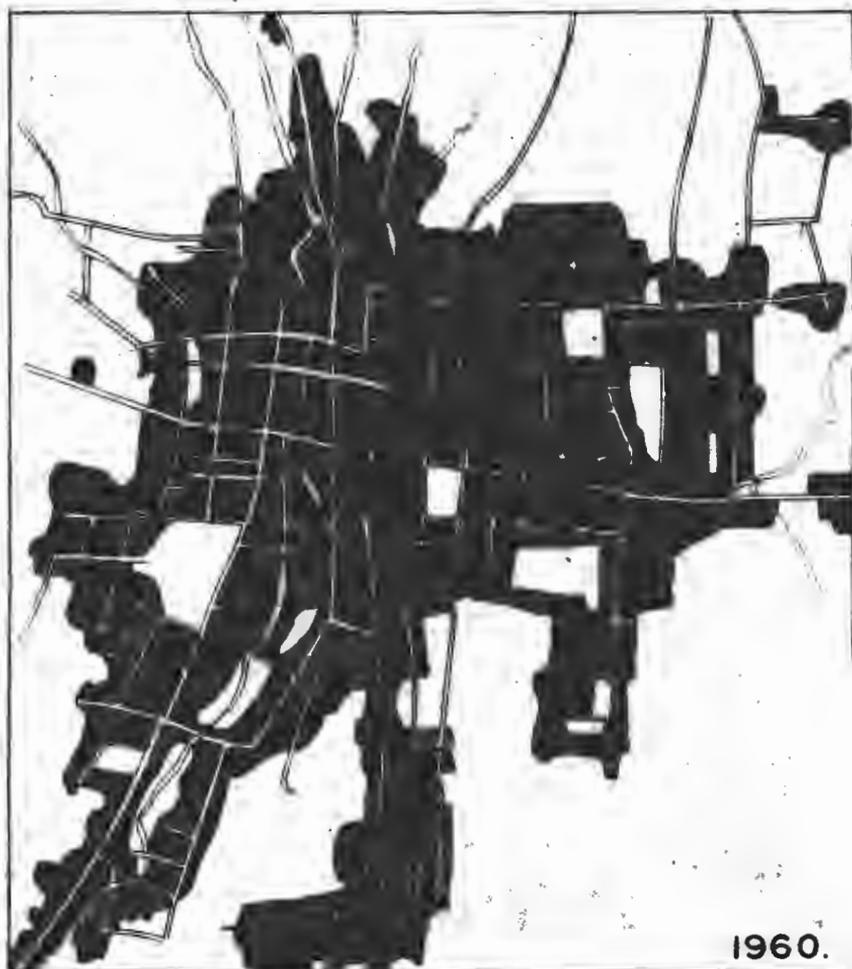
**PETA PROSES PERKEMBANGAN KOTA DENPASAR
DARI TAHUN 1948 s/d 1981**



Lampiran : 11a



Lampiran : 11b



Lampiran : 11c





1981

1970



Lampiran : 11d

